

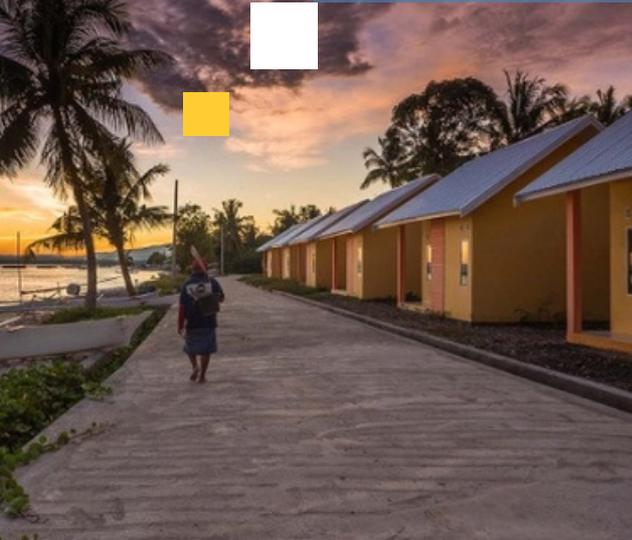


DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

LAPORAN KINERJA DJPI

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN

20 23



DJPI 2023



Herry Trisaputra Zuna
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga "**Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023**" dapat selesai tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan dengan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan secara terukur, beserta analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi perbaikan kinerja kedepan. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023 yang selaras dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan maupun Kementerian PUPR Tahun 2020-2024. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk evaluasi kinerja dan perumusan strategi kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2023.

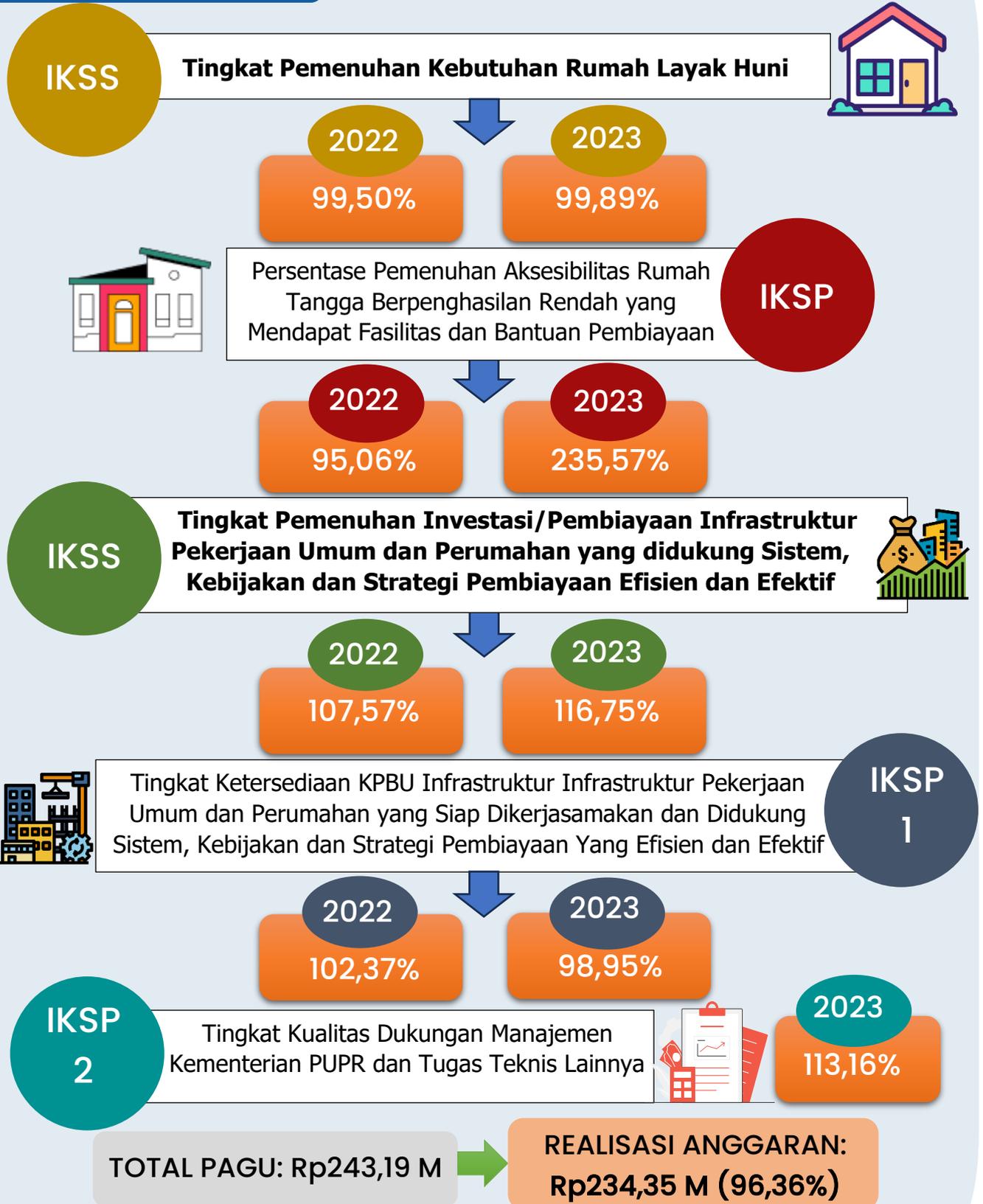
Jakarta, 19 Januari 2024

Direktur Jenderal

Herry Trisaputra Zuna

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian Kinerja



Faktor Keberhasilan Capaian Program

- Realisasi penyaluran program bantuan pembiayaan perumahan yakni FLPP dan SMF melebihi target yang ditetapkan.
- Strategi optimalisasi pemanfaatan Dana FLPP berhasil dilakukan secara cermat dan tepat sasaran.
- Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara DJPI dengan para *stakeholder* terkait fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan.

Isu Strategis/Kendala dalam Pencapaian Program

- Terbatasnya inovasi pembiayaan infrastruktur non APBN.
- Durasi pelaksanaan tahapan Penyiapan KPBU, pemenuhan *Readiness Criteria*, dan Transaksi membutuhkan waktu yang cukup lama.
- Adanya perubahan/dinamisasi kebijakan pelaksanaan KPBU.
- Belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian PUPR.

Rekomendasi Tindak Lanjut

- Melanjutkan proses harmonisasi hingga penerbitan Permen PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur di Kementerian PUPR dalam rangka optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU, pembagian wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien serta percepatan pelaksanaan KPBU.
- Mengimplementasikan inovasi "*Three Bold Actions*" sebagai terobosan untuk menutup *funding gap* infrastruktur serta percepatan pelaksanaan Proyek KPBU.
- Menyusun Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR.
- Melakukan reformasi KPBU sektor bidang PUPR.
- Memperkuat Dashboard Simpul KPBU sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan Proyek KPBU.
- Memperluas kerjasama dengan perbankan dan instansi terkait untuk mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel.
- Melakukan optimalisasi fitur integrasi antara FLPP dan SBUM (e-flpp 2.0), dalam mengurangi *gap* waktu penyaluran dan jumlah unit antara FLPP dan SBUM.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis.....	11
1.5 Sistematika Laporan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis.....	18
2.1.1 Visi	18
2.1.2 Misi.....	18
2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi	19
2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja	27
2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal	27
2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir	28
2.2.3 Kronologi Perubahan PK.....	29
2.3 Metode Pengukuran.....	31
2.3.1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	32
2.3.2 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya.....	32

2.4	Target Kinerja DJPI Tahun 2023 Berdasarkan Renstra	34
2.4.1	Target Kinerja Berdasarkan Renstra	34
2.4.2	Target Kinerja Eselon II DJPI.....	36
BAB III KAPASITAS ORGANISASI.....		39
3.1	Sumber Daya Manusia	39
3.1.1	Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	40
3.1.2	Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	42
3.1.3	Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan.....	43
3.1.4	Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	45
3.1.5	Pengembangan Pegawai dan Pengelolaan Jabatan Fungsional... ..	47
3.2	Sarana dan Prasarana.....	51
3.3	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	55
3.4	Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran.....	61
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA.....		62
4.1	Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	62
4.2	Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023.....	66
4.2.1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	66
4.2.1.1	Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	67
4.2.1.2	Analisis Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.....	69
4.2.1.3	Capaian Kinerja SS-5: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	70

4.2.1.4	Analisis Capaian Kinerja SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif.....	77
4.2.2	Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI	77
4.2.2.1	Capaian Kinerja SP 1 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	79
4.2.2.2	Analisis Capaian Kinerja SP 1 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan .	82
4.2.2.3	Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif.....	82
4.2.2.4	Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	88
4.2.2.5	Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	89
4.2.2.6	Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.....	90
4.2.3	Capaian Kinerja Kegiatan Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI.....	91
4.2.3.1	Capaian IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	91
4.2.3.2	Analisis Capaian IKK Setditjen PI	92
4.2.3.3	Capaian IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	93

4.2.3.4	Analisis Capaian IKK Direktorat PSSPP.....	94
4.2.3.5	Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.....	95
4.2.3.6	Analisis Capaian IKK Direktorat PPISDA.....	97
4.2.3.7	Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	97
4.2.3.8	Analisis Capaian IKK Direktorat PPIJJ	100
4.2.3.9	Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	101
4.2.3.10	Analisis Capaian IKK Direktorat PPIP	103
4.2.3.11	Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan ...	104
4.2.3.12	Analisis Capaian IKK Direktorat PPP	105
4.3	Perbandingan Kinerja.....	107
4.3.1	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	107
4.3.2	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra	110
4.3.3	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024	116
4.3.4	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Unit Organisasi/Instansi Sejenis (<i>Benchmarking</i>)	124
4.3.5	Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	129
4.4	Realisasi Anggaran	130
4.4.1	Analisis Penyerapan Anggaran	130
4.4.2	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	136
4.5	Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	138
4.6	Penghargaan Atas Kinerja	140
4.7	Inovasi dan/atau Kinerja Lain	143

BAB V	PENUTUP	164
5.1	Simpulan Umum	164
5.2	Faktor Pendukung Keberhasilan	165
5.3	Permasalahan	166
5.4	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	167

LAMPIRAN

Lampiran I	Rencana Aksi
Lampiran II	Perjanjian Kinerja
Lampiran III	Metode Pengukuran Kinerja
Lampiran IV	Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja
Lampiran V	Daftar Penghargaan
Lampiran VI	Dokumentasi Kegiatan

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	PK Awal DJPI Tahun 2023	28
Tabel 2.2	PK Akhir DJPI Tahun 2023	29
Tabel 2.3	Kronologis Perubahan Target PK DJPI Tahun 2023	31
Tabel 2.4	Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra	35
Tabel 2.6	Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.....	36
Tabel 2.7	Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	36
Tabel 2.8	Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.....	37
Tabel 2.9	Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	37
Tabel 2.10	Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	37
Tabel 2.11	Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	38
Tabel 3.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status	38
Tabel 3.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	39
Tabel 3.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	40
Tabel 3.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	42
Tabel 3.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	44
Tabel 3.6	Rekapitulasi Daftar Jumlah Pejabat Fungsional di DJPI.....	47
Tabel 3.7	Daftar Nama Jabatan Fungsional di DJPI.....	48
Tabel 3.8	Daftar BMN DJPI	51
Tabel 3.9	Laporan BMN di Neraca.....	52
Tabel 3.10	Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023	55
Tabel 3.11	Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023	56
Tabel 3.12	Perbandingan Jumlah Pegawai DJPI 2022-2023.....	59

Tabel 4.1	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP DJPI TA. 2022	62
Tabel 4.2	Capaian Program Bidang Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2023.....	68
Tabel 4.3	Capaian SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni.....	68
Tabel 4.4	Capaian SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	71
Tabel 4.5	Rincian Capaian SS-5 pada IKSS-2 Berdasarkan Indikator Kontributor..	71
Tabel 4.6	Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	72
Tabel 4.7	Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan TA. 2023 (Investasi)	75
Tabel 4.8	Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI Tahun 2023.....	78
Tabel 4.9	Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan.....	80
Tabel 4.10	Rincian Capaian IKSP 1 Berdasarkan Indikator Kontributor	83
Tabel 4.11	Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	84
Tabel 4.12	Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan TA. 2023 (Proyek)	86
Tabel 4.13	Rincian Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	89
Tabel 4.14	Capaian IKK Setditjen PI	91
Tabel 4.15	Capaian IKK Direktorat PSSPP	94
Tabel 4.16	Capaian Kinerja Direktorat PPISDA	95
Tabel 4.17	Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan	95
Tabel 4.18	Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air	96
Tabel 4.19	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastuktur Jalan dan Jembatan	98

Tabel 4.20	Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan....	98
Tabel 4.21	Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan	99
Tabel 4.22	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	102
Tabel 4.23	Proyek KPBU Sektor Permukiman yang Siap Dikerjasamakan.....	102
Tabel 4.24	Proyek KPBU Sektor Permukiman	103
Tabel 4.25	Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.....	104
Tabel 4.26	Proyek KPBU Sektor Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	105
Tabel 4.27	Proyek KPBU Sektor Perumahan	105
Tabel 4.28	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2020-2023 terhadap PK	108
Tabel 4.29	Perbandingan Capaian Kinerja IKSS dan IKSP terhadap Renstra	113
Tabel 4.30	Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan terhadap Target Renstra	114
Tabel 4.31	Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan terhadap Target Renstra	115
Tabel 4.32	Perbandingan Capaian Kinerja Program Bantuan Pembiayaan Perumahan DJPI dengan Target Proyek Prioritas Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan RPJMN 2020-2024.....	118
Tabel 4.33	Proyek KPBU SPAM yang Mendukung <i>Major Project</i> Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah) pada RPJMN 2020-2024	123
Tabel 4.34	Proyek KPBU Rumah Susun yang Mendukung <i>Major Project</i> RPJMN: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta).....	124
Tabel 4.35	Perbandingan Capaian Kinerja DJPI dengan DJCK.....	125
Tabel 4.36	Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja KPBU Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan	127
Tabel 4.37	Perbandingan Capaian Kinerja terkait KPBU antara DJPI dengan DJPPR.....	128
Tabel 4.38	Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	129
Tabel 4.39	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Tiap Unit Kerja di lingkungan DJPI	132
Tabel 4.40	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana	133

Tabel 4.41	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program	134
Tabel 4.42	Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja	134
Tabel 4.43	Pengangkatan JF API Tahun 2023	144
Tabel 4.45	Daftar Penerbitan Rekomendasi Kebutuhan Formasi JF API Tahun 2023.....	146
Tabel 4.46	Daftar Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi JF API.....	147

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1 Fungsi Organisasi DJPI.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi DJPI	4
Gambar 2.1 Visi Kementerian PUPR.....	18
Gambar 2.2 Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	28
Gambar 2.3 Program Bantuan Pembiayaan Perumahan DJPI	32
Gambar 2.4 Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU	33
Gambar 3.1 Implementasi Core <i>Value</i> ASN BERAKHLAK	37
Gambar 3.2 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI.....	47
Gambar 3.3 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023 Berdasarkan Sumber Dana.	56
Gambar 3.4 Pohon Anggaran Pagu Awal DJPI 2023	57
Gambar 3.5 Pohon Anggaran Pagu Revisi DJPI 2023	58
Gambar 3.6 Kronologis Revisi DIPA DJPI 2023 (BA 033).....	58
Gambar 3.7 Perbandingan Ketersediaan SDM dan Anggaran.....	59
Gambar 4.1 Kegiatan Bantuan dan Pembiayaan Perumahan	81
Gambar 4.2 Pembahasan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan KPBU	112
Gambar 4.3 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan.....	131
Gambar 4.4 Target vs Realisasi SBUM Tahun 2023	136
Gambar 4.5 Target vs Realisasi SBK Tahun 2023	136
Gambar 4.6 Hasil Survei Pemanfaatan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023	139
Gambar 4.7 Penghargaan DJPI Sebagai PPP Promotor of The Year	140
Gambar 4.8 Penghargaan DJPI Sebagai Mitra Strategis REI	141
Gambar 4.9 Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP di DJPI.....	142

Gambar 4.10 Penghargaan Outstanding Affordable Housing Innovation.....	143
Gambar 4.11 Aplikasi Inpassing JF API	144
Gambar 4.12 Surat Keputusan Pengangkatan JF API	145
Gambar 4.13 Pemberian Rekomendasi Kebutuhan JF API Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh DJPI.....	145
Gambar 4.14 Surat Permohonan Rekomendasi Formasi JF API dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.....	146
Gambar 4.15 Kegiatan Sosialisasi JF API	148
Gambar 4.16 SE Dirjen PI tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang Dimanfaatkan Sekjen Kementerian PUPR	149
Gambar 4.17 Implementasi SIPADU untuk Pengadaan BUP Proyek KPBU Kementerian PUPR	151
Gambar 4.18 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Permen PUPR No. 11 Tahun 2023.....	152
Gambar 4.19 "3 Bold Actions: Terobosan Menutup Funding Gap Infrastruktur.....	154
Gambar 4.20 Penyusunan Rapermen KPBU Kementerian PUPR	155
Gambar 4.21 Kegiatan Penyusunan Kepmen PUPR terkait Batasan Harga Jual Rumah Subsidi Tahun 2023-2024.....	159
Gambar 4.22 Penandatanganan Perjanjian KPBU Jalan Tol Akses Patimban	162
Gambar 4.23 Penandatanganan Perjanjian KPBU Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg	163
Gambar 4.24 Penandatanganan Perjanjian KPBU Jalan Tol JORR Elevated Cikunir – Ulujami	163

DAFTAR SINGKATAN



APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAK	: Berita Acara Kesepakatan
BBA	: Bantuan Biaya Administrasi
BKO	: Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
BLU	: Badan Layanan Umum
BMN	: Barang Milik Negara
BP Tapera	: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
BP2BT	: Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan
BPSDM	: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat PPIJJ	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Direktorat PPIP	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman
Direktorat PPISDA	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air
Direktorat PPP	: Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan
Direktorat PSSPP	: Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan
DJCK	: Direktorat Jenderal Cipta Karya
DJP	: Direktorat Jenderal Perumahan
DJPI	: Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
HREIS	: <i>Housing and Real Estate Information System</i>
IKP	: Indikator Kinerja Program
IKK	: Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan
IKSP	: Indikator Kinerja Sasaran Program
IKSS	: Indikator Kinerja Sasaran Strategis
KAD	: Kebutuhan Akan Diklat

KPBU	: Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
NSPK	: Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria
PAN dan RB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
PJPK	: Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama
PK	: Perjanjian Kinerja
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PPDPP	: Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PPN/Bappenas	: Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Renstra	: Rencana Strategis
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SBK	: Subsidi Bunga Kredit
SBUM	: Subsidi Bantuan Uang Muka
SDM	: Sumber Daya Manusia
Setditjen PI	: Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
SIMPUL	: Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan
SIPADU	: Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha
SIRENG	: Sistem Informasi Registrasi Pengembang
SK	: Sasaran Kegiatan
SKP	: Sasaran Kinerja Pegawai
SMF	: Sarana Multigriya Finansial
SP	: Sasaran Program
SS	: Sasaran Strategis
SS-3	: Sasaran Strategis Ketiga
SS-3	: Sasaran Strategis Kelima
SSB	: Subsidi Selisih Bunga
Tapera	: Tabungan Perumahan Rakyat
TNDE	: Tata Naskah Dinas Elektronik
WPS	: Wilayah Pengembangan Strategis

- Latar Belakang
- Tugas dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis
- Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

**LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) sebagai entitas unit organisasi di Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan SAKIP. Salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan SAKIP adalah Pelaporan Kinerja.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Secara umum, Laporan Kinerja menjelaskan tingkat pencapaian kinerja, informasi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023 bertujuan untuk mengimplementasikan SAKIP secara efisien dan efektif serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dan representasi akuntabilitas kinerja DJPI. Dalam menyusun laporan ini, DJPI telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Inspektorat Jenderal selaku koordinator penyusunan laporan kinerja internal di lingkungan Kementerian PUPR, serta dengan Kementerian PAN dan RB sebagai koordinator laporan kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, diharapkan laporan kinerja DJPI dapat memenuhi standar pelaporan akuntabilitas baik internal Kementerian PUPR maupun nasional, sehingga mampu meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara berkelanjutan dan memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, DJPI merupakan unit organisasi yang menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 – 2024. Selain itu, DJPI juga ditetapkan sebagai Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian PUPR berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Simpul KPBU di Kementerian PUPR. Tugas dan fungsi DJPI adalah sebagai berikut.

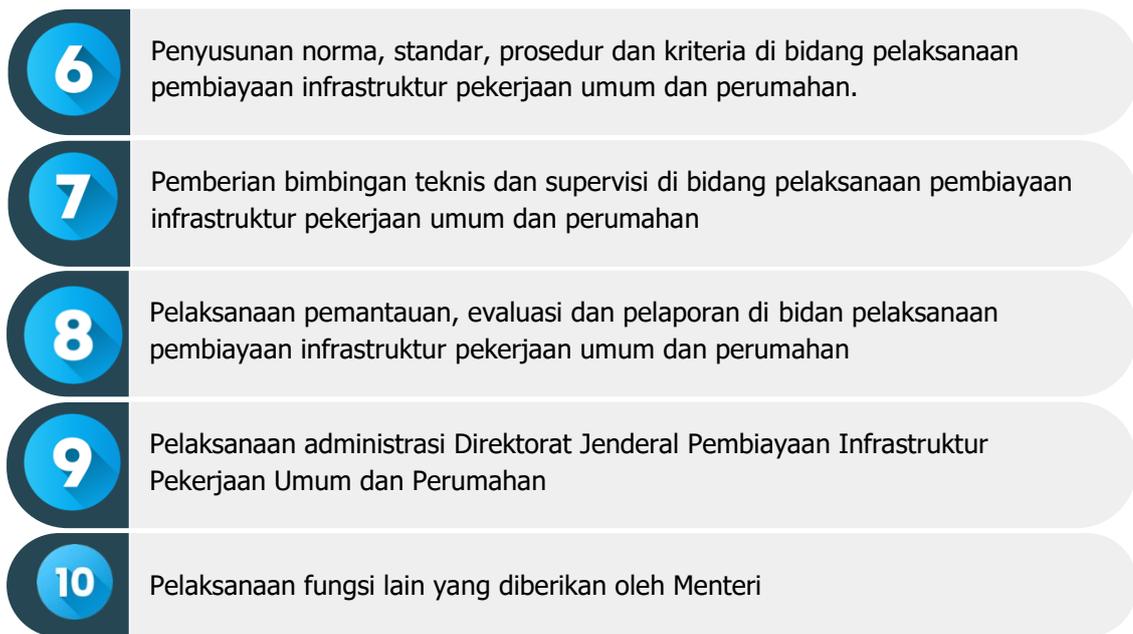
A. Tugas

DJPI mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Fungsi

DJPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1 Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2 Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Koordinasi dan Sinkronasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4 Penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
- 5 Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan



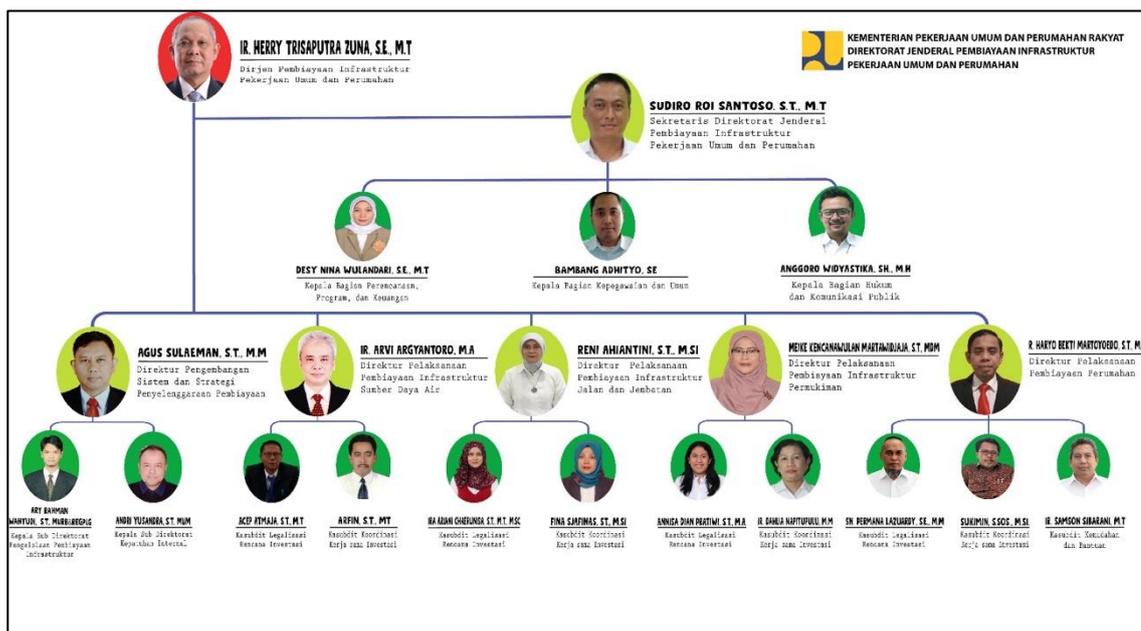
Gambar 1.1 Fungsi Organisasi DJPI

Sumber: Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian PUPR dan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, DJPI terdiri atas enam Unit Kerja Eselon II sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan.
3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air.
4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman.
6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi DJPI

Sumber: Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR

Adapun rincian tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Tugas : Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

- Fungsi :
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
 - Pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, dan pelaksanaan anggaran.
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
 - Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.

- e. Pelaksanaan penatausahaan BMN.
- f. Pengelolaan urusan kepegawaian, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi.
- g. Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan jabatan fungsional.
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.
- i. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, dan pemberian pertimbangan hukum.
- j. Pelaksanaan administrasi perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- k. Pelaksanaan urusan komunikasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan sistem informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung oleh tiga Bagian, terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan, Program, dan Keuangan.
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bagian Hukum dan Komunikasi Publik.

2. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

- Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- d. Koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- g. Pengelolaan data dan informasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- h. Pelaksanaan kepatuhan intern, manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal.

- i. Pembinaan jabatan fungsional di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem dan strategi pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan, serta kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Pengelolaan Pembiayaan Infrastruktur.
- b. Sub Direktorat Kepatuhan Intern.
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

3. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

- Fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
 - d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
 - e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.

- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur sumber daya air.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

4. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

- Fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
 - d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.

- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

5. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.

- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur permukiman.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman didukung oleh dua Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

6. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

- Fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.

- d. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- e. Pelaksanaan percepatan kerja sama pemerintah dan badan usaha di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan.
- f. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur perumahan, kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan.
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan didukung oleh tiga Sub Direktorat dan satu Bagian, yaitu:

- a. Sub Direktorat Legalisasi Rencana Investasi.
- b. Sub Direktorat Koordinasi Kerja Sama Investasi.
- c. Sub Direktorat Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.
- d. Sub Bagian Tata Usaha.

1.4 Isu Strategis

Kementerian PUPR sebagai institusi yang mengemban amanah penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Indonesia, telah melakukan berbagai upaya dan strategi percepatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur.

Selama periode 2015-2019, capaian pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR di masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

1. **Sumber Daya Air**, meliputi pembangunan dan rehabilitas/peningkatan bendung/waduk/embung /bangunan penampung air lainya serta restorasi sungai, revitalisasi danau dan konservasi rawa. Capaian dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 meliputi: bendungan/waduk yang telah terbangun sebanyak 61 buah, terdiri dari 16 bendungan lanjutan periode sebelumnya dan 45 bendungan baru, embung yang telah terbangun sebanyak 1.212 buah, 1.005.402 Ha jaringan irigasi baru telah terbangun, rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 3.021.105 Ha, pembangunan air baku sebanyak 30,70 m³/detik, pembangunan/rehabilitasi pengendali sedimen dan lahar sebanyak 330 buah dan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali daya rusak air sebanyak 1.485 km.
2. **Jalan dan Jembatan**, yaitu capaian 2015-2019 untuk pembangunan jalan dan jembatan baru dengan panjang masing-masing 3.867 km dan 58.346 m. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah membangun jalan bebas hambatan sepanjang 1.500 km.
3. **Perumahan**, meliputi pembangunan rumah susun sebanyak 48.792 unit, rumah khusus 23.960 unit, rumah swadaya sebanyak 735.856 unit dan bantuan PSU Perumahan 119.612 unit. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2015-2019 sebanyak mencapai 1.014.825 unit (FLPP, SSB dan BP2BT) dan SBUM sejumlah 707.212 unit.
4. **Permukiman**, yaitu pembangunan SPAM sebanyak 21.499,5 lt/detik di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 3.173 lt/detik di tahun 2019. Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melakukan penanganan kawasan kumuh sebanyak 23.407 Ha di tahun 2015-2018 dan akan bertambah sebanyak 8.815 Ha di tahun 2019.

Adapun untuk rencana pembangunan infrastruktur di periode 2020-2024, sesuai Visium Kementerian PUPR 2030, memproyeksikan kebutuhan investasi untuk mendanai kebutuhan infrastruktur selama lima tahun adalah sebanyak Rp2.058 Triliun. Sesuai dengan tren ketersediaan APBN, kebutuhan pendanaan tersebut diproyeksikan tidak dapat didanai seluruhnya oleh anggaran Pemerintah dan diperkirakan hanya

mampu untuk mendanai sebesar 30% dari total kebutuhan anggaran infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau sebesar Rp623 Triliun, sehingga terdapat *funding gap* dalam penyediaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan selama lima tahun kedepan.

Berdasarkan Renstra Kementerian PUPR tahun 2020-2024, alokasi pendanaan APBN hanya mampu mendanai sekitar 43% dari total kebutuhan anggaran atau sebesar Rp889 Triliun. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan sebuah kebutuhan mendesak, oleh karena itu Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif untuk memenuhi *gap funding* yang ada.

Salah satu strategi yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemerintah melakukan penguatan dan revitalisasi organisasi di lingkungan Kementerian PUPR melalui Unit Organisasi yang secara khusus menangani pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yaitu DJPI. Amanat untuk penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur dengan sumber dana non konvensional, khususnya Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi DJPI, mengingat besarnya *funding gap* penyediaan infrastruktur yang ada.

Isu strategis lainnya yang dihadapi DJPI, antara lain sebagai berikut: (1) perencanaan penyediaan infrastruktur pekerjaan dan perumahan masih belum mengakomodasi pendanaan di luar skema Non APBN, (2) belum adanya kriteria proyek KPBU untuk semua sektor di Kementerian PUPR, (3) belum efektifnya kelembagaan Simpul KPBU dalam mendukung pelaksanaan KPBU, (4) keterbatasan dokumen KPBU yang memadai sehingga mempengaruhi kualitas proyek KPBU, (5) proses pelaksanaan proyek KPBU membutuhkan waktu yang cukup lama, (6) dukungan kelayakan proyek dan penjaminan Pemerintah untuk proyek KPBU terbatas untuk mendanai seluruh proyek KPBU, (7) proyek KPBU mayoritas diikuti dan dilaksanakan oleh BUMN, (8) masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai PJPK, (9) ketersediaan lahan yang *clear* dan *clean* untuk proyek KPBU, (10) pengembangan skema pembiayaan perumahan, kualitas perumahan MBR masih belum berwawasan lingkungan.

Meskipun dihadapkan pada tantangan penyediaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang sangat besar, DJPI optimis untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat peraturan perundang-undangan. DJPI memiliki aspek strategis/kemampuan dalam menjawab isu strategis yang dihadapi dengan terbukanya peluang untuk melakukan reformasi kebijakan penyelenggaraan KPBU dalam bidang PUPR serta pengembangan skema pembiayaan infrastruktur yang kreatif dan inovatif.

Beberapa potensi di lingkungan DJPI meliputi pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta pembiayaan perumahan. Potensi di bidang pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

1. DJPI ditugaskan sebagai Simpul KPBU sesuai Kepmen PUPR Nomor 641/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha di Kementerian PUPR.
2. Target penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan cukup tinggi, sedangkan ketersediaan APBN terbatas. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif pembiayaan proyek melalui pendanaan non APBN.
3. KPBU pada proyek Non Jalan Tol masih banyak yang belum terlaksana sehingga potensinya masih sangat besar.
4. Tersedianya peraturan terbaru terkait tata kelola KPBU yang mempunyai tujuan mempercepat dan penyederhanaan proses KPBU.
5. Tingginya komitmen Pemerintah untuk menggunakan pendanaan non APBN.
6. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan DJPI yang memahami dan mempunyai pengalaman pada tahap penyiapan dan transaksi KPBU.
7. Tersedianya beragam aplikasi yang memudahkan pelaksanaan KPBU di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Adapun potensi di bidang pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan APBN dalam menangani tingginya kebutuhan rumah, menjadi potensi pengembangan berbagai skema pembiayaan.
2. Kelembagaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang semakin menguat.
3. Potensi penambahan rumah tangga baru sebesar 720.000-800.000 rumah tangga belum sebanding dengan pasokan rumah bersubsidi sebesar 200.000 Unit per tahun.
4. Komitmen Pemerintah untuk memperluas akses terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui perluasan skema, sumber pendanaan dan pengembangan regulasi.
5. Target *major project* pembangunan rumah susun di perkotaan sebanyak 1.000.000 Unit selama 2020-2024.
6. Terdapat perluasan tugas PT SMF (Persero) dalam ekosistem pembiayaan perumahan, sehingga potensinya perlu terus dioptimalkan.
7. Terdapat aplikasi pendataan perumahan (HREIS) yang mulai digunakan oleh beberapa pihak untuk sumber analisa data.

Terhadap potensi-potensi di atas, DJPI telah menyusun Rancangan Permen PUPR (Rapermen) terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan mencabut Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang bertujuan untuk melakukan optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, serta pembagian wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU dan sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui sumber pendanaan non-APBN. Selain itu, DJPI akan melakukan reformasi sektor KPBU bidang PUPR yaitu:

Sektor Sumber Daya Air melalui KPBU yang mendukung Energi Baru Terbarukan, *Global Water and Resilience Fund*, *Endowment Fund*, dan *Hybrid Annuity Model*.

Sektor Jalan dan Jembatan melalui implementasi *Land Value Capture, Estafet Financing, Hybrid Annuity Model, Minimum Revenue Guarantee, dan VGFinancing*. **Sektor Permukiman** melalui implementasi *Source-to-tap, New Bussines Model*, adanya standarisasi tarif air minum, dan pengembangan konsep *Global Water Fund*. **Sektor Perumahan** melalui ekosistem pembiayaan perumahan, *Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP)*, Modifikasi FLPP, KPBU Perumahan, serta pembiayaan perumahan yang inklusif meliputi *Staircasing Shared Ownership (SSO)* untuk kategori *Urban Housing* dan *Housing Micro Finance (HMF)& Incremental Housing* serta *Rent-to-Own (RTO)* untuk *Rural and Non-fixed income*.

1.5 Sistematika Laporan

Laporan kinerja ini disusun secara sistematis dan terstruktur yang mengacu pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian PUPR, dan memperhatikan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Buku Panduan Penulisan Laporan Kinerja Kementerian PUPR sebagaimana telah diedarkan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Pada laporan kinerja DJPI tahun 2023 diuraikan penjelasan dari masing-masing Bab dan Subbab. Sistematika laporan kinerja DJPI tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, gambaran umum organisasi (tugas, fungsi, dan struktur organisasi), serta isu strategis.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan, sasaran dalam Renstra dan ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra DJPI 2020—2024, PK DJPI 2023, dan target 2023 menurut Renstra.

3. BAB III Kapasitas Organisasi

Pada bab ini diuraikan mengenai pertanggungjawaban seluruh sumber daya yang dimiliki, mencakup SDM, sarana dan prasarana, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada bab ini juga dijelaskan mengenai analisis terhadap sumber daya yang dimiliki.

4. BAB IV Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran DJPI 2023, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja, realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, serta inovasi dan/atau kinerja lain.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

6. Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, antara lain meliputi Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran Kinerja, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja, Daftar Penghargaan, dan Dokumentasi Kegiatan.

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja
- Metode Pengukuran
- Target Kinerja
Berdasarkan Renstra

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

**LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) DJPI tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun untuk periode lima tahun kedepan. Renstra ini berisikan tujuan, sasaran program, arah kebijakan, strategi, target kinerja, program dan kegiatan yang disinergikan dengan tugas dan fungsi DJPI dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta pencapaian sasaran strategis Kementerian PUPR yang selaras dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

2.1.1 Visi

Visi Kementerian PUPR sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 adalah sebagai berikut.

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Gambar 2.1 Visi Kementerian PUPR

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian PUPR tahun 2020-2024, maka Kementerian PUPR menetapkan Misi Kementerian yang merupakan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR tahun 2023.

Adapun misi Kementerian PUPR tahun 2023 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi

Merujuk pada RPJMN tahun 2020-2024, arah utama pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Hal tersebut dapat tercapai melalui percepatan pembangunan di berbagai sektor dan bidang dengan mengedepankan struktur perekonomian yang berlandaskan pada keunggulan kompetitif melalui SDM berkualitas dan berdaya saing. Terdapat empat pilar RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan Kementerian PUPR bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah penguatan peran dan kontribusi dari para pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam implementasi sistem dan alternatif pembiayaan pembangunan serta pengelolaan infrastruktur yang efisien, produktif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang ditempuh untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk percepatan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
2. Peningkatan fasilitasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
3. Pengembangan skema dan percepatan proses pelaksanaan pembiayaan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Kebijakan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan teknis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
2. Peningkatan keterpaduan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan terhadap pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, dan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
3. Penataan dan peningkatan peran Simpul KPBU dalam percepatan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
4. Peningkatan kontribusi pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan dalam rangka mendukung pencapaian Visium 2020-2024.
5. Peningkatan dan percepatan pelaksanaan proses pengadaan KPBU melalui *three bold actions*.
6. Pengembangan skema pembiayaan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel.

7. Peningkatan penerbitan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan, baik untuk pemilikan rumah tapak dan rumah susun serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
8. Peningkatan peran perbankan yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan.
9. Peningkatan peran lembaga pembiayaan sekunder, baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi, dan pemberian pinjaman (*refinancing*).
10. Percepatan operasionalisasi BP Tapera.
11. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam pembiayaan perumahan, melalui sosialisasi, fasilitasi dan advokasi.

Permasalahan yang dihadapi meliputi:

1. Proses Revisi atas Peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR.
2. Peningkatan koordinasi antara simpul KPBU, Unit Organisasi di Kementerian PUPR dengan Kantor Bersama KPBU.
3. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024.
4. Pengembangan skema pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan melalui *bundling* infrastruktur.
6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian PUPR yang berfungsi sebagai *bridging finance* KPBU bidang PUPR dan *vehicle* dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPI.
7. Relaksasi ketentuan pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) untuk proyek *unsolicited*.

8. Percepatan dan penyederhanaan proses pengajuan proyek *unsolicited* dari badan usaha pemrakarsa.
9. Percepatan tahap penyiapan dan transaksi proyek KPBU melalui *three bold actions*.
10. *Refocusing* kegiatan penyiapan proyek KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan.
11. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung KPBU dalam meningkatkan daya ungkit dan *scale up* pembiayaan infrastruktur.
12. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah umum.
13. Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan skema pembiayaan perumahan untuk rumah umum dan rumah swadaya dari sisi *demand* dan *supply*.
14. Mengembangkan pemanfaatan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan.
15. Peningkatan peran Badan Usaha dalam penyediaan perumahan.
16. Mempercepat penyiapan infrastruktur operasionalisasi BP TAPERA.
17. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Perumahan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.
18. Mendorong kerjasama dan investasi Badan Usaha untuk mendukung *major project* perumahan publik.

Sasaran strategis pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya penyusunan Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria (NSPK) di bidang pelaksanaan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
2. Terlaksananya fasilitasi perencanaan, penyiapan dan transaksi proyek KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.

3. Terlaksananya pendampingan dalam pemenuhan pembiayaan proyek KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.
4. Terwujudnya peran dan fungsi DJPI sebagai simpul KPBU Kementerian PUPR.
5. Tersusunnya skema kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan baik dalam rangka pemilikan rumah umum maupun pembangunan dan peningkatan kualitas rumah swadaya yang lebih efektif dan efisien.
6. Terlaksananya fasilitasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT. SMF (Persero), dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan.
7. Terlaksananya program bantuan/subsidi di bidang pembiayaan perumahan sebanyak 968.654 Unit.
8. Terlaksananya fasilitasi pembiayaan perumahan dari Lembaga Keuangan sebanyak 550.000 Unit.

2.1.4 Program dan Kegiatan Pembangunan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang terbagi menjadi:

1. **Program Teknis** yaitu program-program Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Program teknis meliputi: (1) program ketahanan sumber daya air, (2) program infrastruktur konektivitas, dan (3) program perumahan dan kawasan permukiman. Dalam mendukung hal tersebut, DJPI mendukung program perumahan dan kawasan permukiman.
2. **Program Generik** yaitu program-program Kementerian/ Unit Organisasi/ Unit Kerja yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur atau administrasi pemerintahan. Program generik meliputi: (1) program pendidikan dan pelatihan vokasi, serta (2) program dukungan manajemen. Dalam mendukung hal tersebut, DJPI mendukung program dukungan manajemen.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai dua program utama yang menjadi tanggung jawab DJPI tahun 2020-2024.

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Program ini merupakan bagian dari sasaran strategis ketiga (SS-3), yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau dengan indikator kinerja salah satunya berupa Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layak Huni. Capaian Indikator kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut diperoleh dari kontribusi kinerja Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) sebesar 50%, Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) sebesar 25% dan DJPI sebesar 25%.

Apabila dilihat secara detail program ini memiliki: Sasaran program yaitu Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman, dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) mencakup Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Sasaran kegiatannya yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan. Sasaran kegiatan tersebut diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan (2) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh PPDPP. Namun, setelah pembubaran PPDPP berdasarkan Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan tanggal 26 Agustus 2022, maka terdapat perubahan indikator kinerja untuk mengukur sasaran kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan yang semula dua indikator kinerja menjadi satu indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100%, yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan. Perubahan tersebut telah menyesuaikan alokasi anggaran di DIPA dan telah dituangkan dalam PK Direktorat PPP Tahun 2023.

Dalam rangka mencapai target program dan mendukung sasaran strategis guna mencapai visium Kementerian PUPR TA. 2020-2024, tentu tidak terlepas dengan berbagai pendekatan, diantaranya mengintegrasikan perspektif *gender* dalam berbagai program bantuan pembiayaan perumahan yang dilakukan oleh DJPI. Pengarusutamaan *gender* diartikan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan *gender* menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang memperhatikan kualitas hidup, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan (orang lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok rentan lainnya) yang diperoleh dari indikator kesetaraan akses, kontrol, partisipasi dalam pembangunan dalam memperoleh manfaat hasil-hasil pembangunan.

Salah satu langkah konkret adalah dengan memberikan kuota khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga dan perempuan berpenghasilan rendah untuk mengakses KPR subsidi dan bantuan uang muka perumahan. Selain itu, skema khusus dengan persyaratan ringan juga perlu dirancang agar dapat menjangkau lebih banyak perempuan yang membutuhkan. Dengan meningkatkan akses terhadap hunian yang terjangkau dan layak bagi perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat juga akan semakin meningkat. Kesetaraan dan keadilan *gender* dalam bidang perumahan merupakan kunci penting bagi pembangunan berkelanjutan dan inklusif.

2. **Program Dukungan Manajemen**

Program ini merupakan bagian dari Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan indikator kinerja salah satunya berupa Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sasaran program ini yaitu Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya, dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR.
- b. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif.

Sasaran kegiatan terhadap program di atas adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (diampu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan atau Setditjen PI).
2. Meningkatnya Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (diampu oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan atau PSSPP).
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (diampu oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPISDA), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (PPIJJ), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (PPIP), Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP)).

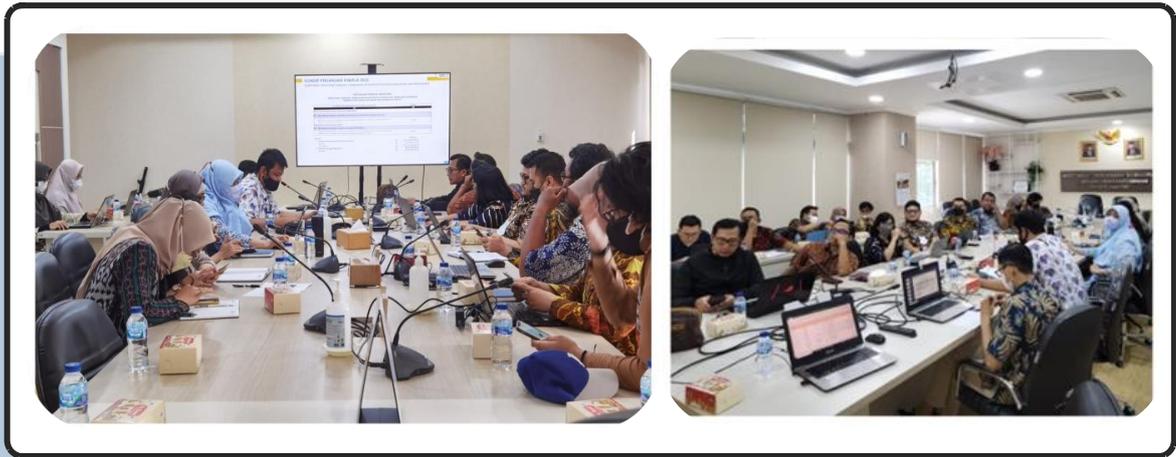
2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) DJPI tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA) dengan indikator kinerja mengacu pada Renstra. Selama tahun 2023, DJPI telah menyusun tiga dokumen Perjanjian Kinerja (PK) antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari ketiga dokumen PK tersebut, dua diantaranya merupakan dokumen revisi PK. Penyusunan ketiga dokumen PK tersebut dilatarbelakangi adanya perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal di Kementerian PUPR yang berdampak pada target kinerja DJPI. Ikhtisar mengenai PK awal, PK revisi, serta kronologi proses perubahan PK akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

PK awal antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandatangani pada bulan Januari 2023. Penetapan PK awal telah mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dan selaras dengan Renstra DJPI 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas pada laporan kinerja DJPI tahun 2022, DJPI berhasil mencapai target IKSS yaitu Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian sebesar 107,57%.

Selain itu, DJPI juga berhasil mencapai target IKSP yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif dengan capaian sebesar 102,37%. Namun, untuk IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan belum mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 95,06%. Rincian PK Awal DJPI tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.



Gambar 2.2 Rapat Pembahasan Konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tabel 2.1 PK Awal DJPI Tahun 2023

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
1	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00%
Program Dukungan Manajemen		
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%
2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	79,26%

2.2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Akhir

PK akhir antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditandatangani pada bulan Desember 2023. Pada PK tersebut, terdapat perubahan target kinerja pada SP-2 yakni Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, semula 79,26% menjadi 87,81%. Revisi target ini menyesuaikan target PK revisi Sekretariat Jenderal. Rincian PK Akhir DJPI tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 PK Akhir DJPI Tahun 2023

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	
1	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00%
Program Dukungan Manajemen		
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00%
2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	87,81%

2.2.3 Kronologi Perubahan PK

Terhitung dari bulan Januari hingga Desember 2023, PK DJPI mengalami dua kali perubahan sehingga terdapat tiga dokumen PK yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. PK Awal ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2023, dengan total anggaran sebesar Rp4.518.439.391.000. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki anggaran sebesar Rp4.381.752.033.000,00 dengan target IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 100%. Pada Program Dukungan Manajemen memiliki anggaran sebesar Rp136.687.358.000 dengan target IKSP satu yaitu Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 100% dan IKSP dua yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 79,26%.

2. PK Revisi Pertama ditetapkan pada tanggal 29 September 2023, dengan total anggaran sebesar Rp4.549.555.796.000. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program Perumahan dan Permukiman sebesar Rp4.381.752.033.000, sedangkan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen alokasi anggaran sebesar Rp 167.803.763.000. Revisi ini dilakukan karena: (1) realokasi anggaran K/L yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp6.000.000.000, (2) perubahan anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, (3) revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA, dan (4) perubahan target IKSP dua pada Program Dukungan Manajemen yaitu Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya semula sebesar 79,26% menjadi 87,81% mengacu pada Revisi PK Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebagai koordinator dari kinerja IKSS Tingkat Kualitas tata kelola Kementerian PUPR.
3. PK Revisi Kedua ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 dengan total anggaran sebesar Rp4.595.712.037.000. Dari total anggaran tersebut untuk mendukung Program Perumahan dan Permukiman sebesar Rp 4.437.724.033.000, sedangkan untuk mendukung Program Dukungan Manajemen alokasi anggaran sebesar Rp157.988.004.000. Revisi ini dilakukan karena: (1) Pergeseran Belanja Pegawai Operasional, (2) pergeseran pagu dari Direktorat PPISDA, (3) pemenuhan kekurangan belanja operasional Direktorat PPIP, dan (4) *drop loan* sebesar Rp9.815.759.000 dan (5) revisi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar Rp55.972.000.000.

Tabel 2.3 Kronologis Perubahan Target PK DJPI Tahun 2023

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target PK (%)		
		Awal	Rev I	Rev II
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
1	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	100,00	100,00
Program Dukungan Manajemen				
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
1	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	79,26	87,81%	87,81%

2.3 Metode Pengukuran

DJPI mendukung pencapaian kinerja dua sasaran program, yaitu (1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan (2) Program Dukungan Manajemen. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor PR 0204-kw/03 hal Penyampaian Hasil Kuesioner dan Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja 2023, dijelaskan bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Revisi Renstra Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, pengukuran capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis) dalam Laporan Kinerja tahun 2023 tetap mengacu pada Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

2.3.1 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapatkan subsidi perumahan dari DJPI meliputi program FLPP, SMF, dan Tapera dengan target.



Gambar 2.3 Program Bantuan Pembiayaan Perumahan DJPI

2.3.2 Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

A. IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

IKSS ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan pembobotan (%) sebagai berikut.

1. Indikator 1 (30%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibandingkan dengan target. Responden pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR.

2. Indikator 2 (70%)

Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan dari kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.



Gambar 2.4 Penandatanganan Perjanjian Proyek KPBU

B. IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

IKSP ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan pembobotan (%) sebagai berikut.

1. Indikator 1 (30%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Responden pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR.

2. Indikator 2 (70%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan dari kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.

C. IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Capaian IKSP ini dihitung melalui kinerja IKK Setditjen PI dikali dengan target IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

2.4 Target Kinerja DJPI Tahun 2023 Berdasarkan Renstra

Penetapan target kinerja DJPI tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Renstra tahun 2020-2024. Adapun target kinerja tahunan DJPI dijabarkan secara rinci dalam dokumen PK. Capaian kinerja DJPI tahun 2023 akan dievaluasi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen PK tersebut.

2.4.1 Target Kinerja Berdasarkan Renstra

Target kinerja DJPI tahun 2023 berdasarkan Renstra 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Target Kinerja DJPI Berdasarkan Renstra

Sasaran Program/Indikator Sasaran Program		Target Kinerja (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman					
IKSP	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100	100	100	100	100
Program Dukungan Manajemen						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSS	Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100	100	100	100	100
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKSP	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100	100	100	100	100
IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	63,35	71,54	87,81*	84,12

Keterangan: *) Penyesuaian target dengan Revisi Akhir PK DJPI, target awal Renstra 79,26%

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

Pada Tabel 2.4, target kinerja DJPI tahun 2023 pada IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan, IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif, dan IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap dikerjasamakan dan didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif, telah sesuai dengan target Renstra DJPI. Namun, target untuk IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan target Sekretariat Jenderal sebagai pengampu sasaran program ini yang semula 79,26% menjad 87,81% dan dituangkan pada Revisi Akhir PK DJPI Tahun 2023.

2.4.2 Target Kinerja Eselon II DJPI

Pencapaian target kinerja DJPI tahun 2023 yang tercantum pada Tabel 2.4 didukung oleh realisasi kinerja seluruh Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI. Berdasarkan Renstra DJPI 2020-2024, target pencapaian indikator kinerja kegiatan (IKK) masing-masing Unit Eselon II adalah sebagai berikut.

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Target IKK Setditjen PI dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00
6	Tingkat Penyelenggaraan Komunikasi Publik yang Modern, Terpadu dan Berorientasi Publik	10,00

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

B. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Target IKK Direktorat PSSPP dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.6 Target Kinerja Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100,00

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

C. **Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air**

Target IKK Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.7 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

D. **Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

Target IKK Direktorat PPIJJ dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.8 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25,00

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

E. **Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman**

Target IKK Direktorat PPIP dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.9 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024

F. **Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan**

Target IKK Direktorat PPP dapat dilihat pada Tabel 2.11 yang terdiri menjadi 2 lokus yaitu terkait KPBU dan pembiayaan perumahan. Berkaitan dengan pembiayaan perumahan, dengan memperhatikan telah bubarnya PPDPP sebagaimana ditetapkan pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada tanggal 26 Agustus 2022, maka terdapat perbedaan indikator

kinerja. Hal ini dapat dilihat pada Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan dalam Renstra DJPI 2020-2024 diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan (2) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh PPDPP. Memperhatikan bubarnya PPDPP, maka terdapat perubahan indikator kinerja yang semula dua indikator kinerja sebagaimana disebutkan di atas menjadi satu indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100% (dilaksanakan penuh oleh Direktorat PPP). Perubahan tersebut telah menyesuaikan alokasi anggaran di DIPA dan telah dituangkan dalam PK Direktorat PPP Tahun 2023.

Tabel 2.10 Target Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00

Sumber: Renstra DJPI 2020-2024 dengan penyesuaian karena bubarnya PPDPP

- SDM
- Sarana dan Prasarana
- DIPA
- Analisis SDM dan Anggaran

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

**LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN**

BAB III KAPASITAS ORGANISASI

3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting dan utama dalam proses pencapaian kinerja organisasi. Peran strategis SDM menentukan arah tata kelola instansi pemerintahan yang baik dan berkualitas. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 896/KPTS/M/2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2020-2024. Pelaksanaan internalisasi *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAkhlaq di lingkungan Kementerian PUPR bertujuan untuk meningkatkan peran SDM yang unggul dan mampu menjangkau pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam kerangka organisasi, terdapat keterkaitan antara kinerja individu dengan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pencapaian target kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan sasaran program dan kegiatan, tetapi juga dihasilkan dari peran serta kontribusi kinerja individu melalui pencapaian sasaran kinerja pegawai (SKP).



Gambar 3.1 Implementasi Core Value ASN BERAKHLAK

Pengelolaan kinerja pegawai di DJPI pada tahun 2023 mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN. Untuk mendukung hal tersebut dan mewujudkan pegawai ASN yang berintegritas, berkinerja tinggi dan profesional, DJPI secara rutin menyelenggarakan *workshop* atau internalisasi, pelatihan dan evaluasi pengembangan kompetensi bagi pegawainya. Dengan demikian, pengelolaan kinerja individu dan organisasi di DJPI dapat berjalan sinergis untuk mendorong peningkatan kinerja DJPI secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Pegawai ASN.

Rekapitulasi SDM dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, meliputi: status, golongan, jabatan, pendidikan dan usia. Pengelompokan berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Kementerian PUPR. Berikut merupakan analisis SDM di DJPI tahun 2023.

3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

Jumlah pegawai di DJPI berdasarkan status sebanyak 423 orang, terdiri dari 242 ASN (57,21%) dan 181 non-ASN (42,79%). Terdapat selisih sebanyak 61 orang, yang menunjukkan bahwa kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih cukup besar. Oleh karena itu, untuk dapat mencapai target kinerja, DJPI telah mengusulkan penambahan formasi ASN kepada Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana (BKO), Kementerian PUPR. Penambahan ASN ini penting untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DJPI secara optimal. Selain itu, DJPI juga telah menyusun program pengembangan kompetensi bagi ASN yang ada saat ini, sehingga kapasitas dan kinerja ASN dapat terus ditingkatkan.

Tabel 3.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status

No	Unit Kerja	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		P3K		Honorar		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan		1							1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	22	32		2	10	41	8	10	125

No	Unit Kerja	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		P3K		Honorer		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	11	17	3	2	2	5	9	8	57
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	11	13	1	5	2	6	5	3	46
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	18	14	1	8	2	4	9	1	57
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	12	14	3	2	2	6	2	12	53
7	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	18	22	5	5	1	7	6	20	84
Total		92	113	13	24	19	69	39	54	423

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.1.1 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

PNS DJPI 2023 sebanyak 205 orang didominasi oleh pegawai golongan III sejumlah 157 orang (76,58%). Sementara itu, pegawai golongan II dan IV secara berurutan berjumlah 8 orang (3,90%) dan 40 orang (19,51%). Dominasi PNS golongan III ini mengindikasikan mayoritas PNS DJPI masih berada pada level penata dalam jenjang karir kepegawaian. Oleh karena itu, DJPI berupaya meningkatkan jumlah PNS dengan golongan yang lebih tinggi, yaitu golongan IV melalui promosi jabatan dan pengembangan karir berkelanjutan. Peningkatan jumlah PNS golongan IV penting dilakukan agar DJPI memiliki pegawai dengan kemampuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

Tabel 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan								
		I		II		III		IV		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan			2	4	15	22	5		6
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan					10	15	1		2
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air				1	11	8			4
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan					11	13	7		1
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman					9	14	3		
7	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan				1	15	14	3		7
Total				2	6	71	86	19		21

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.1.2 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan kelompok jabatannya, jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 188 orang (77,68%). Sementara itu, jumlah Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 28 orang (11,57%), sedangkan 10,75% merupakan gabungan dari jumlah pegawai dengan jenis jabatan Eselon I, II, III dan IV.

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jenis Jabatan	ASN				Jumlah
		PNS		P3K		
		P	L	P	L	
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan					
	Eselon I		1			1
	Eselon II		1			1
	Eselon III	1	2			3
	Eselon IV					0
	JFU	4	7			11
	JFT	17	22		2	41
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan					
	Eselon II		1			1
	Eselon III	1	1			2
	Eselon IV		1			1
	JFU	3	1			4
	JFT	8	12	3	2	25
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air					
	Eselon II		1			1
	Eselon III		2			2
	Eselon IV	1				1
	JFU		1			1
	JFT	10	9	1	5	25
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan					
	Eselon II	1				1
	Eselon III	2				2
	Eselon IV		1			1
	JFU	1				1
	JFT	14	13	1	8	36

No	Jenis Jabatan	ASN				Jumlah
		PNS		P3K		
		P	L	P	L	
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman					
	Eselon II	1				1
	Eselon III	2				2
	Eselon IV		1			1
	JFU					0
	JFT	9	13	3	2	27
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan					
	Eselon II		1			1
	Eselon III		3			3
	Eselon IV	1				1
	JFU	8	3			11
	JFT	9	15	5	5	34
	Total	93	112	13	24	242

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum No. Kp0601-Ps 2/85 tanggal 13 Desember 2023 Hal Data Pegawai DJPI Tahun 2023

3.1.3 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, DJPI senantiasa melakukan pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk pemberian tugas belajar dan beasiswa. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.

Pada tahun 2023, jumlah pegawai DJPI berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 423 orang dengan mayoritas berpendidikan Sarjana (S-1) sebanyak 227 orang (53,66%) dan Master (S-2) sebanyak 124 orang (29,31%). Terdapat satu orang pegawai yang memiliki pendidikan Doktor (S-3) di DJPI, yaitu pada jabatan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Komposisi tingkat pendidikan ini menunjukkan bahwa DJPI terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Berdasarkan tingkat pendidikan menurut usia, pegawai di DJPI yang berusia 30 hingga 50 tahun sebagian besar berpendidikan (S-1) dan (S-2). Sedangkan untuk pegawai berusia di bawah 30 tahun, mayoritas berpendidikan S-1. Adapun pegawai yang berusia di atas 50 tahun juga didominasi oleh tingkat pendidikan S-1 dan S-2, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelompok usia di bawah 50 tahun. Secara rinci, analisis jumlah pegawai DJPI berdasarkan rentang usia dan tingkat pendidikan akan disajikan pada Tabel 3.4 dan 3.5. Komposisi tingkat pendidikan menurut kelompok usia ini sejalan dengan pengembangan karir dan peningkatan kompetensi pegawai secara bertahap. DJPI senantiasa mendorong pegawai untuk terus mengembangkan kompetensi melalui pendidikan guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi.

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		P3K		Honorer		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan									
	S3		1							1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
	S2	10	11				2	1	1	25
	S1	10	14		1	4	9	7	7	52
	DIPLOMA	2	3		1	1	3			10
	SMA		4			4	20			28
	SMP					1	7		2	10
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									
	S2	6	11					1	2	20
	S1	5	6	3	2	1	2	8	6	33
	DIPLOMA									0
	SMA					1	2			3
	SMP									0
	SD						1			1

No	Pendidikan	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		P3K		Honorer		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									
	S2	5	8			1	1			15
	S1	6	4	1	5		3	5	3	27
	DIPLOMA									0
	SMA		1			1	2			4
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									
	S2	11	8					1		20
	S1	7	6	1	8	2	2	7	1	34
	DIPLOMA							1		1
	SMA						2			2
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									
	S2	7	9						1	17
	S1	5	5	3	2	1	3	2	11	32
	DIPLOMA									0
	SMA					1	2			3
	SMP						1			1
7	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									
	S2	7	18						2	27
	S1	11	3	5	5	1	1	6	17	49
	DIPLOMA					1	1		1	3
	SMA		1				3			4
Total		92	113	13	24	20	68	39	54	423

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum No. Kp0601-Ps 2/85 tanggal 13 Desember 2023 Hal Data Pegawai DJPI Tahun 2023

3.1.4 Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan Usia, pegawai di DJPI tahun 2023 mayoritas berusia 30 tahun s.d 50 tahun yang berjumlah 270 orang (63,83%). Sementara itu, pegawai dengan usia di bawah 30 tahun sebanyak 107 orang (25,30%) dan sisanya sebanyak 46 orang (10,87%) merupakan pegawai dengan usia di atas 50 tahun.

Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia	ASN				Non ASN				Jumlah
		PNS		P3K		Honorer		TPI		
		P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
	Di bawah 30 Tahun									0
	30 Tahun s.d 50 Tahun									0
	Di atas 50 Tahun		1							1
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan									
	Di bawah 30 Tahun	4	3				2	5		14
	30 Tahun s.d 50 Tahun	15	19		2	10	35	3	9	93
	Di atas 50 Tahun	3	10				4		1	18
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan									
	Di bawah 30 Tahun	3	1	1	1	2		8	6	22
	30 Tahun s.d 50 Tahun	7	13	2	1		5	1	2	31
	Di atas 50 Tahun	1	3							4
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air									
	Di bawah 30 Tahun	3	2		2			2	2	11
	30 Tahun s.d 50 Tahun	7	7	1	3	2	6	3	1	30
	Di atas 50 Tahun	1	4							5
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan									
	Di bawah 30 Tahun	3	4			1	1	7	1	17
	30 Tahun s.d 50 Tahun	11	9	1	7	1	3	2		34
	Di atas 50 Tahun	4	1		1					6
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman									
	Di bawah 30 Tahun	4		2			1	2	7	16
	30 Tahun s.d 50 Tahun	6	13	1	2	2	5		5	34
	Di atas 50 Tahun	2	1							3
7	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan									
	Di bawah 30 Tahun	4	4	1			1	6	11	27
	30 Tahun s.d 50 Tahun	11	12	4	5	1	6		9	48
	Di atas 50 Tahun	3	6							9
	Total	92	113	13	24	19	69	39	54	423

Sumber: Surat Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum No. Kp0601-Ps 2/85 tanggal 13 Desember 2023 Hal Data Pegawai DJPI Tahun 2023

3.1.5 Pengembangan Pegawai dan Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pengembangan pegawai dan pengelolaan jabatan fungsional merupakan upaya penting untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai di DJPI. Pengembangan pegawai dilakukan melalui berbagai program pelatihan, pendidikan dan pengembangan karier untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial dan kepemimpinan pegawai. Sementara pengelolaan jabatan fungsional bertujuan untuk mengoptimalkan peran para pejabat fungsional sesuai dengan keahlian dan spesialisasinya masing-masing guna menunjang pelaksanaan tugas DJPI secara profesional. Dengan pengembangan SDM yang terarah dan pengelolaan jabatan fungsional yang efektif, diharapkan kualitas pelayanan DJPI kepada masyarakat dapat semakin meningkat dan menunjang pencapaian kinerja DJPI.

A. Pengembangan Pegawai

Dalam rangka pengembangan peningkatan kapasitas pegawai, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan telah menyusun daftar Kebutuhan Akan Diklat (KAD) di lingkungan DJPI. Berdasarkan data tersebut, selanjutnya dilakukan analisa kebutuhan diklat yang bisa diselenggarakan sendiri (*in house*) oleh DJPI bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR. Selain itu, KAD juga digunakan untuk memetakan kebutuhan pengiriman pegawai DJPI untuk mengikuti pelatihan, pendidikan dan diklat yang diselenggarakan oleh instansi di luar DJPI. Adapun jenis diklat yang diselenggarakan maupun diikuti harus sesuai tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan DJPI serta mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari pegawai yang bersangkutan. Strategi pembinaan/pengembangan pegawai di lingkungan DJPI dilakukan melalui dua model pengembangan, yaitu pertama, pengembangan melalui jalur pendidikan akademik profesional yang dilakukan untuk memberikan peningkatan kompetensi pendidikan formal, pada tingkatan Diploma (D3), (S-1), (S-2) dan (S-3), kedua, pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan pegawai yaitu Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis.

Pengembangan pegawai melalui jalur pendidikan formal dapat dilakukan dengan biaya dari DIPA BPSDM Kementerian PUPR, atau biaya lembaga/negara sponsor. Apabila pendidikan formal tersebut dilakukan pada jam kerja, maka pegawai tersebut

memiliki status **tugas belajar**. Sementara itu, jika pegawai menempuh pendidikan formal dengan biaya sendiri dan dilakukan di luar jam kerja, maka pegawai tersebut memiliki **status izin belajar (biaya mandiri)**. Selain pengembangan melalui jalur pendidikan profesional, pengembangan pegawai juga dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (diklat). Kedua jenis pengembangan baik melalui pendidikan profesional maupun diklat ini diperuntukkan bagi pegawai terpilih sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, berbagai pelatihan atau kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh pegawai ASN di lingkungan DJPI pada setiap bidang pekerjaan. Rincian mengenai pendidikan dan pelatihan, *workshop*, serta seminar yang dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, disampaikan pada lampiran laporan kinerja.

B. Pengelolaan Jabatan Fungsional

Era baru dalam penataan jabatan fungsional di awal tahun 2023 diterapkan melalui implemmentasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Regulasi ini menggantikan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Revisi tersebut dilakukan sebagai bentuk transformasi SDM, salah satunya dengan menciptakan manajemen jabatan fungsional yang lincah dan professional.

Perubahan ini merupakan bagian dari transformasi reformasi birokrasi tahun 2025 *Dynamic Governance*, yaitu birokrasi semakin efektif, efisien dan bersih dengan ciri *agile* dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia.

Setditjen PI mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Direktorat Jenderal. Oleh karena itu, perlu didukung dengan SDM yang berkualitas dan berkompeten guna menjawab berbagai tantangan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Jabatan Fungsional pada dasarnya diproyeksikan sebagai jalur pengembangan

profesionalisme bagi setiap PNS, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan kata lain, konsepsi Jabatan Fungsional mengandung strategi pembinaan karier dan profesionalisme PNS dari sejak awal kariernya.

Berdasarkan data Jabatan Fungsional yang disusun dari tahun 2020 hingga 2023, per 1 Desember 2023, terdapat 156 jabatan fungsional di DJPI. Daftar Pejabat Fungsional yang mendukung pelaksanaan tugas DJPI dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Daftar Jumlah Pejabat Fungsional di DJPI

No	Unit Kerja	2020	2021	2022	2023	Jumlah
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	26	25	29	40	120
2	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	17	15	26	20	78
3	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	12	12	21	21	66
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	16	17	26	27	86
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	16	17	24	23	80
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	17	20	26	25	88
Total		104	106	152	156	518



Gambar 3.2 Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan DJPI

Tabel 3.7 Daftar Nama Jabatan Fungsional di DJPI

No	Nama Jabatan Fungsional	Rumpun JF	2020	2021	2022	2023
1	Teknik Penyehatan Lingkungan	PUPR	2	2	2	2
2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	PUPR	6	6	6	5
3	Teknik Jalan dan Jembatan	PUPR	1	1	1	2
4	Teknik Pengairan	PUPR	2	2	2	1
5	Pembina Jasa Konstruksi	PUPR	2	2	2	2
6	Penata Kelola Perumahan	PUPR	-	-	-	1
7	Analisis Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan	PUPR	-	-	-	17
8	Analisis Kepegawaian/Analisis SDM Aparatur	Non PUPR	6	6	6	5
9	Arsiparis	Non PUPR	4	4	4	4
10	Analisis Hukum	Non PUPR	-	4	4	4
11	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Non PUPR	2	1	1	1
12	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Non PUPR	4	3	3	4
13	Analisis Anggaran	Non PUPR	4	5	5	5
14	Perencana	Non PUPR	4	4	6	7
15	Pranata Humas	Non PUPR	5	4	4	5
16	Pranata Komputer	Non PUPR	5	6	6	3
17	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Non PUPR	6	3	2	2
18	Statistisi	Non PUPR	1	1	1	-
19	Analisis Kebijakan	Non PUPR	53	54	96	85
20	Peneliti	Non PUPR	1	1	1	-
21	Pranata Keuangan APBN	Non PUPR	-	-	-	1
Jumlah			108	109	152	156

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Jumlah Pejabat Fungsional mengalami peningkatan signifikan, semua pada tahun 2021 sebanyak 109 pejabat menjadi 152 pejabat pada tahun 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan pegawai CPNS tahun 2021 yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional di lingkungan DJPI pada tahun 2022.

3.2 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Kementerian PUPR didukung sarana dan prasarana yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja barang milik negara (BMN). Oleh karena itu, Kementerian PUPR harus mampu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan BMN untuk menunjang fungsi pelayanan Kementerian PUPR kepada masyarakat. Ketersediaan BMN yang memadai dapat mendukung kelancaran tugas Kementerian PUPR, serta memungkinkan fungsi *budgeter* dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara.

Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, DJPI terus berupaya mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas, pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) telah memudahkan komunikasi dan proses pengambilan keputusan di DJPI. Selain itu, penggunaan TNDE juga berdampak pada efisiensi anggaran belanja (ATK) dan pengadaan ruang rapat, karena mampu mengurangi kebutuhan rapat di luar kantor. Saat ini DJPI memiliki delapan ruang rapat yang digunakan secara optimal untuk mendukung kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut, inovasi yang dilakukan di tingkat Kementerian PUPR dan yaitu melalui aplikasi di DJPI TNDE, dan aplikasi Bravo. Di samping itu, DJPI juga mengelola dan mengembangkan beberapa aplikasi penunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain:

1. Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU Bidang PUPR (SIPADU), merupakan aplikasi lelang KPBU.
2. *Dashboard* Sistem Informasi Manajemen Proyek Unggulan KPBU (SIMPUL KPBU), merupakan aplikasi internal yang digunakan oleh Pimpinan untuk *monitoring* status proyek KPBU.

3. *Housing and Real Estate Information System (HREIS)*, merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola data-data perumahan di Indonesia, mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga dan pembiayaan.
4. *Inpassing*, merupakan aplikasi yang membantu proses penyesuaian pegawai ke Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur. Aplikasi ini berfungsi untuk menilai dan *memonitor* pegawai berdasarkan dokumen persyaratan jabatan.
5. Sistem Informasi Registrasi Pengembang (SIRENG), merupakan aplikasi Pengelolaan Data Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan.

Pada tahun 2023, DJPI memiliki 26 unit BMN yang terdiri dari gedung kantor, kendaraan dinas, dan peralatan kantor. Dari jumlah tersebut, sebagian besar BMN berada dalam kondisi baik dan layak untuk mendukung operasional DJPI. Namun, terdapat beberapa BMN yang kondisinya perlu mendapatkan perhatian karena mengalami kerusakan. Dalam rangka menjaga kondisi optimal BMN, DJPI secara berkala melakukan perawatan dan perbaikan BMN yang rusak. Selain itu, penggantian BMN yang sudah tua dan tidak layak pakai dilakukan melalui mekanisme pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan seluruh BMN DJPI dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan maksimal untuk mendukung operasional DJPI dalam memberikan pelayanan prima.

Pada tahun 2023, DJPI melaksanakan beberapa renovasi dan pemeliharaan bangunan gedung dalam upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor. Seluruh pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu dan mengacu pada prinsip efisiensi serta ramah lingkungan. Dengan renovasi dan pemeliharaan tersebut, diharapkan sarana dan prasarana DJPI dapat lebih representatif serta mendukung peningkatan kinerja pegawai. Berikut ini adalah daftar BMN DJPI Per Desember 2023.

Tabel 3.8 Daftar BMN DJPI

No	Kode Barang	Nama BMN	Jumlah	Kondisi
1	3100102001	PC	390	Baik
2	3100204025	<i>Acces Poin</i>	6	Baik
3	310020206	<i>Auto Switch/Data Switch</i>	1	Baik
4	31002021015	<i>Data Pact Panel</i>	6	Baik
5	3100204015	<i>Fire wall</i>	2	Baik
6	3100201012	<i>Hardisk</i>	16	Baik
7	3100204021	Kabel UTP	30	Baik
8	3100203014	<i>Land Card</i>	2	Baik
9	3100102002	Laptop	14	Baik
10	3100204035	Modul untuk Penambahan <i>Core Switch</i>	18	Baik
11	3100203002	Monitor	3	Baik
12	3100204037	<i>Network Attact</i>	1	Baik
13	3100102003	<i>Note Book</i>	136	134 (Baik), 1 (RB), 1 (RR)
14	3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	83	Baik
15	3100203003	<i>Printer</i>	269	267 (Baik), 1 (RB), 1 (RR)
16	3100204027	<i>Rackmount</i>	1	Baik
17	3100204014	<i>Rack Serve</i>	7	Baik
18	3100204006	<i>Repeater and Tranccieter</i>	12	Baik
19	3100204002	<i>Router</i>	9	8 (Baik) dan 1 (RB)
20	3100203004	<i>Scanner</i>	39	36 (Baik) dan 3 (RB)
21	3100204001	<i>Server</i>	11	Baik
22	3100201004	<i>Strorage Modul Disk</i>	2	Baik
23	3100204024	<i>Switch</i>	23	Baik
24	3100102009	Tablet PC	18	Baik
25	3100204023	Wireless Acces Poin	20	Baik
26	3020101003	Alat Angkutan Darat Bermotor	4	RR

Keterangan:

1. RB: Rusak Berat
2. RR: Rusak Ringan

Sumber: Laporan BMN DJPI Tahun 2023

Tabel 3.9 Laporan BMN di Neraca

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	272,149,085
132111	Peralatan dan Mesin	37,948,797,794
134113	Jaringan	80,500,000
135111	Aset Tetap Renovasi	1,658,775,232
135121	Aset Tetap Lainnya	219,004,700
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(30,143,478,935)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(55,384,000)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(199,100,000)
162121	Hak Cipta	2,850,000
162151	Software	1,884,047,000
162171	Hasil Kajian/Penelitian	16,398,314,450
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	909,081,400
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(907,101,400)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(114,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,884,047,000)
J U M L A H		26,184,294,326

Sumber: Laporan BMN DJPI Tahun 2023

Berdasarkan data BMN DJPI, per tanggal 31 Desember 2023, tercatat 15 BMN yang dilaporkan pada akun neraca dengan jumlah sebesar Rp26.184.294.326. Pengelolaan dan pendataan BMN DJPI telah dilakukan dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku. Data BMN dimutakhirkan secara berkala untuk memastikan tidak ada BMN yang terlewat dari pencatatan. Dengan pendataan BMN yang akurat, diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan BMN DJPI dapat dimaksimalkan untuk menunjang kinerja DJPI.

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, DJPI mendapatkan alokasi anggaran dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Terdapat dua akun anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis 2020-2024, yakni BA 033 dan BA 999.07. Berikut merupakan penjelasan mengenai kedua akun anggaran tersebut.

Alokasi DIPA DJPI tahun 2023 merupakan dasar dalam penetapan perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. BA 033 digunakan untuk membiayai dua program, yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Sementara itu, BA 999.07 hanya digunakan untuk membiayai Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rincian mengenai alokasi dan penggunaan BA 033 dan BA 999.07 adalah sebagai berikut.

A. BA. 033

Alokasi awal Pagu Anggaran BA. 033 adalah sebesar Rp165.919.391.000, terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp164.919.391.000 dan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri sebesar Rp1.000.000.000. Berdasarkan kronologis anggaran DJPI tahun 2023, terdapat sembilan kali revisi DIPA BA. 003.

1. Revisi pertama DIPA terbit pada tanggal 28 Desember 2022. Pada revisi ini, terdapat *Automatic Adjustment* oleh Kementerian Keuangan senilai Rp6.000.000.000.
2. Revisi kedua DIPA terbit pada tanggal 20 Februari 2023. Pada revisi ini, terdapat pergeseran anggaran antar KRO.
3. Revisi ketiga DIPA terbit pada tanggal 6 April 2023. Pada revisi ini, terdapat perubahan anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri sehingga total pagu anggaran menjadi Rp203.035.796.000.
4. Revisi keempat DIPA terbit pada tanggal 3 Juli 2023, Pada revisi ini, terdapat perubahan catatan halaman III DIPA.
5. Revisi kelima DIPA terbit pada tanggal 14 Juli 2023. Pada revisi ini, terdapat pergeseran anggaran antar KRO.

6. Revisi keenam DIPA terbit pada tanggal 31 Juli 2023. Pada revisi ini, terdapat realokasi anggaran K/L tahun 2023 yang terblokir (*Automatic Adjustment*) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp6.000.000.000. Oleh karena itu, terdapat penyesuaian DIPA, semula Rp203.035.796.000 menjadi Rp197.035.796.000.
7. Revisi ketujuh DIPA terbit pada tanggal 9 November 2023. Pada revisi ini, terdapat pergeseran belanja pegawai operasional ke selain belanja pegawai operasional, pergeseran pagu dari Direktorat PPISDA dan pemenuhan kekurangan belanja operasional Direktorat PPIP.
8. Revisi kedelapan DIPA terbit pada tanggal 12 Desember 2023. Pada revisi ini, terdapat *updating* POK.
9. Revisi kesembilan DIPA terbit pada tanggal 22 Desember 2023. Pada revisi ini, terdapat *drop loan* dan revisi Bantuan Biaya Administrasi (BBA), sehingga pagu anggaran mengalami perubahan, semula Rp197.035.796.000 menjadi Rp 243.192.037.000.

B. BA. 999.07

Alokasi anggaran BA 999.07 dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan total pagu anggaran sebesar Rp4.352.520.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar Rp895.000.000.000 untuk 220.000 unit.
2. Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) sebesar Rp3.457.520.000.000 untuk 754.004 unit.

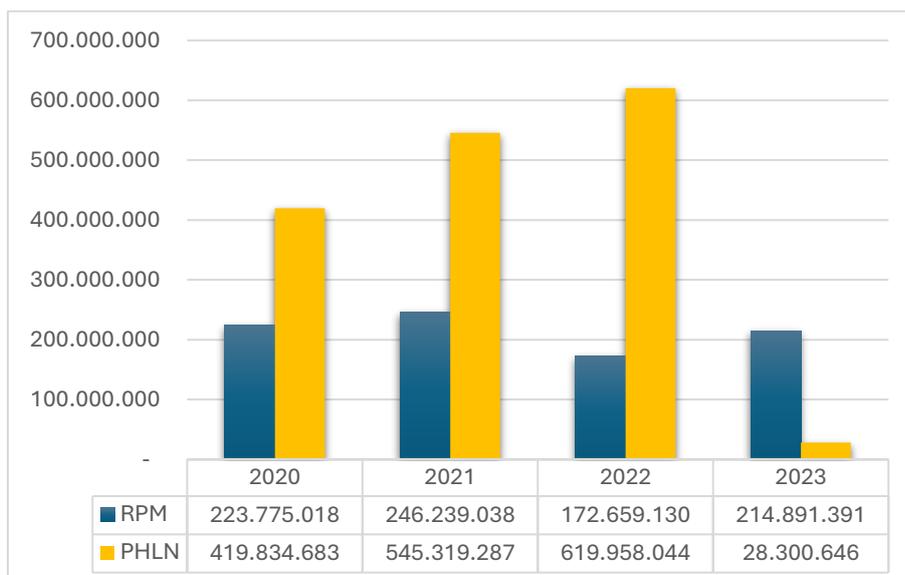
**Tabel 3.10 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023
Berdasarkan Program**

Program	Pagu Anggaran			
	2020	2021	2022	2023
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp15.143.076.305.000	Rp23.762.286.574.000	Rp4.082.440.801.000	Rp4.437.724.033.000
BA 033	Rp421.094.006.000	Rp545.479.725.000	Rp564.732.866.000	Rp85.204.033.000
BA 999.03	Rp9.000.000.000.000	Rp16.620.000.000.000	0	Rp0
BA 999.07	Rp5.721.982.299.000	Rp6.596.806.849.000	Rp3.517.707.935.000	Rp4.352.520.000.000
Program Dukungan Manajemen	Rp481.315.695.000	Rp246.078.600.000	Rp227.884.308.000	Rp157.988.004.000
BA 033	Rp222.515.695.000	Rp246.078.600.000	Rp227.884.308.000	Rp157.988.004.000
BA 999.99	Rp258.800.000.000	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan data pada Tabel 3.10, alokasi anggaran DJPI tahun 2020-2023 digunakan untuk mendukung dua program, yakni Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen. Pada tahun 2020-2021, BA 999.03 digunakan oleh Satker Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) untuk mengelola dana bergulir Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, pada tahun 2022, berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, BA 999.03 tidak lagi dimanfaatkan. Selain itu, penggunaan BA 999.99 dimanfaatkan untuk pengelolaan transaksi khusus. Dengan demikian, terjadi perubahan dan penyesuaian dalam penggunaan berbagai kode akun anggaran DJPI dari tahun ke tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan anggaran DJPI dalam mendukung program prioritas di bidang perumahan.

Berdasarkan data pada Gambar 3.3, alokasi anggaran DJPI tahun 2020-2023 bersumber dari Rupiah Murni dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri. Pada tahun 2020-2022, alokasi anggaran DJPI mengalami peningkatan yang disebabkan oleh adanya pengelolaan Dana BP2BT. Namun, mulai tahun 2023 alokasi anggaran DJPI kembali menurun drastis karena program BP2BT sudah berakhir pada tahun 2022. Dengan demikian, fluktuasi alokasi anggaran DJPI sangat dipengaruhi oleh dinamika program prioritas pemerintah di sektor perumahan.



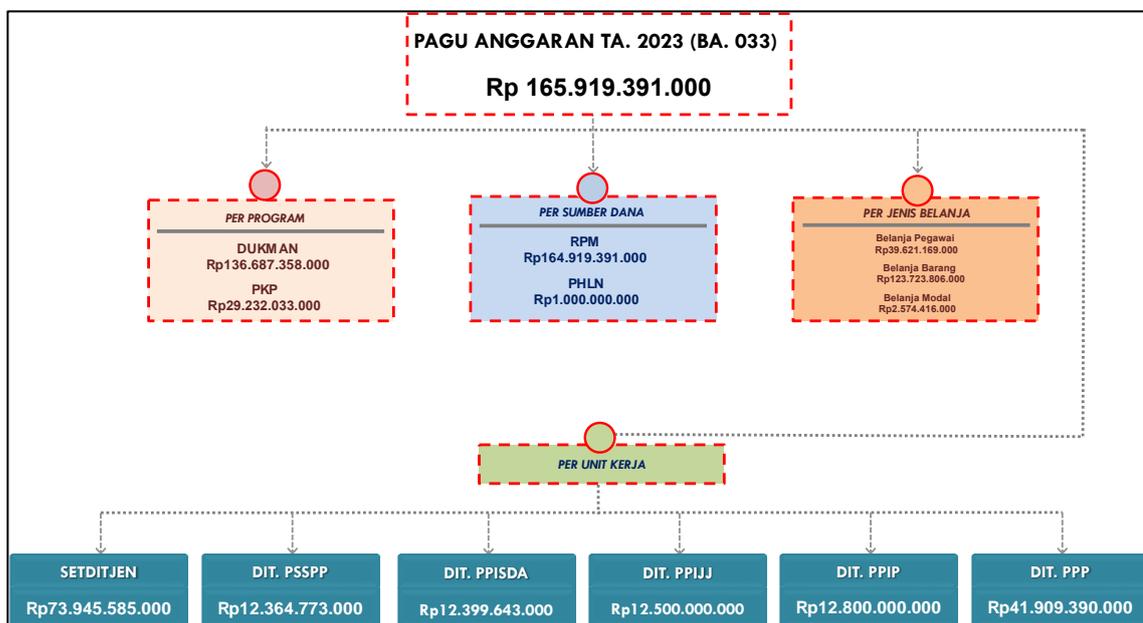
Gambar 3.3 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023 Berdasarkan Sumber Dana
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel 3.11 Alokasi Anggaran DJPI Tahun 2020-2023 Berdasarkan Renstra

Program	Pagu Anggaran			
	2020	2021	2022	2023
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
IKP. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	Rp1.335.572.000.000.000	Rp1.668.152.000.000.000	Rp69.123.000.000.000	Rp56.015.000.000.000
Program Dukungan Manajemen				
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	Rp90.484.000.000.000	Rp221.221.000.000.000	Rp196.472.000.000.000	Rp202.658.000.000.000
SK. Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp118.182.000.000.000	Rp112.207.000.000.000	Rp118.325.000.000.000	Rp123.798.000.000.000

Sumber: Hasil Analisis, 2023

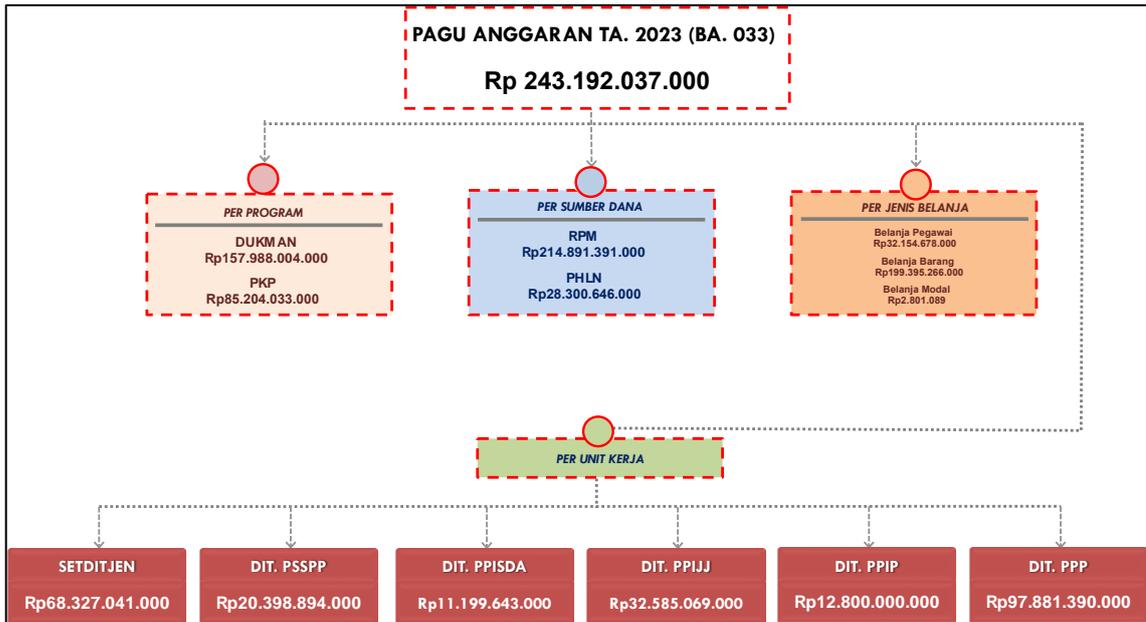
Berdasarkan data pada Tabel 3.10 dan 3.11, dapat dilihat bahwa alokasi anggaran DJPI tahun 2020-2023 dalam Renstra dan DIPA mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini juga mempengaruhi target output kinerja setiap tahunnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh Dokumen Renstra merupakan perencanaan anggaran lima tahunan, sementara DIPA adalah anggaran tahunan. Oleh karena itu, penetapan alokasi anggaran dan target pada DIPA tahun berjalan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk capaian kinerja pada tahun sebelumnya, perkembangan dan revisi pagu anggaran tingkat Kementerian dan skala prioritas kegiatan di masing-masing Unit Organisasi.



Gambar 3.4 Pohon Anggaran Pagu Awal DJPI 2023

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada Gambar 3.2, pagu indikatif anggaran tahun 2023 (BA 033) adalah sebesar Rp165.919.391.000. Anggaran tersebut kemudian di-*breakdown* dan dialokasikan kepada enam unit kerja di lingkungan DJPI.

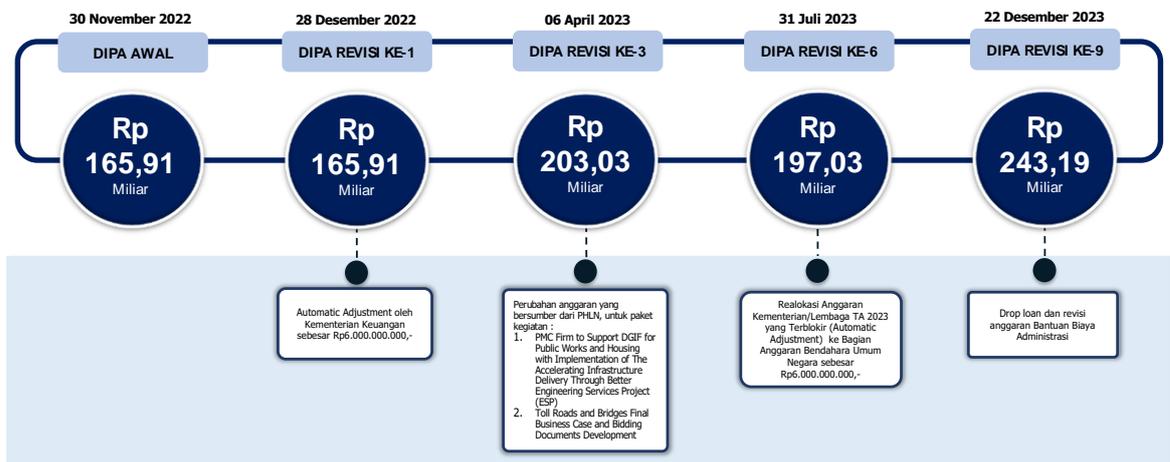


Gambar 3.5 Pohon Anggaran Pagu Revisi DJPI 2023

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pada Gambar 3.5, pagu anggaran revisi tahun 2023 (BA 033) adalah sebesar Rp243.192.037.000. Anggaran tersebut kemudian di-breakdown dan dialokasikan kepada enam unit kerja di lingkungan DJPI.

Kronologis Revisi DIPA DJPI 2023 (BA 033) dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.6 Kronologis Revisi DIPA DJPI 2023 (BA 033)

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Keterangan:

Revisi DIPA ke-2, ke-4, ke-5, ke-7, dan ke-8 terdapat revisi rencana penarikan dana Hal III dan pergeseran antar KRO

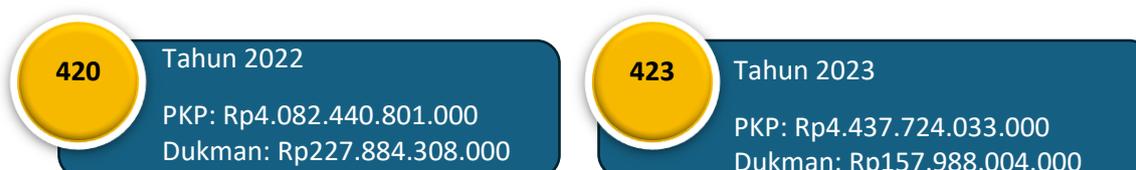
3.4 Analisis Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Pada tahun 2023, jumlah pegawai DJPI adalah sebanyak 423 orang, atau bertambah 3 orang pegawai dibandingkan tahun sebelumnya, yang berjumlah 420 orang pegawai. Peningkatan jumlah pegawai DJPI terdapat pada pegawai yang berstatus sebagai PNS yakni sebesar 11,00%. Sementara itu, jumlah pegawai DJPI dengan status non-PNS mengalami penurunan sebesar 11,60%. Dari sisi anggaran, pada 2023 DJPI mendapat pagu anggaran lebih besar dibanding tahun 2022. Terdapat peningkatan sebesar 8,70% pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp355.283.232.000) dan mengalami penurunan 44,24% (Rp69.896.304.000) pada Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.12 Perbandingan Jumlah Pegawai DJPI 2022-2023

No	Unit Kerja	2022		2023	
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS
1	Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	1		1	
2	Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	57	75	56	69
3	Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	31	30	33	24
4	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	26	17	30	16
5	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	32	21	41	16
6	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	30	23	31	22
7	Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	41	36	50	34
Total		218	202	242	181

Sumber: Hasil Analisis, 2023



Gambar 3.7 Perbandingan Ketersediaan SDM dan Anggaran

Sumber: Hasil Analisis, 2023

- Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
- Capaian Kinerja
- Perbandingan Kinerja
- Realisasi Anggaran
- Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja
- Penghargaan atas Kinerja

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

**LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN**

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR nomor Pw 0204-Ij/1197 tanggal 14 September 2023 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Tahun Anggaran 2022 didapatkan bahwa implementasi atas SAKIP DJPI TA. 2022 dapat dikategorikan **BB (Sangat Baik)**, dengan nilai **79,41%**. Hal ini ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Selain itu, DJPI juga mendapatkan beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti guna meningkatkan implementasi AKIP dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Upaya perbaikan yang telah dilakukan DJPI terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP DJPI TA. 2022

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Melakukan koordinasi terkait <i>crosscutting</i> hubungan kinerja, atas Sasaran Strategis yang pencapaiannya melibatkan Unit Organisasi lain, sehingga didapatkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).	Telah dilakukan koordinasi terkait <i>crosscutting</i> hubungan kinerja atas capaian Sasaran Strategis ketiga Kementerian PUPR (SS-3) yaitu Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau, yang salah satunya diukur melalui Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni dengan Ditjen Perumahan. Koordinasi dilakukan untuk menyepakati capaian kinerja pada SS-3 tersebut dan DJPI telah menyampaikan Data Capaian Output Bidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2023 sebagai dasar perhitungan melalui Nota Dinas Direktur PSSPP nomor PA 0105-Pk/17 tanggal 12 Januari 2024.
		2. Pimpinan DJPI telah terlibat dalam Perencanaan Kinerja, namun belum efektif dimana masih diperlukan adanya keikutsertaan dalam hasil	Telah diselenggarakan rapat pembahasan Laporan Monev Kinerja Bulanan DJPI pada minggu kesatu atau kedua setiap bulan bersama Unit Kerja

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		pemantauan capaian kinerja sesuai Rencana Aksi yang telah disusun, dan diperlukan adanya pemantauan secara berkala serta reuiu atau verifikasi secara berjenjang atas capaian kinerja berdasarkan Rencana Aksi, sehingga Rencana Aksi dapat berjalan secara dinamis.	Eselon II dan melibatkan Pimpinan. Laporan Monev Bulanan DJPI dilakukan reuiu berjenjang oleh para Pimpinan melalui Lembar Kendali.
		3. Melakukan perbaikan pada Rencana Aksi tahun berikutnya yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian target pada Rencana Aksi dan Laporan Monev Bulanan serta menyajikan penjelasan atas adanya perbedaan; b. Menyajikan rencana pemecahan masalah/solusi atas permasalahan pada Rencana Aksi sebagaimana rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi SAKIP periode sebelumnya; c. Memanfaatkan hasil capaian kinerja untuk pemberian promosi atau kenaikan/penurunan insentif terkait dengan <i>reward and punishment</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Target yang dituangkan dalam Rencana Aksi tingkat Unit Organisasi (DJPI) dengan Unit Kerja tingkat Eselon II telah sesuai. b. Tindak lanjut atau alternatif solusi terhadap permasalahan telah dituangkan dalam Laporan Monev Kinerja Bulanan. c. Setditjen PI telah melakukan pembahasan terkait pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> berdasarkan hasil capaian kinerja pada tanggal 25 Agustus 2023 sesuai dengan Surat ND nomor 185/ND/Ps.1/2023 tanggal 30 Agustus 2023. Pemberian <i>reward</i> kepada pegawai teladan/pegawai muda berprestasi/pejabat PPSPM terbaik/bendahara terbaik/ Satya Lancana Wira Karya/ASN Berprestasi yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR yang dinilai dari hasil capaian kinerja hingga saat ini berupa tambahan tunjangan kinerja.
		4. Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan terkait substansi dokumen perencanaan kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan.	Telah dilakukan pengadministrasian terkait bukti dukung terkait rapat pembahasan dokumen perencanaan kinerja dengan melibatkan pimpinan berupa Nota Dinas dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
2	Pengukuran Kinerja	1. Menyajikan setiap capaian indikator kegiatan untuk persentase fisik yang relevan dengan pencapaian output masing-masing kegiatan dalam Laporan Monev Bulanan maupun e-Monitoring, sehingga mewakili kinerja utama dan kondisi yang ingin diwujudkan.	Telah dilakukan perhitungan capaian kinerja fisik bulanan menggunakan <i>cascading</i> kinerja, dan hasilnya dituangkan pada Laporan Monev Bulanan maupun Laporan Kinerja tingkat Unit Kerja dan Unit Organisasi.
		2. Memperhitungkan Penilaian Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/ pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dalam aplikasi perhitungan tunjangan kinerja.	Kementerian PUPR telah melakukan konsolidasi data kinerja organisasi dengan data capaian kinerja pegawai sesuai dengan Rapat Konsolidasi Data Pelaksanaan RKP TA. 2023 dan <i>Cascading</i> Kinerja Pegawai dengan Organisasi melalui Integrasi e-Sakip dan e-Kinerja pada tanggal 5 – 7 Oktober 2023 untuk SKP terintegrasi dimana sebagai bentuk <i>cascading</i> dari Sasaran Strategis tertinggi hingga output tingkat tinggi (pelaksana)

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			<p>terbagi habis.</p> <p>Selain itu, telah dilakukan rapat pembahasan terkait Draft Final Pedoman (SE Menteri) Pengelolaan Kinerja Pegawai pada 20 Desember 2023 dimana hasil dari pembahasan ini berupa perhitungan tunjangan kinerja yang terdiri dari 50% predikat kinerja dan 50% dari absensi. Hasil kinerja pegawai juga digunakan untuk penjenjangan karir (kelompok rencana suksesi dan pemberian insentif).</p> <p>DJPI melalui Setditjen PI telah menindaklanjuti dengan mempersiapkan perhitungan pemberian tunjangan kinerja pada aplikasi penggajian pegawai. Perhitungan tunjangan kinerja pegawai berdasarkan predikat bukan menggunakan nilai angka dan disesuaikan setiap triwulan sesuai dengan capaian kinerja.</p>
		3. Menyajikan hasil perbaikan dari Rencana Tindak lanjut bulan sebelumnya dalam Laporan Monev Bulanan sehingga dapat diketahui tingkat keefektifan pelaksanaan rencana tindak lanjut bulan sebelumnya	Telah diakomodir dalam Laporan Monev Bulanan (tercantum pada Bab 3.3 Laporan Monev Bulanan DJPI dan Bab 3.3 pada Laporan Monev Dit. PSSPP).
		4. Melakukan pemantauan secara berkala serta verifikasi secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas pengukuran kinerja dalam Laporan Monev Bulanan.	Telah dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pengukuran kinerja dalam Laporan Monev Bulanan melalui rapat pembahasan dengan melibatkan Unit Kerja Eselon II dan Pimpinan, serta telah dilakukan verifikasi berjenjang terhadap Laporan tersebut melalui lembar kendali guna memastikan bahwa Laporan yang disusun telah direviu dan disetujui oleh pimpinan.
		5. Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti rapat pembahasan pemantauan berkala hingga verifikasi secara berjenjang terkait substansi pengukuran capaian kinerja, khususnya yang melibatkan pimpinan.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pengadministrasian terkait bukti dukung terkait rapat pembahasan Laporan Monev Bulanan serta Laporan Monev per Quartal di lingkungan DJPI dengan melibatkan pimpinan berupa Nota Dinas dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. - Telah dilakukan verifikasi berjenjang atas capaian kinerja melalui penggunaan Lembar Kendali dalam penyusunan Laporan Monev Bulanan.
3	Pelaporan Kinerja	1. Menyusun dan mempublikasikan Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan pada tahun berikutnya secara tepat waktu sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem	<ul style="list-style-type: none"> - DJPI telah melakukan upaya untuk mengunggah Laporan Kinerja dan Laporan Monev Bulanan secara tepat waktu pada e-SAKIP pada aplikasi e-SAKIP (https://iemon.pu.go.id/sakip2) dan pada website DJPI

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.	(https://pembiayaan.pu.go.id/).
		2. Menyusun Laporan Kinerja tahun berikutnya dengan sistematika dan substansi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR.	Laporan Kinerja tahun 2023 akan disesuaikan dengan sistematika yang berlaku sesuai Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR dan mengacu pada Buku Pedoman yang dikeluarkan oleh BPIW sebagaimana telah diarahkan melalui Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah No. PR 0304-Kw/30 tanggal 15 Desember 2023 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023. Hal ini telah disosialisasikan kepada Unit Kerja di lingkungan DJPI.
		3. Menyajikan segala informasi ketidaktercapaian mengenai alasan/hambatan/kendala atas penurunan kinerja sebagai informasi dalam Laporan Kinerja.	Telah diakomodir dalam Laporan Monev Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja Tahun 2023.
		4. Melakukan verifikasi atau reviu secara berjenjang dari Tim Pelaksana hingga melibatkan pimpinan atas Laporan Kinerja.	Telah dilakukan verifikasi berjenjang terhadap Laporan Kinerja melalui penggunaan lembar kendali guna memastikan bahwa Laporan yang disusun telah direviu dan disetujui oleh pimpinan.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Mengikutsertakan Tim Evaluator Internal dalam Diklat/Bimbingan Teknis Evaluasi SAKIP yang diselenggarakan oleh Kementerian/Instansi terkait.	Telah diselenggarakan Workshop SAKIP DJPI pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan mengundang Kementerian PAN dan RB, BPKP, Biro PAKLN dan BPIW, serta Unit Kerja di lingkungan DJPI. Seluruh Peserta Workshop mendapatkan Surat Keterangan bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut.
		2. Berkoordinasi dengan Biro PAKLN dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan evaluasi internal maupun unit organisasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	- DJPI terus berkoordinasi dengan Biro PAKLN terkait pemanfaatan integrasi data kinerja pegawai pada e-Kinerja, e-Sakip dan e-Monitoring baik cara penggunaannya maupun kendala yang dialami. - DJPI telah melakukan pemutakhiran data capaian IKSS, IKP, dan IKK menggunakan integrasi e-Kinerja, e-Sakip dan e-Monitoring pada tautan: https://iemon.pu.go.id/sakip2 .
		3. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal eselon II dan Eselon I tahun sebelumnya, sehingga seluruh perbaikan berkelanjutan dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan akuntabilitas kinerja.	DJPI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Eselon II dan Eselon I tahun 2022 dan dituangkan dalam Laporan Kinerja.
		4. Menyajikan perbandingan persentase antara efisiensi/efektifitas tahun berjalan	Perbandingan persentase antara efisiensi/efektifitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya telah

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut
		dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Kinerja.	diakomodir dan dituangkan dalam Laporan Kinerja tahun 2023.
		5. Melakukan penertiban administrasi atas pelaksanaan bukti-bukti rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan pembahasan mengenai Capaian Kinerja berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi AKIP sebagai bukti pendukung pelaksanaan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pengadministrasian terkait bukti dukung rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi dan pembahasan capaian kinerja dengan melibatkan pimpinan berupa undangan, Nota Dinas dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan. - Rapat pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2022 diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Dit. PSSPP pada tanggal 17 Juli 2023 b. Pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Setditjen PI pada tanggal 25 Agustus 2023. c. Pembahasan tindak lanjut hasil evaluasi AKIP DJPI pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan melibatkan Unit Kerja Eselon 2 di lingkungan DJPI.

4.2 Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023

Kinerja DJPI Tahun 2023 dihitung berdasarkan perbandingan realisasi kinerja atas Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) dengan target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja DJPI Tahun 2023.

4.2.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Kementerian PUPR memiliki lima Sasaran Strategis (SS) sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Dalam hal ini, DJPI mendukung dua SS Kementerian PUPR yaitu **Sasaran Strategis ketiga (SS-3): Meningkatkan Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau** bersama dengan DJCK dan DJP, serta **Sasaran Strategis kelima (SS-5): Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya** bersama dengan lima Unit Organisasi lainnya yaitu Sekjen, Itjen, BPSDM, BPIW, dan DJBK.

Adapun rincian indikator kinerja pada SS tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kinerja SS-3 dihitung berdasarkan capaian dua indikator kinerja yaitu:
 - a. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan *smart living* (DJCK).
 - b. **Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni** (DJPI dan DJP).
2. Kinerja SS-5 dihitung berdasarkan capaian enam indikator kinerja yaitu:
 - a. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR (Sekjen)
 - b. **Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif** (DJPI).
 - c. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur (Itjen).
 - d. Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR (BPSDM).
 - e. Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis (BPIW).
 - f. Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi (DJBK).

4.2.1.1 Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

DJPI bersama DJP berkontribusi pada capaian SS-3 melalui capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni. Kontribusi kedua Direktorat Jenderal ini didukung oleh kinerja Program Pembiayaan Perumahan (DJPI) dan Penyediaan Perumahan (DJP) tahun 2023. Rincian capaian Program bidang Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Capaian Program Bidang Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Tahun 2020-2023

Status: 31 Desember 2023

Program Kementerian PUPR	Kegiatan	Capaian (Unit)				Total
		2020	2021	2022	2023	
PEMBIAYAAN PERUMAHAN (DJPI)	FLPP	109.253	178.728	226.000	229.000	742.981
	SSB	90.362	-	-	-	90.362
	BP2BT	1.357	11.999	11.886	-	25.242
	SMF	8.460	13.329	65.263	333.988	421.040
	Tapera	-	389	4.534	7.249	12.172
	Total		209.432	204.445	307.683	570.237
PENYEDIAAN PERUMAHAN (DJP)	Rumah Swadaya	233.298	127.091	185.802	150.231	696.422
	Rumah Susun	823	7.024	3.872	4.724	16.443
	Rumah Khusus	1.575	3.311	4.359	4.311	13.556
	Total	235.696	137.426	194.033	159.266	726.421
Total		445.128	341.871	501.716	729.503	2.018.218

Sumber:

1. Laporan Kinerja DJPI Tahun 2022
2. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2023 No.02/BA/Dp/2024
3. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2023

Melalui program bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan, Kementerian PUPR berhasil menyalurkan total **2.018.218 unit rumah** selama tahun 2020-2023 dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni di Indonesia. Capaian tersebut merupakan akumulasi capaian program Pembiayaan Perumahan yang merupakan kewenangan **DJPI** sebanyak **1.291.797 unit**, dan program Penyediaan Perumahan yang merupakan kewenangan **DJP** sebanyak **726.421 unit**. Berdasarkan capaian pembangunan bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan hingga tahun 2023 tersebut, maka diperoleh capaian IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah sebesar **58,99%** dan dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Capaian SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja		Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
SS-3	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau			
IKSS	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	59,05	58,99	99,89

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Adapun rincian perhitungan capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 A &= Y + \left[\left\{ \left(\frac{\sum(V + W)}{11.000.000} \right) \times 100 \right\} \times (X - Y) \right] \\
 &= 56,51\% + \left[\left\{ \left(\frac{\sum(726.421 + 1.291.797)}{11.000.000} \right) \times 100\% \right\} \times (70\% - 56,51) \right] \\
 &= \mathbf{58,99\%}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- A = Capaian Kinerja (%)
- V = Jumlah rumah layak huni yang dibangun oleh DJP (unit)
- W = Jumlah rumah yang mendapat bantuan subsidi perumahan dari DJPI (unit)
- X = Target persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2024 (70%)
- Y = *Baseline* persentase rumah tangga yang menghuni rumah layak tahun 2019 (56,51%)

Berdasarkan capaian 58,99% tersebut, kontribusi Kementerian PUPR dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni nasional tahun 2023 adalah sebesar **2,48%** (diperoleh dari capaian 58,99% dikurangi *baseline* tahun 2019 sebesar 56,51%).

4.2.1.2 Analisis Capaian Kinerja SS-3 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni

Berdasarkan Revisi Akhir PK Menteri PUPR yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan bahwa target IKSS Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2023 adalah sebesar 59,05%. Dari target tersebut, capaian IKSS ini adalah sebesar 58,99%, sehingga didapatkan **kinerja** sebesar **99,89%**. Meskipun terdapat deviasi kinerja sebesar -0,11% dari target, namun capaian kinerja ini dapat dikategorikan **memuaskan**.

Kontribusi pencapaian kinerja pada SS-3 dari Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berasal dari kinerja FLPP, SMF, dan Tapera. Dari ketiga program tersebut, hanya Tapera yang tidak mencapai target.

Hal ini disebabkan oleh:

- a. Bank Penyalur kesulitan melakukan penerbitan efek Tapera dengan konsep LTN (*Long Term Note*) di awal tahun 2023 mengingat biaya penerbitan efek relatif mahal untuk *case count* yang kecil dan prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Penyalur memproses penerbitan efek apabila sudah terkumpul *case count* yang besar.
- b. Belum ada perluasan pasar terkait Pembiayaan Tapera, mengingat saat ini masih terbatas pada PNS dan belum adanya penarikan iuran peserta akibat belum adanya regulasi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan *stakeholder terkait* lainnya.

4.2.1.3 Capaian Kinerja SS-5: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

DJPI merupakan Unit Organisasi tunggal yang mengampu kinerja SS-5 pada IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. Capaian IKSS ini dihitung berdasarkan penjumlahan capaian dari indikator kontributor: (1) Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dibandingkan dengan target (bobot 30%), dan (2) Nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan dibandingkan dengan target (bobot 70%).

Capaian SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif dapat dilihat pada Tabel. 4.4.

Tabel 4.4 Capaian SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja		Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
SS-5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS -2	Tingkat Pemenuhan Investasi/ Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif (%)	100,00	116,75	116,75

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Apabila dilihat secara rinci, capaian kinerja pada Tabel 4.4 diperoleh dari hasil penjumlahan capaian dua indikator kontributor yang dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Rincian Capaian SS-5 pada IKSS-2 Berdasarkan Indikator Kontributor

IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif		Target (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	30,00	28,93
2	Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	70,00	87,83
Total		100,00	116,75

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penjelasan detail terkait masing-masing indikator kontributor adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Dalam rangka mengukur Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun 2023, DJPI melakukan survei kepada 33 responden yang terdiri dari pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR. Penetapan indikator kinerja dikembangkan dari nilai-nilai pada dimensi *service quality* yang kemudian dihubungkan dengan masing-masing cakupan penilaian. Dimensi

service quality terdiri dari lima nilai, yaitu; (1) *reliability* (keandalan), (2) *reponsiveness* (daya tanggap), (3) *assurance* (kepastian), (4) *emphaty* (empati), dan (5) *tangible* (berwujud). Dari lima nilai tersebut, terdapat batasan-batasan yang dinilai antara lain *man, method, money, resource, time*. Seluruh nilai beserta batasan kemudian dituangkan dalam Survei. Pertanyaan-pertanyaan survei dibagi menjadi tiga kategori, yaitu; perencanaan, pelaksanaan dan hasil (*outcomes*).

Tabel 4.6 Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Responden	Nilai (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) * 30%
Perencanaan	7	33	96,54	28,93
Pelaksanaan	6		96,77	
<i>Outcomes</i>	6		95,96	
Total	19	33	96,42	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 4.6, diperoleh nilai hasil survei adalah sebesar 96,42%. Setelah dilakukan pembobotan 30% terhadap hasil survei tersebut, maka didapatkan capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar **28,93%**. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengembangan sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan infrastruktur di DJPI sudah berjalan dengan baik. Meskipun terdapat deviasi capaian sebesar 1,07% yang menunjukkan masih ada ruang untuk melakukan peningkatan kinerja, namun secara keseluruhan capaian kinerja pada indikator ini sangat memuaskan. Kedepannya, DJPI perlu meningkatkan Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan melakukan evaluasi dan *improvement* berkelanjutan.

Adapun rincian perhitungan Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X &= A \times 30\% \\ X &= 96,42\% \times 30\% \\ &= \mathbf{28,93\%} \end{aligned}$$

Keterangan:

- X = Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
- A = Nilai Hasil Survei Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)

2) Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 70%)

Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dihitung berdasarkan nilai investasi/pembiayaan KPBU yang dihasilkan akibat kegiatan Penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target. Berdasarkan Rencana Strategis DJPI TA.2020-2024, target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 20 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar Rp241.273.000.000.000 terdiri dari 2 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 12 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 4 Proyek KPBU Permukiman dan 2 Proyek KPBU Perumahan.

Namun, mengingat terdapat perbedaan target antara Renstra dengan DIPA yang disebabkan karena terjadi beberapa perubahan kebijakan dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap tahunnya, sehingga beberapa target kinerja perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan dituangkan dalam DIPA. Oleh karena itu, untuk target KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2023 yang digunakan dalam perhitungan capaian menggunakan **target** sebagaimana tertuang pada DIPA yaitu 13 proyek/kesepakatan dengan total nilai

investasi sebesar **Rp143.423.491.929.000** terdiri dari: 5 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 2 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 2 Proyek KPBU Permukiman, dan 4 Proyek KPBU Perumahan. Rincian capaian kinerja paket pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan TA. 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan TA. 2023 (Investasi)

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)	
1	Sumber Daya Air	5	5.141.240.929.000	2	PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	134.219.000.000	359.599.000.000
					PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000	
2	Jalan dan Jembatan	2	66.432.251.000.000	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis	37.147.000.000.000	135.750.000.000.000
					Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan- Gresik	23.332.000.000.000	
					Jalan Tol Demak Tuban	49.607.000.000.000	
					Jalan Tol Gilimanuk Mengwi	22.840.000.000.000	
					Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000.000.000	
3	Permukiman	2	10.620.000.000.000	4	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1.940.000.000.000	27.179.725.000.000
					SPAM Batam-Bintan	14.438.858.000.000	
					SPAM Regional Ir. H.Djuanda/ Jatiluhur II	9.740.000.000.000	
					SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000	
4	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000	16.660.000.000.000
					Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000	
TOTAL		13	143.423.491.929.000	13	179.949.324.000.000		
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)						70,00%	
Capaian Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)						87,83%	

Keterangan:

- Target berdasarkan DIPA DJPI TA. 2023
- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Berdasarkan Tabel 4.7, **target** nilai investasi Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp143.423.491.929.000**, dan **realisasi** investasi pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp179.949.324.000.000** dimana realisasi nilai investasi yang dicapai lebih tinggi dari target. Apabila dikalikan dengan bobot 70%, maka didapatkan capaian kinerja Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan 2023 adalah sebesar **87,83%** (berhasil melampaui target).

Realisasi investasi tersebut berasal dari Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2023 yaitu sebanyak 13 proyek terdiri dari: 2 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 5 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 4 Proyek KPBU Permukiman, dan 2 Proyek KPBU Perumahan. Dalam hal ini, proyek KPBU yang siap dikerjasamakan (diklaim sebagai capaian kinerja) merupakan proyek yang minimal telah menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS) dengan mempertimbangkan proses Penyiapan KPBU membutuhkan waktu lama, sehingga proses Transaksi belum dapat dilakukan.

Setelah hasil capaian kinerja indikator kontributor 1 dan 2 telah diperoleh, maka dilakukan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor tersebut.

Capaian Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	=	Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
		+
		Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
	=	28,93% + 87,83%
	=	116,75%

Jadi, capaian kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar 116,75%, dari target 100%, sehingga didapatkan **kinerja** sebesar **116,75%**.

4.2.1.4 Analisis Capaian Kinerja SS-5 pada Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan Dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif

Kinerja IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar **116,75%**. Hal ini dilihat berdasarkan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor, yaitu: (1) Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 28,93% dari target 30%, dan (2) Tingkat Ketersediaan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 87,83% dari target 70%, yang artinya realisasi nilai investasi yang dicapai lebih tinggi dari target. Keberhasilan capaian IKSS ini didukung oleh:

1. Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara DJPI dengan para *stakeholder* terkait percepatan Penyiapan KPBU diantaranya penyusunan dokumen *Final Business Case* (FBC) atau *Feasibility Study* (FS), pemenuhan *readiness criteria*, serta Transaksi Proyek KPBU bidang PUPR.
2. Tercapai atau terpenuhinya target Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan TA. 2023.
3. Meningkatnya kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif.

4.2.2 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024, DJPI mengampu dua program yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dengan koordinator program yaitu Sekretariat Jenderal, dan (2) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan koordinator program yaitu Direktorat Jenderal Cipta Karya. Capaian kinerja Sasaran Program (SP) DJPI tahun 2023 diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi program dengan target yang tertuang pada Perjanjian Kinerja DJPI tahun 2023. Capaian kinerja Sasaran Program (SP) DJPI dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Capaian Kinerja Sasaran Program DJPI Tahun 2023

Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SP 1: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	235,57	235,57
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	116,75	116,75
SP 2. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	98,95	98,95
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	87,81	99,37	113,16

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) **Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan** tahun 2023, realisasi sebesar 235,57% dari target sebesar 100%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **116,75%** dan dapat dikategorikan **memuaskan**.

Pada program Dukungan Manajemen dengan **IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif**, realisasi sebesar 98,95% dari target sebesar 100%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **98,95%** dan dapat dikategorikan **memuaskan**. Selain itu, pada **IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen**

Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya realisasi sebesar 99,37% dari target sebesar 87,81%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **113,16%** dan dapat dikategorikan memuaskan.

Rincian capaian pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dukungan Manajemen adalah sebagai berikut.

4.2.2.1 Capaian Kinerja SP 1 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Renstra DJPI tahun 2020-2024, penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023 yaitu terdiri dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebanyak 125.000 unit, fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebanyak 10.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) untuk pembayaran penerbitan KPR tahun sebelumnya (ulang tahun) sebanyak 754.004 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebanyak 220.000 unit, dan tidak ada penyaluran BP2BT dikarenakan *loan agreement* telah berakhir pada bulan Februari 2023. Jadi, total target penyaluran bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023 berdasarkan Renstra DJPI adalah sebanyak 355.000 unit berasal dari penjumlahan target FLPP, Tapera, dan SMF.

Namun, terdapat penyesuaian target penyaluran Tapera yang semula 125.000 unit menjadi 12.072 unit yang mengacu pada surat Menteri Keuangan selaku anggota Komite Tapera nomor: S-13/MK.05/2023 tanggal 11 Januari 2023 hal Penyampaian Pengesahan atas RKAT BP Tapera Tahun 2023. Dengan demikian, terdapat penyesuaian **target** bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 yang semula 355.000 unit menjadi **242.072 unit** terdiri dari 220.000 unit FLPP, 12.072 unit Tapera, dan 10.000 unit SMF, sedangkan SSB dan SBUM tidak diperhitungkan sebagai target.

Berdasarkan data 31 Desember 2023, total **realisasi** bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 adalah sebanyak **570.237** unit terdiri dari 229.000 unit FLPP, 333.988 unit SMF, dan 7.249 unit Tapera. Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 sehingga didapatkan **capaian IKSP sebesar 235,57%**. Rincian target dan realisasi dari masing-masing bantuan pembiayaan perumahan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Realisasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Tahun 2023

No	Bantuan Pembiayaan Perumahan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Unit	Realisasi	
				Keuangan (Rp)	Unit
1	FLPP	25.180.000.000.000	220.000	26.320.045.507.031	229.000
2	SSB*	3.457.520.000.000	754.004	3.457.520.000.000	750.497
3	SBUM**	895.000.000.000	220.000	895.000.000.000	220.000
4	SMF	-	10.000	6.493.872.078.412	333.988
5	TAPERA	1.050.000.000.000	12.072	1.042.845.955.685	7.249
Total		30.582.520.000.000	242.072	38.209.283.541.128	570.237

Keterangan:

Target unit berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 dan penyesuaian target Tapera sesuai Pengesahan atas RKAT BP Tapera Tahun 2023

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 754.004 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

**) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

Berdasarkan realisasi pada Tabel 4.9, perhitungan persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi program bantuan pembiayaan perumahan}}{\text{Target program bantuan pembiayaan perumahan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{570.237}{242.072} \times 100\% \\ &= 235,57\% \end{aligned}$$

Pencapaian IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitasi dan Bantuan Pembiayaan didukung oleh capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi

Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100% yang menjadi kewenangan Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (PPP). Indikator dan target tersebut mengalami perubahan pasca bubarnya Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) sebagaimana ditetapkan pada Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembubaran Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada tanggal 26 Agustus 2022. Hal ini dapat dilihat pada Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatnya Pelaksanaan Bantuan dan Fasilitas Pembiayaan dalam Renstra DJPI 2020-2024 diukur menggunakan dua indikator kinerja yaitu: (1) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan, dan (2) Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Dukungan Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan (50%) yang dilaksanakan oleh PPDPP. Namun, karena PPDPP telah dibubarkan, maka terdapat perubahan indikator kinerja yang semula 2 indikator kinerja sebagaimana disebutkan di atas menjadi 1 indikator kinerja yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan dengan target sebesar 100% (dilaksanakan penuh oleh Direktorat PPP). Perubahan tersebut telah menyesuaikan alokasi anggaran di DIPA dan telah dituangkan dalam PK Direktorat PPP Tahun 2023.

Gambar 4.1 Kegiatan Bantuan dan Pembiayaan Perumahan

4.2.2.2 Analisis Capaian Kinerja SP 1 pada Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan Tabel 4.9, target IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2023 adalah sebesar 100%. Dari target tersebut, IKSP ini berhasil mencapai realisasi sebesar 235,57%, sehingga didapatkan capaian **kinerja** adalah sebesar **235,57%**. Angka capaian kinerja ini jauh melampaui target yaitu mencapai dua kali lipat dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian ini didukung oleh tercapainya target 2 dari 3 program bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023, yaitu FLPP dan SMF. Pada program FLPP, berhasil merealisasikan sebanyak 229.0000 unit dari target 220.000 unit, sedangkan melalui program SMF berhasil merealisasikan sebanyak 333.988 dari target 10.000 unit. Tingginya realisasi SMF merupakan bentuk perluasan mandat sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Di sisi lain, hal ini mengindikasikan bahwa target SMF yang ditetapkan terlalu rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait penetapan target penerima bantuan pembiayaan perumahan tahun 2024 yang mengacu pada tren historis dan prospek realistis kemampuan pemberian bantuan FLPP, SMF dan Tapera kepada masyarakat.

4.2.2.3 Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif

Capaian IKSP 1. Tingkat Ketersediaan KPBUI Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif dihitung berdasarkan penjumlahan indikator kontributor: (1) Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target (30%), dan (2) Jumlah paket KPBUI yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA,

Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun berjalan (70%)). Rincian capaian berdasarkan tiap indikator kontributor dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rincian Capaian IKSP 1 Berdasarkan Indikator Kontributor

IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif		Target (%)	Capaian (%)
1	Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	30,00	28,95
2	Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan	70,00	70,00
Total		100,00	98,95

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Penjelasan detail terkait masing-masing indikator kontributor adalah sebagai berikut:

1) Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Dalam rangka mengukur Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun 2023, DJPI melakukan survei kepada 30 responden yang terdiri dari pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR. Penetapan indikator kinerja yang akan diukur dan dijadikan pertanyaan dalam kuesioner atau survei berdasarkan pemetaan model logika, yaitu: (1) indikator masukan (*input*) yang mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan, (2) indikator keluaran (*ouput*) digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan, (3) indikator hasil (*outcome*) digunakan untuk mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program yang telah selesai dilaksanakan, serta (4) indikator dampak (*impact*) yang menunjukkan pengaruh, baik positif maupun negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan

kebijakan/program/kegiatan. Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner, maka didapatkan hasil sebagaimana pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Kategori	Jumlah Pertanyaan	Jumlah Responden	Nilai (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) * 30%
Input Kegiatan	10	30	96,61	28,95
Aktivitas Kegiatan	5		96,74	
Outcomes	9		95,96	
Impact Kegiatan	2		96,07	
Total	26	30	96,50	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Rincian perhitungan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut:

$$X = A \times 30\%$$

$$X = 96,50\% \times 30\%$$

$$= \mathbf{28,95\%}$$

Keterangan:

- X = Capaian Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)
- A = Nilai Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (%)

Berdasarkan Tabel 4.11, diperoleh nilai hasil survei adalah sebesar 96,50%. Setelah dilakukan pembobotan 30% terhadap hasil survei tersebut, maka capaian indikator kontributor 1 yaitu Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar **28,95%**.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di DJPI sudah berjalan dengan baik. Meskipun

terdapat deviasi capaian sebesar 1,05% yang menunjukkan masih ada ruang untuk melakukan peningkatan kinerja, namun secara keseluruhan capaian kinerja pada indikator ini memuaskan. Kedepannya, DJPI perlu meningkatkan kinerja Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dengan melakukan evaluasi dan *improvement* berkelanjutan.

2) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan (Bobot 70%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan akibat kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target. Berdasarkan Rencana Strategis DJPI TA.2020-2024, target proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 20 proyek/kesepakatan dengan total nilai investasi sebesar Rp241.273.000.000.000 terdiri dari: 2 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 12 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 4 Proyek KPBU Permukiman dan 2 Proyek KPBU Perumahan.

Namun, mengingat terdapat perbedaan target antara Renstra dengan DIPA yang disebabkan karena terjadi beberapa perubahan kebijakan dan evaluasi terhadap capaian kinerja setiap tahunnya, sehingga beberapa target kinerja perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan dituangkan dalam DIPA. Oleh karena itu, untuk target KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2023 yang digunakan dalam perhitungan capaian menggunakan **target** sebagaimana tertuang pada DIPA yaitu **13 proyek/kesepakatan** dengan total nilai investasi sebesar Rp143.423.491.929.000 terdiri dari: 5 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 2 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 2 Proyek KPBU Permukiman dan 4 Proyek KPBU Perumahan. Rincian capaian kinerja paket pembiayaan KPBU yang siap dikerjasamakan TA. 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU yang Siap Dikerjasamakan TA. 2023 (Proyek)

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI			
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)	
1	Sumber Daya Air	5	5.141.240.929.000	2	PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	134.219.000.000	359.599.000.000
					PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000	
2	Jalan dan Jembatan	2	66.432.251.000.000	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis	37.147.000.000.000	135.750.000.000.000
					Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan- Gresik	23.332.000.000.000	
					Jalan Tol Demak Tuban	49.607.000.000.000	
					Jalan Tol Gilimanuk Mengwi	22.840.000.000.000	
					Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000.000.000	
3	Permukiman	2	10.620.000.000.000	4	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1.940.000.000.000	27.179.725.000.000
					SPAM Batam-Bintan	14.438.858.000.000	
					SPAM Regional Ir. H.Djuanda/ Jatiluhur II	9.740.000.000.000	
					SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000	
4	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000	16.660.000.000.000
					Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000	
TOTAL		13	143.423.491.929.000	13	179.949.324.000.000		70,00%
Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)							

Keterangan:

- Target berdasarkan DIPA DJPI TA. 2023
- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Berdasarkan Tabel 4.12, **target** Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan pada tahun 2023 adalah sebanyak **13 proyek**, dan **realisasi** proyek sebanyak **13 proyek**. Apabila dikalikan dengan bobot 70%, maka didapatkan capaian kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan 2023 adalah sebesar **70%** (target tercapai).

Realisasi Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2023 yaitu sebanyak 13 proyek terdiri dari: 2 Proyek KPBU Sumber Daya Air, 5 Proyek KPBU Jalan dan Jembatan, 4 Proyek KPBU Permukiman, dan 2 Proyek KPBU Perumahan. Dalam hal ini, proyek KPBU yang siap dikerjasamakan (diklaim sebagai capaian kinerja) merupakan proyek yang minimal telah menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS) dengan mempertimbangkan proses Penyiapan KPBU membutuhkan waktu lama, sehingga proses Transaksi belum dapat dilakukan.

Setelah hasil capaian kinerja indikator kontributor 1 dan 2 telah diperoleh, maka Capaian Kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja IKSP} &= \text{Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem,} \\ \text{Tingkat Ketersediaan} &= \text{Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan} \\ \text{KPBU Infrastruktur} &= \text{Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan} \\ \text{Pekerjaan Umum dan} &+ \\ \text{Perumahan} &= \text{Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan} \\ &= \text{Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan} \\ &= 28,95\% + 70,00\% \\ &= \mathbf{98,95\%} \end{aligned}$$

Jadi, Capaian Kinerja IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif adalah sebesar 98,95% dari target 100%, sehingga didapatkan **kinerja** sebesar **98,95%**.

4.2.2.4 Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif

Kinerja IKSP 1. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif adalah sebesar **98,95%**. Hal ini dilihat berdasarkan penjumlahan capaian kedua indikator kontributor, yaitu: (1) Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebesar 28,95% dari target 30%, dan (2) Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan sebesar 70% dari target 70%, yang artinya target tercapai. Ketidaktercapaian target tersebut dipengaruhi oleh belum maksimalnya tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan di DJPI, namun sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, guna meningkatkan capaian kinerja IKSP ini di masa mendatang maka dibutuhkan evaluasi terhadap kinerja DJPI, serta melakukan identifikasi upaya/strategi yang dapat dilakukan untuk melakukan percepatan pelaksanaan Proyek KPBU diantaranya melalui pengimplementasian tahapan pelaksanaan kegiatan dan indikasi lini waktu Proyek KPBU berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PPN Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam hal mengadaptasi perubahan peraturan KPBU tersebut, saat ini DJPI sedang menyusun Permen PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan mencabut Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan ini disusun DJPI bertujuan untuk melakukan optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, serta pembagian wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU dan sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui sumber pendanaan non-APBN.

4.2.2.5 Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Capaian IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dihitung melalui kinerja IKK Setditjen PI dikali dengan target IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya sebesar 87,81%. Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Rincian Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

No	Sasaran Program/Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
SP 2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya				
IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		87,81	99,37	113,16
Cara Pengukuran melalui Capaian IKK Setditjen PI:				
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,13	107,53
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	100,00
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	100,00
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	15,00	150,00
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	18,75	125,00
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00	100,00
Total		75,00	84,88	

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Berdasarkan Tabel 4.13, capaian IKK Setditjen PI adalah sebesar 84,88% dari target 75,00%. Dengan demikian, capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKSP} = \frac{\text{Realisasi Kumulatif IKK Setditjen PI}}{\text{Target Kumulatif IKK Setditjen PI}} \times 87,81\%$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian IKSP} &= \frac{84,88\%}{75,00\%} \times 87,81\% \\ &= 99,37\%\end{aligned}$$

Jadi, capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 99,37% dari target 87,81%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **113,16%**.

4.2.2.6 Analisis Capaian Kinerja SP 2 pada Indikator Kinerja Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Kinerja IKSP 2. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya adalah sebesar 113,16% dan dapat dikategorikan memuaskan. Keberhasilan capaian ini didukung oleh tercapainya semua target IKK Setditjen PI. Target output Setditjen PI tahun 2023 berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 adalah sebanyak 36 laporan/layanan/dokumen sedangkan total realisasi output yang dihasilkan adalah sebanyak 41 laporan/layanan/dokumen. Selain itu, Setditjen PI di tahun 2023 ini mendapat tambahan 7 Paket Kegiatan baru yang menghasilkan 7 *output* berupa laporan/layanan/dokumen di luar Renstra DJPI TA. 2020-2024, sehingga mendukung pencapaian kinerja IKSP ini.

Paket kegiatan tersebut adalah:

- a. Penatausahaan dan Pelaporan BMN.
- b. Dukungan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- c. Pengelolaan Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
- d. Penyusunan Panduan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kegiatan KPBU di Lingkungan DJPI TA. 2023.

- e. Penyusunan Laporan Manajemen Risiko.
- f. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan P3DN DJPI TA 2023.
- g. Pembiayaan Infrastruktur Kreatif Creative *Infrastructure Financing* CreatIFF Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang Berketahanan dan Berkelanjutan.

Dalam hal ini, DJPI melalui Setditjen PI menunjukkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada tahun 2023, sehingga dapat mencapai kinerja yang memuaskan pada tahun 2023.

4.2.3 Capaian Kinerja Kegiatan Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI

Pencapaian Sasaran Program di DJPI tentunya didukung oleh capaian indikator kinerja sasaran kegiatan (IKK) dari enam Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI. Capaian IKK ini dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi kegiatan yang mendukung pencapaian IKK dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

4.2.3.1 Capaian IKK Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Setditjen PI) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya berkontribusi penuh atas capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya. Secara keseluruhan, enam IKK Setditjen PI mencapai target yang telah ditetapkan. Rincian capaian IKK Setditjen PI berdasarkan PK tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Capaian IKK Setditjen PI

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,13	107,53
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	100,00
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	15,00	150,00
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	18,75	125,00
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00	100,00

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

4.2.3.2 Analisis Capaian IKK Setditjen PI

Berdasarkan Tabel 4.14, keseluruhan IKK Setditjen PI mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui capaian IKK tersebut, **Setditjen PI telah berkontribusi penuh (100%)** atas **capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya** sebesar **99,37%**. Terdapat tiga IKK memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan target tahun 2023. Terdapat tiga IKK yang melampaui target (kinerja di atas 100%), yaitu: (1) Capaian IKK Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 16,13% dari target 15,00% sehingga didapatkan kinerja sebesar 107,53%, (2) Capaian IKK Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 15,00% dari target 10,00% sehingga didapatkan kinerja sebesar 150,00%, dan (3) Capaian Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebesar 18,75% dari target 15,00% sehingga didapatkan kinerja sebesar 125,00%. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh jumlah *output* yang dihasilkan oleh Setditjen PI melebihi target yang telah ditetapkan, dan menjadi salah satu bentuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan di tahun 2023.

Output yang dapat dihasilkan oleh Setditjen PI pada tahun 2023 yang melebihi target adalah sebagai berikut:

- a. *Output* yang dihasilkan pada IKK Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 16 layanan dari target 14 layanan.
- b. *Output* yang dihasilkan pada IKK Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 4 laporan dari target 2 laporan.
- c. *Output* yang dihasilkan pada IKK Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah 4 laporan dari target 3 laporan.

4.2.3.3 Capaian IKK Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan (Direktorat PSSPP) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif bersama dengan Unit Kerja Eselon II lainnya yaitu Direktorat PPISDA, Direktorat PPIJJ, Direktorat PPIP, dan Direktorat PPP. Dalam hal ini, Direktorat PSSPP berkontribusi pada capaian kinerja Tingkat Penerapan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dikur melalui hasil survei kepada responden. Capaian IKK Direktorat PSSPP tahun 2023 berdasarkan PK adalah sebesar 109,86%. Rincian capaian IKK Direktorat PSSPP dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Capaian IKK Direktorat PSSPP

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100,00	109,86	109,86

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 109,86%, **Direktorat PSSPP telah berkontribusi** sebesar **28,95%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar **98,95%**.

4.2.3.4 Analisis Capaian IKK Direktorat PSSPP

Berdasarkan Tabel 4.15, capaian IKK Direktorat PSSPP adalah sebesar 109,86% dari target 100%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **109,86%**. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana sehingga capaian beberapa komposit indikator kinerja ini berhasil mencapai target bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Komposit indikator kinerja tersebut antara lain:

- Capaian tingkat implementasi pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan yang berhasil melampaui target, yaitu sebesar 48,00% dari target 40,00%.
- Capaian tingkat implementasi kegiatan penyelenggaraan SAKIP yang berhasil melampaui target, yaitu sebesar 31,86% dari target 30,00%.
- Capaian tingkat implementasi kegiatan kepatuhan internal dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan berhasil mencapai target 30,00%.

4.2.3.5 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (Direktorat PPISDA) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, Direktorat PPISDA berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur sumber daya air. Capaian IKK Direktorat PPISDA tahun 2023 berdasarkan PK adalah sebesar 22,91%. Rincian capaian IKK Direktorat Direktorat PPISDA dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Capaian Kinerja Direktorat PPISDA

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00	22,91	91,64

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 22,91%, **Direktorat PPISDA telah berkontribusi sebesar 10,77%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif yaitu sebesar **98,95%**. Dari total target 13 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2023, Direktorat PPISDA merealisasikan sebanyak 2 dari 4 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPISDA. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air yang Siap Dikerjasamakan

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI		
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	Sumber Daya Air	5	5.141.240.929.000	2	PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan	134.219.000.000
					PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	225.380.000.000
					Total Investasi	359.599.000.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 12 Proyek KPBU sektor Sumber Daya Air yang dikerjakan di tahun 2023 dengan total nilai investasi sebesar Rp37,02 Triliun yang terdiri dari 4 proyek *solicited* dan 8 proyek *unsolicited*. Rincian Proyek KPBU sektor Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Proyek KPBU Sektor Sumber Daya Air

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Status Tahapan Kegiatan
Tahap Penyiapan			
1	Daerah Irigasi Lhok Guci	4,08	<i>Outline Business Case (OBC)</i>
2	Bendungan Merangin	7,85	<i>Final Business Case (FBC)</i>
3	Bendungan Bodri	1,74	Pemenuhan <i>Readiness Criteria/</i> Persiapan Transaksi
4	PLTM Bendungan Jenelata	0,13	FBC
5	Revitalisasi dan Modernisasi Irigasi Sistem Interkoneksi HLD WS Lombok	1,58	Persiapan Transaksi (proses Konfirmasi Pendahuluan AP)
6	Optimalisasi dan Revitalisasi Daerah Irigasi Komering berdasarkan Prinsip Syariah	1,65	Persiapan Transaksi (Proses Konfirmasi Final AP)
7	PLTM Karalloe	0,13	Evaluasi Pra <i>Feasibility Study (FS)</i> , diusulkan menjadi proyek penugasan kepada BUMN di tahun 2024
8	PLTM Temef	0,06	Evaluasi Pra FS, diusulkan menjadi proyek penugasan kepada BUMN di tahun 2024
9	Penyediaan Infrastruktur Bendungan dan PLTA	18,29	Penyusunan FS
10	PLTM Leuwikeris	0,23	Evaluasi FS
Total = 10 Proyek		35,73	
Tahap Transaksi			
1	Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW	0,17	<i>Request for Proposal (RfP)</i> – negosiasi
2	PLTA Tiga Dihaji	1,12	RfP
Total = 2 Proyek		1,29	
Grand Total = 12 Proyek		37,02	

Keterangan: *Solicited*
Unsolicited

4.2.3.6 Analisis Capaian IKK Direktorat PPISDA

Berdasarkan Tabel 4.16, capaian IKK Direktorat PPISDA adalah sebesar 22,91% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **91,64%**. Ketidaktercapaian target IKK ini disebabkan beberapa proyek KPBU sektor sumber daya air mengalami kendala/isu yang bersifat administratif dan operasional, sehingga mempengaruhi kinerja Direktorat PPISDA. Beberapa kendala/isu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pada Bendungan Merangin, dokumen FBC akan dilakukan finalisasi setelah adanya kesepakatan ruang lingkup proyek. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan secara komprehensif dengan *stakeholders* terkait.
- b. Terbatasnya kapasitas fiskal PJKP (Ditjen SDA) untuk pembayaran KPBU dengan skema pengembalian investasi berupa *Availability Payment* (AP), sehingga dibutuhkan pembahasan mengenai alternatif pembiayaan lain untuk mengurangi beban AP yang dibayarkan PJKP.
- c. Pemenuhan *readiness criteria* (LARAP, AMDAL, KKPR, DPPT, Penlok) sebelum masuk tahap Transaksi.
- d. Dalam hal pelaksanaan KSPI, objek BMN yang menjadi lingkup KSPI pada sektor Sumber Daya Air belum tercatat dan belum terorganisir dengan baik.
- e. Dalam hal pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan, masih terdapat isu legalisasi pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan oleh BUP dalam skema KPBU.
- f. Pada PLTM Jenelata, mundurnya *timeline* pembangunan Bendungan Jenelata sehingga akan berdampak pada pembangunan PLTM Jenelata.

4.2.3.7 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, Direktorat

PPIJJ berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur jalan dan jembatan. Capaian kinerja Direktorat PPIJJ berdasarkan PK adalah sebesar 25,00%. Rincian capaian IKK Direktorat Direktorat PPIJJ dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25,00	25,00	100,00

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 25,00%, **Direktorat PPIJJ telah berkontribusi sebesar 26,92%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar **98,95%**.

Dari total target 13 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2023, Direktorat PPIJJ merealisasikan sebanyak 5 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIJJ. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI		
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	2	66.432.251.000.000	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis	37.147.000.000.000
					Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan- Gresik	23.332.000.000.000
					Jalan Tol Demak Tuban	49.607.000.000.000
					Jalan Tol Gilimanuk Mengwi	22.840.000.000.000
					Fly Over Sitinjau Lauik	2.824.000.000.000
					Total Investasi	135.750.000.000.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 26 Proyek KPBUs sektor Jalan dan Jembatan yang dikerjakan di tahun 2023 dengan total nilai investasi sebesar Rp440,46 Triliun yang terdiri dari 11 proyek *solicited* dan 15 proyek *unsolicited*. Rincian Proyek KPBUs sektor Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4.21 Proyek KPBUs Sektor Jalan dan Jembatan

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Status Tahapan Kegiatan
Tahap Penyiapan			
1	Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik	23,33	FBC dan Pemenuhan <i>Readiness Criteria</i> (RC)
2	Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta*	53,77	FBC dan Finalisasi RC
3	Jembatan Batam - Bintan	14,35	Finalisasi FBC dan RC
4	Jalan Tol Demak - Tuban	49,61	Finalisasi FBC dan RC
5	Bandung <i>Intra Urban Toll Road</i> (BIUTR)	12,59	Penyusunan FBC dan RC (hibah KIAT)
6	Jalan Tol Pejagan-Cilacap	28,11	Penyusunan FBC dan RC (hibah KIAT)
7	O&M Jembatan Suramadu <i>bundling</i> dengan Surabaya <i>Eastern Ring Road</i>	9,88	Penyusunan FBC dan RC (diusulkan hibah KIAT)
8	Jalan Akses <i>Exit Toll</i>	7,90	FBC
9	Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi	22,84	FBC dan Pemenuhan RC
10	Jalan Tol Akses Patimban Extend (Sadang - Subang)	5,47	Evaluasi Pra FS
11	Jalan Tol Caringin – Cisarua (bagian dari Caringin-Cianjur)	8,08	Evaluasi Pra FS
12	Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian dari Tomang-Pluit-Bandara (elevated))	9,28	Evaluasi Pra FS
13	Jalan Tol Khusus Motor Ruas Jagorawi	3,51	Evaluasi Pra FS
14	Jalan Tol Cilegon-Anyer	8,22	Evaluasi Pra FS
15	<i>Fly Over</i> Sitinjau Lauik	2,82	Persetujuan Prakarsa
16	Jalan Tol Kohod (Pakuhaji) – Lebakwangi (Neglasari)	5,70	Penyusunan FS
Total = 16 Proyek		265,46	
Tahap Transaksi			
1	Jalan Tol Semanan – Balaraja	15,53	Persiapan Transaksi
2	Jalan Tol Layang Cikunir – Karawaci	26,15	Persiapan Transaksi
3	Jalan Tol Semarang Harbour (Semarang – Kendal)	13,35	Persiapan Transaksi
4	Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis	37,15	Prakualifikasi (PQ)

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Status Tahapan Kegiatan
5	Jalan Tol Sentul Selatan – Karawang Barat	15,38	RfP
6	Jalan Tol Bogor – Serpong via Parung	8,95	RfP
7	Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena Segmen Mamberamo – Elelim	3,53	RfP (negosiasi)
8	Jalan Tol Kediri – Tulungagung	10,47	Penetapan Pemenang Lelang
9	Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg	23,22	Penandatanganan Perjanjian KPBU
10	Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir – Ulujami	21,27	Penandatanganan Perjanjian KPBU
Total = 10 Proyek		175,00	
Grand Total = 26 Proyek		440,46	

Keterangan: *Solicited*
Unsolicited

*) Penundaan proyek prioritas setelah tahun 2024

4.2.3.8 Analisis Capaian IKK Direktorat PPIJJ

Berdasarkan Tabel 4.19, capaian IKK Direktorat PPIJJ adalah sebesar 25,00% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **100,00%**. Keberhasilan capaian IKK Ini didukung oleh tercapainya seluruh *output* kegiatan Direktorat PPIJJ sebagaimana target yang tercantum pada Revisi DIPA Akhir tanggal 22 Desember 2023 diantaranya:

- Tercapainya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.
- Tercapainya Penyusunan Dokumen Pendukung *Final Business Case* (FBC) Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (*Readiness Criteria* (RC) yang terdiri dari DPPT dan AMDAL) Jalan Tol Tuban - Gresik).
- Tercapainya Penyusunan Dokumen FBC Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan melalui Fasilitas *Loan ADB* (RC Jalan Tol Tol Cilacap – Yogyakarta, Jalan Tol Demak – Tuban, dan FBC Jalan Tol Tuban – Gresik).

- d. Tercapainya Penyusunan Dokumen Pendukung Studi Kelayakan Proyek KPBU Sektor Jalan dan Jembatan (Pemetaan/Kajian terhadap 58 ruas Jalan Akses *Exit Toll* dan Pemutakhiran Dokumen FBC Jalan Tol Surabaya *Eastern Ring Road/SERR*)
- e. Tercapainya Penyusunan Dokumen Pendukung FBC Proyek KPBU Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta (penyusunan revisi terhadap *Basic Design* Jalan Tol Demak-Tuban dan Jalan Tol Tuban-Gresik, Dokumen Lingkungan dan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan Tol Demak-Tuban dan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta).
- f. Penyusunan NSPK (NSPK Kerja Sama Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dan Penyusunan Dokumen Rekomendasi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol).
- g. Proyek KPBU Jalan dan Jembatan yang Siap Dikerjasamakan tahun 2023 yang melampaui target, dimana target DIPA DJPI TA 2023 hanya terdapat dua proyek. Terdapat lima proyek yang siap dikerjasamakan, yaitu Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis, Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan-Gresik, Jalan Tol Demak-Tuban, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, dan *Fly Over* Sitingjau Lauik.
- h. Tercapainya lima dokumen Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

Keseluruhan pencapaian ini mencerminkan tingkat keberhasilan yang optimal, dalam mencapai 100% dari tujuan yang ditetapkan.

4.2.3.9 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman (Direktorat PPIP) mendukung pencapaian Program Dukungan Manajemen khususnya mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif. Dalam hal ini, Direktorat PPIP berkontribusi melalui pelaksanaan proyek infrastruktur permukiman. Capaian kinerja Direktorat PPIP berdasarkan PK adalah sebesar 25,00%. Rincian capaian IKK Direktorat Direktorat PPIP dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4.22 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00	24,80	99,20

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK sebesar 25,00%, **Direktorat PPIP telah berkontribusi sebesar 10,77%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif sebesar **98,95%**.

Dari total target 13 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2023, Direktorat PPIP merealisasikan sebanyak 4 dari 2 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPIP. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23 Proyek KPBU Sektor Permukiman yang Siap Dikerjasamakan

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI		
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	Permukiman	2	10.620.000.000.000	4	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1.940.000.000.000
					SPAM Batam-Bintan	14.438.858.000.000
					SPAM Regional Ir. H.Djuanda/ Jatiluhur II	9.740.000.000.000
					SPAM Regional Sinumbra	1.060.867.000.000
					Total Investasi	27.179.725.000.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 8 Proyek KPBU dan *Business to Business* (B2B) sektor Permukiman yang dikerjakan di tahun 2023 dengan total nilai investasi sebesar Rp33,70 Triliun yang terdiri dari 2 proyek *solicited*, 5 proyek *unsolicited*, dan 1 proyek B2B. Rincian Proyek KPBU sektor Permukiman dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Proyek KPBU Sektor Permukiman

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Status Tahapan Kegiatan
Tahap Penyiapan			
1	SPAM Regional Karian Barat + SPAM Regional Sindangheula*	3,52	Pra FS
2	SPAM Bitung*	0,25	Penyusunan SP + OBC
3	SPAM Regional Bimatara	0,65	Outline Business Case (OBC)
4	SPAM Regional Ayung I	2,10	Penyusunan FS
5	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	9,74	Evaluasi FS
6	SPAM Batam - Bintan	14,44	Evaluasi FS
7	SPAM Regional Sinumbra*	1,06	Evaluasi FS
Total = 7 Proyek		31,76	
Tahap Transaksi			
1	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB)	1,94	Financial Close (FC)
Total = 1 Proyek		1,94	
Grand Total = 27 Proyek		33,70	

Keterangan: *Solicited, Unsolicited, B2B*

*) DJPI melakukan pendampingan kepada PJPK Daerah

4.2.3.10 Analisis Capaian IKK Direktorat PPIP

Berdasarkan Tabel 4.22, capaian IKK Direktorat PPIP adalah sebesar 24,80% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **99,20%**. Ketidaktercapaian target IKK ini disebabkan karena terdapat kendala/isu yang dihadapi selama pelaksanaan Proyek KPBU di tahun 2023. Kendala/isu tersebut diantaranya:

- Tingkat kompleksitas pengaturan kelembagaan proyek infrastruktur air minum yang tinggi (banyak *stakeholder* yang mengatur penyelenggaraan SPAM yang berdampak tingginya dinamika pelaksanaan infrastruktur air minum).
- Belum ada kepastian wilayah dan target pelayanan.
- Tidak tercapainya kesepakatan tarif air kerja sama, sehingga perlu pembahasan terkait standarisasi tarif air minum dengan *offtakers*.

4.2.3.11 Capaian IKK Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan (Direktorat PPP) mendukung pencapaian Program Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada Program Dukungan Manajemen, Direktorat PPP mendukung tercapainya IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan proyek perumahan. Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Direktorat PPP mendukung tercapainya IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui pelaksanaan kegiatan fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan. Rincian capaian kinerja Direktorat PPP berdasarkan PK dapat dilihat pada Tabel 4.25.

Tabel 4.25 Capaian Kinerja Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00	24,56	98,24
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	106,07	106,07

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Melalui capaian IKK 1 sebesar 24,56%, **Direktorat PPP telah berkontribusi sebesar 10,77%** atas **capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU** Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif yaitu sebesar **98,95%**. Selain itu, melalui capaian IKK 2 sebesar 106,07%, **Direktorat PPP telah berkontribusi penuh** atas **capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah** yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan.

Dari total target 13 Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan di DJPI tahun 2023, Direktorat PPP merealisasikan sebanyak 2 dari 4 proyek yang ditargetkan sesuai PK Direktorat PPP. Proyek-proyek tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.26.

Tabel 4.26 Proyek KPBUs Sektor Perumahan yang Siap Dikerjasamakan

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI		
		Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Jumlah Proyek	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp)
1	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower)	14.990.000.000.000
					Rusun North Government WP 1A (6 tower)	1.670.000.000.000
					Total Investasi	16.660.000.000.000

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Secara keseluruhan, terdapat 7 Proyek KPBUs sektor Perumahan yang dikerjakan di tahun 2023 dengan total nilai investasi sebesar Rp18,81 Triliun yang terdiri dari 5 proyek *solicited*, dan 2 proyek *unsolicited*. Rincian Proyek KPBUs sektor Perumahan dapat dilihat pada Tabel 4.27.

Tabel 4.27 Proyek KPBUs Sektor Perumahan

No	Nama Proyek	Nilai Investasi (Rp Triliun)	Status Tahapan Kegiatan
Tahap Penyiapan			
1	Rusun Kota Surabaya-Medokan Ayu	0,27	Studi Pendahuluan
2	Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi	0,16	Penyusunan OBC + RDS
3	Rusun TOD Pasar Jumat	0,80	OBC
4	Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	0,65	Finalisasi FBC
5	Rusun Sewa Karawang Spuur	0,27	Finalisasi FBC
6	Rusun IKN Hankam WP 1A - 60 Tower*	14,99	Evaluasi FS
7	Rusun IKN North Government WP 1A - 6 Tower	1,67	Evaluasi FS
Total = 7 Proyek		18,81	

Keterangan: *Solicited*
Unsolicited

*) Porsi DJPI hanya s.d. Evaluasi FS, tahapan selanjutnya menjadi kewenangan Otorita IKN

4.2.3.12 Analisis Capaian IKK Direktorat PPP

Berdasarkan Tabel 4.25, capaian IKK 1 Direktorat PPP yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 24,56% dari target 25,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **98,24%**.

Ketidaktercapaian target IKK ini disebabkan karena belum terpenuhinya target proyek KPBU Perumahan yang siap dikerjasamakan sebagaimana target DIPA. Direktorat PPP merealisasikan 2 kesepakatan dari 4 Kesepakatan Proyek KPBU Bidang Perumahan yang ditargetkan pada DIPA. Belum tercapainya 2 Kesepakatan proyek KPBU Bidang perumahan ini dikarenakan proyek tersebut saat ini dalam proses penyesuaian kajian terkait masa konsesi kerjasama dan finansial model berdasarkan arahan Pimpinan. Dua kesepakatan Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan (diklaim sebagai capaian) adalah Proyek KPBU Rusun Hankam WP1 A (60 Tower) dan Proyek KPBU Rusun *North Governmnet* WP 1A (6 Tower). DJPI telah menyelesaikan proses evaluasi FS dari Proyek-proyek IKN tersebut dan Menteri PUPR telah menyerahkan hasil Reviu Studi Kelayakan dan Dokumen Pendukung kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Setelah itu, pelaksanaan tahapan berikutnya menjadi kewenangan Otorita IKN.

Capaian IKK 2 Direktorat PPP yaitu Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan adalah sebesar 106,07% dari target 100,00%, sehingga didapatkan kinerja sebesar **106,07%**. Keberhasilan capaian IKK ini didukung oleh:

- a. Tercapainya target 2 dari 3 program bantuan pembiayaan perumahan pada tahun 2023, yaitu FLPP dan SMF. Pada program FLPP, berhasil merealisasikan sebanyak 229.0000 unit dari target 220.000 unit, sedangkan melalui program SMF berhasil merealisasikan sebanyak 333.988 dari target 10.000 unit.
- b. Terdapat output di Direktorat PPP yang melebihi target Renstra yaitu realisasi output Perumusan Kebijakan Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Perumahan sebanyak 4 rekomendasi kebijakan di atas target Renstra yaitu 2 rekomendasi kebijakan.
- c. Realisasi Pelaksanaan Program Penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebanyak 13.160 rumah tangga senilai Rp52.513.355.147 pada Tahun 2023, dimana program penyaluran ini tidak terdapat pada Renstra Kementerian PUPR tahun 2020 – 2024.

4.3 Perbandingan Kinerja

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari periode lima tahun pelaksanaan Renstra DJPI, yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Perbandingan kinerja organisasi dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan, serta perbandingan capaian kinerja tiap tahunnya penting untuk dilakukan. Hal ini untuk mengevaluasi sejauh mana sasaran organisasi telah tercapai, mengukur kemajuan organisasi, serta menemukan hal-hal yang membutuhkan perbaikan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan umpan balik berharga bagi upaya pencapaian target di masa mendatang. Pada subbab ini akan dijelaskan analisis perbandingan kinerja yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.
2. Perbandingan capaian kinerja dengan target Renstra.
3. Perbandingan capaian kinerja dengan target RPJMN tahun 2020-2024.
4. Perbandingan capaian kinerja dengan capaian unit organisasi/instansi sejenis (*benchmarking*).
5. Perbandingan realisasi anggaran tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Dengan menganalisis perbandingan kinerja organisasi dari berbagai aspek tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran utuh atas capaian, kemajuan dan hal-hal peningkatan organisasi. Hasil ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan dan rencana kerja di masa mendatang.

4.3.1 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI tahun 2023 dengan tahun sebelumnya terhadap target PK dapat dilihat pada Tabel 4.28.

Tabel 4.28 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program DJPI 2020-2023 terhadap PK

No	Program/Sasaran Program/Indikator	2020			2021			2022			2023		
		Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
SS. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau													
	IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,86	56,66	99,65	57,46	57,09	99,36	58,02	57,73	99,50	59,05	58,99	99,90
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman													
	IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00	70,88	70,88	100,00	80,37	80,37	100,00	95,06	95,06	100,00	235,57	235,57
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya													
	IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	72,39	79,20	109,40	75,61	77,93	103,07	77,97	80,66	103,45	84,50	85,37	101,03
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya													
	IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	55,50	99,25							87,81	99,37	113,16
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya													
	IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	116,88	116,88	100,00	111,01	111,01	100,00	107,57	107,57	100,00	116,75	116,75
	IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	98,93	98,93	100,00	61,60	61,60	100,00	102,37	102,37	100,00	98,95	98,95

Keterangan: IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya tidak tercantum pada PK DJPI Tahun 2020-2021, namun tetap dilaporkan dalam Laporan Kinerja

Sumber: Laporan Kinerja DJPI 2020, 2021, 2022 dan Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja pada Tabel 4.28, penjelasan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Terjadi fluktuasi capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2020-2023. Secara detail, kinerja tahun 2023 sebesar 99,90% merupakan capaian tertinggi sepanjang tahun 2020-2023, dan diikuti oleh capaian kinerja tahun 2020 sebesar 99,65%. Capaian kinerja ini didukung oleh tingginya realisasi program bantuan pembiayaan perumahan di DJPI tahun 2023. Pencapaian ini merupakan hasil upaya maksimal dan perbaikan yang dilakukan secara bertahap dari tahun sebelumnya. DJPI akan melakukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan terus meningkatkan capaian ini di masa mendatang.
2. Secara keseluruhan capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif tahun 2020-2023 menunjukkan tren penurunan dari tahun 2020 hingga 2022, namun meningkat kembali di tahun 2023. Pada tahun 2023, capaian kinerja meningkat tajam yang semula kinerja sebesar 107,57% di tahun 2022 menjadi sebesar 116,75%. Hal ini mengindikasikan telah dilakukan langkah-langkah perbaikan yang tepat sehingga target investasi/pembiayaan KPBU kembali terpenuhi bahkan melampaui target.
3. Capaian IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan tahun 2020-2023 menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 berhasil mencapai kinerja 70,88% dari target yang ditetapkan. Kemudian meningkat cukup tinggi menjadi 80,37% di tahun 2021 dan 95,06% di tahun 2022. Peningkatan capaian kinerja ini mengindikasikan semakin baiknya upaya pemenuhan akses pembiayaan perumahan yang dilakukan DJPI melalui penyaluran program FLPP, SMF dan Tapera. Capaian paling tinggi terjadi di tahun 2023 yaitu mencapai 235,57% atau melampaui target lebih dari dua kali lipat. Melalui tren peningkatan yang sangat pesat ini, DJPI akan

mempertahankan capaian serta terus berupaya meningkatkannya dengan berbagai inovasi program dan kebijakan di masa mendatang sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

4. Capaian IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya tahun 2023 sebesar 113,16% meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 99,25%. Hal ini berarti kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis telah melampaui target yang ditetapkan, bahkan sebesar 13% lebih tinggi. Peningkatan capaian ini mengindikasikan terjadinya perbaikan dan atau peningkatan kinerja dari tahun 2020 ke 2023. Beberapa faktor pendukung antara lain lebih baiknya tata kelola organisasi, optimalisasi sistem manajemen dan dukungan teknologi informasi, serta perbaikan proses bisnis dan koordinasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja IKSP ini menunjukkan tren yang positif.
5. Capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan pada tahun 2020-2023 menunjukkan terjadinya fluktuasi di setiap tahunnya. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 102,37% yang melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan kinerja signifikan di tahun 2022 juga berdampak positif di tahun 2023 meski sedikit menurun namun dapat dikategorikan memuaskan dengan kinerja 98,95%. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam menyiapkan proyek KPBU yang siap dikerjasamakan. DJPI akan melakukan upaya/strategi maupun mengembangkan inovasi pembiayaan infrastruktur guna meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang.

4.3.2 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Renstra

Pada Renstra Kementerian PUPR yang sejalan dengan Renstra DJPI TA. 2020-2024 telah ditetapkan target pencapaian Sasaran Strategis dan Sasaran Program selama lima tahun kedepan. Capaian kinerja yang diraih dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 ini perlu dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra untuk mengevaluasi sejauh mana sasaran program telah tercapai.

Perbandingan capaian kinerja terhadap target Renstra dapat dilihat pada Tabel 4.29. Berdasarkan tabel tersebut, terdapat perbedaan target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Sasaran Program pada tahun 2023 antara PK dengan Renstra. Adapun perbedaan target yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pada IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni, target tahun 2023 berdasarkan Revisi Akhir PK Menteri PUPR yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 adalah sebesar 59,05%. Target ini mengalami perubahan, dari semula yang tercantum pada Renstra yaitu sebesar 58,71%. Perubahan target tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target yang diusulkan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR TA. 2020-2024. Akan tetapi, Revisi Renstra tersebut belum ditetapkan hingga TA. 2023 berakhir, namun perhitungan kinerja tetap mengacu pada target sebagaimana pada Revisi Akhir PK Menteri PUPR.
2. Pada IKSS Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR, target tahun 2023 berdasarkan Revisi Akhir PK Menteri PUPR yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 adalah sebesar 84,50%. Target ini mengalami perubahan, dari semula yang tercantum pada Renstra yaitu sebesar 79,72%. Perubahan target tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target yang diusulkan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR TA. 2020-2024. Akan tetapi, Revisi Renstra tersebut belum ditetapkan hingga TA. 2023 berakhir, namun perhitungan kinerja tetap mengacu pada target sebagaimana pada Revisi Akhir PK Menteri PUPR.
3. Pada IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, target tahun 2023 berdasarkan Revisi Akhir PK DJPI yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023 adalah sebesar 87,81%. Target ini mengalami perubahan, dari semula yang tercantum pada Renstra yaitu sebesar 79,26%. Perubahan target tersebut dilakukan untuk menyesuaikan target yang diusulkan dalam Revisi Renstra Kementerian PUPR TA. 2020-2024, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan Revisi Renstra Unit Organisasi (DJPI). Akan tetapi, Revisi Renstra tersebut belum ditetapkan hingga TA. 2023 berakhir, namun perhitungan kinerja tetap mengacu pada target sebagaimana pada Revisi Akhir PK DJPI.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja Kementerian PUPR menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun untuk sebagian besar indikator, meskipun ada beberapa yang menurun pada tahun tertentu. Capaian realisasi aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah tahun 2023 jauh melampaui target. DJPI akan melakukan berbagai upaya dan inovasi untuk mencapai target IKSP pada Renstra 2020-2024. Terkait tingkat ketersediaan KPBU, DJPI akan melakukan optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, serta pembagian wewenang yang lebih jelas, efektif, dan efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU dan sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui sumber pendanaan non-APBN. Dalam hal ini, DJPI telah menyusun perubahan regulasi terkait KPBU yaitu Permen PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan mencabut Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Kekhususan pengaturan dalam Rapermen KPBU PUPR yaitu adanya standarisasi durasi pelaksanaan Proyek KPBU, penerapan inovasi dukungan pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan investor, pendetailan tahapan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha, implementasi *staple* financing, dan perbaikan tata kelola melalui implementasi prinsip ESG pada Proyek KPBU.



Gambar 4.2 Pembahasan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan KPBU

Tabel 4.29 Perbandingan Capaian Kinerja IKSS dan IKSP terhadap Renstra

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR	2020		2021		2022		2023	
		Target (%)	Realisasi (%)						
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
SS. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau									
	IKSS. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni	56,86	56,66	57,46	57,09	58,02	57,73	59,05*	58,99
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman									
	IKSP. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00	70,88	100,00	80,37	100,00	95,06	100,00	235,57
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya									
	IKSS. Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR	72,39	79,20	75,61	77,93	77,97	80,66	84,50**	85,37
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
	IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	55,92	55,50	63,35	63,35	71,54	84,40	87,81***	99,37
SS. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya									
	IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	116,88	100,00	111,01	100,00	107,57	100,00	116,75
	IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif	100,00	98,93	100,00	61,60	100,00	102,37	100,00	98,95

Keterangan:

- *) Target telah disesuaikan dengan Revisi Akhir PK Menteri PUPR, target awal Renstra sebesar 58,71%
- ***) Target telah disesuaikan dengan Revisi Akhir PK Menteri PUPR, target awal Renstra sebesar 79,72%
- ***) Target telah disesuaikan dengan Revisi Akhir PK DJPI, target awal Renstra sebesar 79,26%

Capaian Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan dihitung berdasarkan capaian program bantuan pembiayaan perumahan. Perbandingan capaian tersebut dengan target Renstra dapat dilihat pada Tabel 4.30. Secara total, capaian kinerja terhadap target Renstra selama periode 2020-2023 adalah **1.291.797** rumah tangga atau setara **91,28%**. Capaian kinerja meningkat tajam di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya untuk semua program.

Tabel 4.30 Perbandingan Capaian Program Bantuan Pembiayaan Perumahan terhadap Target Renstra

Program Bantuan Pembiayaan Perumahan	Target Renstra (Rumah Tangga)					Capaian (Rumah Tangga)				
	2020	2021	2022	2023	Total	2020	2021	2022	2023	Total
FLPP	102.500	157.500	200.000	220.000	680.000	109.253	178.728	226.000	229.000	742.981
SSB	175.000	100.000	0	0	275.000	90.362	-	-	-	90.362
BP2BT	31.823	39.684	312	0	71.819	1.357	11.999	11.886	-	25.242
SMF	8.460	10.000	10.000	10.000	38.460	8.460	13.329	65.263	333.988	421.040
Tapera	50.000	75.000	100.000	125.000	350.000	-	389	4.534	7.249	12.172
Total	367.783	382.184	310.312	355.000	1.415.279	209.432	204.445	307.683	570.237	1.291.797

Sumber: Laporan Kinerja DJPI Tahun 2022, Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Selain program bantuan pembiayaan perumahan, DJPI bertanggung jawab atas pencapaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif. Capaian ini dihitung berdasarkan akumulasi capaian Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan dengan hasil survei tingkat penerapan hasil pengembangan sistem, kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Berikut ini merupakan perbandingan capaian Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2020-2023 terhadap target Renstra yang dapat dilihat pada Tabel 4.31.

Tabel 4.31 Perbandingan Capaian Proyek KPBU yang Siap Dikerjasamakan terhadap Target Renstra

Sektor	Target Renstra (Proyek)				Capaian (Proyek)			
	2020	2021	2022	2023*	2020	2021	2022	2023
Sumber Daya Air	1	2	2	5	0	0	5	2
Jalan dan Jembatan	4	13	10	2	6	9	10	5
Permukiman	3	4	4	2	3	1	2	4
Perumahan	1	2	2	4	0	0	2	2
Total	9	21	18	13	9	10	19	13

Keterangan: Target 2023 berdasarkan DIPA

Sumber: Laporan Kinerja DJPI Tahun 2022, Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Berdasarkan Tabel 4.31, capaian proyek KPBU yang siap dikerjasamakan tahun 2020-2023 adalah sebanyak 51 proyek dari target 61 proyek sehingga didapatkan kinerja 83,61%. DJPI akan melakukan upaya peningkatan kinerja melalui percepatan penyiapan proyek, perbaikan regulasi, serta inovasi skema KPBU yang adaptif guna mencapai target di akhir periode Renstra 2020-2024.

4.3.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu lima tahunan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 memuat arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan nasional, kerangka ekonomi makro. Dalam RPJMN telah ditetapkan sasaran, target, dan kerangka regulasi serta pendanaan untuk masing-masing Kementerian dan Lembaga. Oleh karena itu, sangat penting bagi Unit Organisasi di Kementerian/Lembaga untuk melakukan perbandingan capaian kinerja tahunan dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMN. Perbandingan kinerja ini bertujuan untuk memantau apakah pencapaian kinerja organisasi telah sesuai dengan target rencana pembangunan nasional. Selain itu, hasil perbandingan juga dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan perencanaan dan optimalisasi kinerja di tahun berikutnya agar selaras dengan target RPJMN. Dengan demikian, perbandingan capaian kinerja unit organisasi terhadap target RPJMN menjadi sangat penting dilakukan sebagai bentuk sinergi dan kontribusi nyata terhadap pencapaian rencana pembangunan lima tahunan.

Dalam mendukung target RPJMN 2020-2024 sebagaimana tertuang pada matriks pembangunan RPJMN tahun 2020-2024, DJPI berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Proyek Prioritas (ProP) Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dan *Major Project* (Proyek Prioritas Strategis).

A. Proyek Prioritas (ProP) Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan RPJMN 2020-2024

Dalam mendukung pemenuhan target RPJMN, DJPI berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ProP Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan dengan rincian proyek sebagai berikut:

1. Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan dengan indikator jumlah rumah tangga yang terlayani bantuan pembiayaan perumahan melalui BP2BT, SBUM dan Penyelesaian SSB (rumah tangga).

2. Bantuan pembiayaan perumahan melalui TAPERERA dengan indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga).
3. Fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT. SMF dengan indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan pembiayaan perumahan (rumah tangga).
4. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan FLPP (rumah tangga).

Perbandingan capaian kinerja DJPI melalui program bantuan pembiayaan perumahan dengan target ProP Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan pada RPJMN 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.32. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa capaian kinerja bantuan pembiayaan perumahan di DJPI tahun 2020-2023 adalah sebanyak 1.291.797 rumah tangga dari target RPJMN sebanyak 1.137.114 rumah tangga, sehingga didapatkan kinerja 113,60%. Capaian tertinggi ada pada program FLPP dengan kinerja 109,26%, capaian terendah ada pada program Tapera yaitu 3,48% dari target, dan capaian program pembiayaan perumahan lainnya cukup optimal bahkan melampaui target, sehingga capaian ini perlu dipertahankan. Rendahnya realisasi Tapera ini disebabkan karena penyaluran Tapera mulai terealisasi pada tahun 2021. DJPI akan terus melakukan upaya percepatan penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dalam rangka meningkatkan akses dan keterjangkauan MBR terhadap rumah layak huni, serta menjaga konsistensi capaian agar tetap melampaui target di akhir periode RPJMN 2020-2024.

Tabel 4.32 Perbandingan Capaian Kinerja Program Bantuan Pembiayaan Perumahan DJPI dengan Target Proyek Prioritas Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan RPJMN 2020-2024

Proyek Prioritas (ProP)/ Proyek	Target (Rumah Tangga)					Capaian (Rumah Tangga)				
	2020	2021	2022	2023	Total	2020	2021	2022	2023	Total
Layanan Bantuan Pembiayaan Perumahan	312	68.342	0	0	68.654	91.719	11.999	11.886	0	115.604
Bantuan pembiayaan perumahan melalui TAPERA	50.000	75.000	100.000	125.000	350.000	0	389	4.534	7.249	12.172
Fasilitas pembiayaan perumahan melalui PT. SMF	8.460	10.000	10.000	10.000	38.460	8.460	13.329	65.263	333.988	421.040
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	102.500	157.500	200.000	220.000	680.000	109.253	178.728	226.000	229.000	742.981
Total	161.272	310.842	310.000	355.000	1.137.114	209.432	204.445	307.683	570.237	1.291.797

Sumber: Laporan Kinerja DJPI Tahun 2022, Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

B. Major Project (Proyek Prioritas Strategis) RPJMN 2020-2024

Dalam pemenuhan target RPJMN, Kementerian PUPR c.q DJPI turut berkontribusi dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) yaitu mendukung capaian kinerja *Major Project* (Proyek Prioritas Strategis) melalui pelaksanaan Proyek KPBU. Rincian Proyek KPBU yang mendukung *Major Project* RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Batam-Bintan

Pada *Major Project* Pembangunan Wilayah Batam-Bintan, DJPI berkontribusi melalui pembangunan Proyek KPBU Jembatan Batam-Bintan. Proyek Jembatan Batam-Bintan memiliki nilai investasi sebesar 14,35 Triliun. Status proyek saat ini dalam proses reviu kelayakan finansial dan pemenuhan *readiness criteria* sebelum masuk tahap Transaksi yang ditargetkan pada Q3 2024.

2. Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam mendukung pembangunan IKN, DJPI turut berkontribusi terhadap penyiapan IKN melalui Proyek KPBU *unsolicited* (prakarsa Badan Usaha). Pada tahun 2023, DJPI telah selesai melakukan evaluasi dua Studi Kelayakan Proyek KPBU IKN yang disampaikan oleh calon Pemrakarsa untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri PUPR, yaitu pada Proyek Rusun IKN Hankam WP 1A-60 Tower dan Proyek KPBU Rusun IKN *North Government* WP 1A-6 Tower.

Setelah dilakukan evaluasi, Kementerian PUPR menyerahkan hasil reviu Studi Kelayakan kepada Kepala Otorita IKN, melalui surat Menteri PUPR no. RU 0203-Mn/2621 tanggal 28 November 2023 hal Penyerahan Hasil Reviu Studi Kalayakan dan Dokumen Pendukung untuk Proyek KPBU Sektor Perumahan di IKN Atas Prakarsa Konsorsium Nusantara. Surat tersebut menyatakan bahwa Proyek Rusun IKN Hankam WP 1A-60 Tower Prakarsa Konsorsium Nusantara telah sesuai dengan ketentuan Permen PPN Nomor 6 Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di Ibu Kota Nusantara dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu pengadaan Badan usaha Pelaksana (BUP) yang akan dilanjutkan oleh

Otorita IKN selaku PJPK Proyek KPBU di IKN, mengingat bahwa Otorita IKN telah beroperasi.

Berdasarkan hasil evaluasi Studi Kelayakan Proyek KPBU Rusun IKN *North Government* WP 1A-6 Tower prakarsa PT Summarecon Agung Tbk., dinyatakan bahwa Studi Kelayakan dan Dokumen Pendukung yang diusulkan tidak dapat disetujui mempertimbangkan usulan biaya satuan konstruksi gedung dari Summarecon melebihi Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Oleh karena itu, kelanjutan prosesnya diserahkan oleh Menteri PUPR kepada Otorita IKN.

3. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung

Dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dari Aceh sampai dengan Lampung, DJPI turut berkontribusi terhadap penyusunan Raperpres Perubahan Ketiga Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Telah dilakukan konsultasi publik Rperpres ini pada tanggal 18 Desember 2023, dan akan dilakukan harmonisasi.

Selain itu, DJPI juga berkontribusi pada Skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) yang akan diterapkan pada proyek JTTS ini. DJPI akan membantu proses pemenuhan kelengkapan data dukung untuk ruas Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi sebagai pertimbangan Kementerian Keuangan untuk penerapan skema PBBL di ruas tersebut.

4. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA

Dalam hal mendukung *Major Project* ini, DJPI berkontribusi melalui penyediaan listrik melalui Proyek KPBU. Proyek-proyek tersebut yaitu:

- a. Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW dengan total nilai investasi sebesar Rp170 Miliar. Status proyek saat ini yaitu dalam proses persetujuan pemenang lelang kepada Menteri PUPR. Penetapan pemenang lelang ditargetkan pada bulan Januari 2024, dan *Financial Close* (FC) serta Konstruksi ditargetkan pada tahun 2025.

- b. Proyek KPBU Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW Pada Bendungan Tiga Dihaji dengan total nilai investasi sebesar 1,12 Triliun. Status proyek saat ini yaitu *Request for Proposal*, dimana sedang dilakukan penyusunan dokumen penawaran oleh peserta pelelangan. Penetapan pemenang lelang dan penandatanganan perjanjian KPBU ditargetkan akan dilakukan pada tahun 2024, FC dan konstruksi pada tahun 2025.
- c. PLTM Karalloe dengan total nilai investasi sebesar Rp127 Miliar. Status proyek saat ini yaitu evaluasi Pra FS. Proyek ini diusulkan menjadi proyek penugasan kepada BUMN di tahun 2024.
- d. PLTM Temef dengan total nilai investasi sebesar Rp55 Miliar. Status proyek saat ini yaitu evaluasi Pra FS. Proyek ini diusulkan menjadi proyek penugasan kepada BUMN di tahun 2024.
- e. Penyediaan Infrastruktur Bendungan dan PLTA di Papua dengan total nilai investasi sebesar Rp18,29 Triliun. Status proyek saat ini yaitu penyusunan dokumen FS yang ditargetkan selesai pada bulan Februari 2024.
- f. PLTM Leuwikeris dengan total nilai investasi sebesar Rp225 Miliar. Status proyek saat ini yaitu evaluasi dokumen FS.

5. Pengamanan Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa

Dalam rangka mengurangi dampak banjir rob serta penurunan muka tanah yang sering terjadi kota Semarang, DJPI turut berkontribusi dalam pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang akan terintegrasi dengan konstruksi tanggul laut. Saat ini, Jalan Tol Semarang-Demak telah beroperasi pada Seksi 2 (porsi BUJT). Pada Seksi 1 (porsi dukungan pemerintah) saat ini dalam tahap konstruksi, dengan rincian: (a) Seksi 1A : *Elevated Toll Road* + SOP dengan progres konstruksi sebesar 14,40%, ditargetkan selesai pada April 2025, (b) Seksi 1C : Kolam Retensi dengan progres konstruksi sebesar 3,90%, ditargetkan selesai pada Juni 2025, dan

(c) Seksi B : *Mainroad* terintegrasi tanggul laut dengan progres konstruksi sebesar 2,80%, ditargetkan selesai pada Februari 2026.

6. 18 Waduk Multiguna

Dalam mendukung pencapaian *Major Project* 18 Waduk Multiguna pada RPJMN 2020-2024, DJPI turut berkontribusi untuk pembangunan Bendungan dengan skema KPBU. Dari 6 bendungan KPBU yang termasuk *Major Project* 18 Waduk Multiguna pada RPJMN, terdapat 1 proyek yaitu Bendungan Merangin yang saat ini dilaksanakan oleh DJPI. Bendungan Merangin memiliki nilai investasi Rp7,85 Triliun, dan saat ini dalam proses penyusunan dokumen *Final Business Case* (FBC). Pembangunan Bendungan Merangin ini bertujuan untuk mengairi irigasi seluas 5.244 Ha, penyedia air baku untuk air minum hingga 0,565 m³/s, mereduksi banjir sebesar 200 m³/s, PLTA sebesar 90-107,5 MW, dan sebagai destinasi pariwisata. Tahap transaksi ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2024.

Selain proyek Bendungan Merangin, DJPI juga saat ini tengah menyiapkan proyek waduk multiguna lainnya yaitu Bendungan Bodri. Bendungan Bodri memiliki nilai investasi Rp1,74 Triliun, dan saat ini dalam proses pemenuhan *Readiness Criteria* untuk masuk tahap Transaksi. Tujuan pembangunan Bendungan Bodri yaitu untuk menyuplai kebutuhan air baku di Kabupaten Kendal sebesar 0,497 m³/dt, menambah pasokan air irigasi untuk meningkatkan intensitas tanam Daerah Irigasi Bodri seluas 8.665 Ha, mereduksi debit banjir (Q50) di kali Bodri di Kabupaten Kendal sebesar 10,23% (64,81 m³/dt) dan memiliki potensi PLTM sebesar 3,2 MW. Tahap transaksi ditargetkan dilaksanakan pada tahun 2024.

7. Jalan Trans Papua Merauke – Sorong

Dalam rangka meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas bagi wilayah pedalaman, terutama wilayah Pegunungan Tengah Papua, DJPI turut berkontribusi terhadap pembangunan Jalan Trans Papua pada Ruas Jayapura – Wamena (segmen Mamberamo – Elilim) melalui skema KPBU. Selain itu, pembangunan Jalan Trans Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan nasional sesuai RPJMN 2020-2024 dan mencapai target visium

Kementerian PUPR. Jalan Trans Papua Mamberamo – Elilim sepanjang 50,14 km dengan biaya investasi Rp3,52 Triliun. Saat ini tengah berproses untuk penyampaian usulan penetapan pemenang kepada Menteri PUPR.

Penetapan pemenang lelang ditargetkan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2024, dan konstruksi pada Q4 2024.

8. Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah)

Dalam rangka meningkatkan akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%, DJPI turut berkontribusi terhadap pembangunan SPAM melalui skema KPBU. Adapun informasi terkait proyek KPBU SPAM tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33 Proyek KPBU SPAM yang Mendukung *Major Project* Akses Air Minum Perpipaian (10 Juta Sambungan Rumah) pada RPJMN 2020-2024

No	Nama Proyek KPBU	Status Tahapan
1	SPAM Regional Karian Barat + SPAM Regional Sindangheula	Pra FS
2	SPAM Bitung	OBC
3	SPAM Regional Bimatara	OBC
4	SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II	Evaluasi FS
5	SPAM Regional Ayung I	Penyusunan FS
6	SPAM Batam - Bintan	Evaluasi FS
7	SPAM Regional Sinumbra	Evaluasi FS
8	SPAM Regional Karian-Serpong	<i>Financial Close</i>

9. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh. DJPI turut berkontribusi dalam pembangunan Rumah Susun dengan skema KPBU. Adapun informasi terkait proyek KPBU tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.34.

Tabel 4.34 Proyek KPBU Rumah Susun yang Mendukung *Major Project* RPJMN: Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

No	Nama Proyek KPBU	Output (Unit)	Status Tahapan
1	Rusun Kota Surabaya-Medokan Ayu	240	Studi Pendahuluan
2	Rusun Kota Surabaya-Tambak Wedi	300	OBC
3	Rusun TOD Pasar Jumat	1.220	OBC
4	Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung	1.852	Finalisasi FBC
5	Rusun Sewa Karawang Spuur	580	Finalisasi FBC

4.3.4 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Unit Organisasi/Instansi Sejenis (*Benchmarking*)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja DJPI, analisis perbandingan (*benchmarking*) capaian kinerja dengan Unit Organisasi/Instansi yang memiliki kesamaan Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), maupun Sasaran Kegiatan (SK) perlu dilakukan. Melalui perbandingan ini, capaian dan praktik terbaik dari Unit Organisasi/Instansi pembanding dapat diadaptasi dan diterapkan dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam hal ini DJPI melakukan perbandingan kinerja (*benchmarking*) kepada:

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK)

Perbandingan kinerja dilakukan terhadap DJCK, karena DJPI dan DJCK turut berkontribusi dalam pencapaian SS-3 Kementerian PUPR yakni Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau. Dalam mencapai kinerja SS-3 tersebut, masing-masing Unit Organisasi (DJPI dan DJCK) menjabarkannya pada Sasaran Program yang sama yaitu "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman" sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Perbandingan capaian kinerja tersebut berdasarkan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 4.35.

Tabel 4.35 Perbandingan Capaian Kinerja DJPI dengan DJCK

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Unit Organisasi	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
SS. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau						
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman	DJPI	Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	235,57	235,57
		DJCK	Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan <i>smart living</i>	88,93	84,65	95,19

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023 No.02/BA/Dp/2024

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan terhadap pemenuhan Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman, bahwa **capaian kinerja DJPI jauh lebih tinggi daripada capaian DJCK**. DJPI menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 235,57% dari target 100,00%, sehingga didapatkan kinerja 235,57%. Artinya DJPI mampu melampaui target fasilitas dan bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Sementara DJCK memiliki capaian realisasi sebesar 84,65% dari target 88,93%. Meskipun DJCK tidak mencapai target yang ditetapkan, namun capaian kerjanya cukup baik yaitu mencapai 95,19%. Secara keseluruhan kedua unit organisasi ini telah berkontribusi positif dalam mendukung Sasaran Strategis Kementerian PUPR. Evaluasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja kedua unit organisasi perlu dilakukan agar dapat mencapai target di masa yang akan datang.

Setelah diteliti lebih lanjut, terdapat perbedaan jumlah komponen indikator pembentuk perhitungan capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan antara DJPI dan DJCK. Berdasarkan Renstra, perhitungan IKSP tersebut berdasarkan jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dan fasilitas pembiayaan perumahan

dibandingkan dengan target (program FLPP, SMF, dan Tapera). Sementara DJCK menghitung capaian IKSP tersebut berdasarkan rerata gabungan dari tujuh indikator, yaitu: (1) Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak, (2) Persentase rumah tangga dengan akses air limbah domestik layak dan aman, (3) Persentase rumah tangga dengan akses sampah yang terkelola di perkotaan, (4) Persentase luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya, (5) Persentase kab/kota yang terfasilitasi implementasi penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib dan andal, (6) Persentase inisiasi penerapan bangunan gedung hijau, dan (7) Persentase sarana prasarana strategis yang ditingkatkan kualitasnya.

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

Selain melakukan perbandingan kinerja dengan Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR, DJPI juga melakukan perbandingan kinerja dengan Unit Organisasi di Kementerian lain yang memegang peran strategis di bidang pembiayaan infrastruktur melalui KPBU dan/atau pembiayaan kreatif yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Kementerian Keuangan.

Dalam hal ini, capaian yang akan dibandingkan adalah capaian kinerja KPBU. Perbandingan dilakukan berdasarkan capaian kinerja KPBU DJPI tahun 2023 dengan capaian DJPPR tahun 2022. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja DJPPR tahun 2023 masih dalam perhitungan.

Sebagai langkah awal, perbandingan dilakukan terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terkait KPBU pada Kementerian PUPR yang bersesuaian dengan Kementerian Keuangan. Perbedaan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.36.

Tabel 4.36 Perbandingan Sasaran dan Indikator Kinerja KPBU Kementerian PUPR dengan Kementerian Keuangan

 Kementerian PUPR	 Kementerian Keuangan
<p>Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</p> <p>Indikator Kinerja: Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif</p>	<p>Sasaran Strategis: Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan produktif dalam mendukung Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional</p>
<p>Sasaran Program (DJPI) Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</p> <p>Indikator Kinerja: Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif</p>	<p>Indikator Kinerja Utama DJPPR: Indeks Pemenuhan Target Pembiayaan dengan Biaya dan Risiko yang Terkendali</p>

Capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi Kementerian PUPR dihitung berdasarkan kinerja KPBU DJPI melalui capaian Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif.

Dalam hal ini, capaian kinerja Tingkat ketersediaan KPBU tersebut dihitung dengan menjumlahkan Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan. *Cut off* atau batasan Proyek KPBU yang siap dikerjasamakan adalah proyek yang telah menyelesaikan

dokumen FBC bagi Proyek KPBU *solicited*, atau *Feasibility Study*/Studi Kelayakan bagi Proyek KPBU *unsolicited*.

Pada DJPPR, IKU yang berkaitan dengan KPBU yaitu Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali dalam hal ini akan dibandingkan dengan indikator kinerja DJPI. Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali adalah indikator untuk mengukur tingkat akurasi pemenuhan target pembiayaan dengan dua komponen (utang dan non-utang) pada aspek nominal, biaya, dan risiko. Komponen non utang salah satunya melalui KPBU. Terkait capaian KPBU, diukur melalui target nominal pengadaan KPBU.

Target nominal pengadaan KPBU adalah target nilai nominal proyek baru yang telah menyelesaikan proses penandatanganan perjanjian KPBU. Dengan diselesaikannya penandatanganan perjanjian KPBU, maka terdapat kepastian sumber pembiayaan proyek diluar beban APBN. Perbandingan capaian kinerja DJPI dengan DJPPR terkait KPBU adalah sebagai berikut. Perbandingan capaian kinerja KPBU antara DJPI dengan DJPPR dapat dilihat pada Tabel 4.37.

Tabel 4.37 Perbandingan Capaian Kinerja terkait KPBU antara DJPI dengan DJPPR

Indikator Kinerja	Target (%)	Capaian (%)	Kinerja (%)
DJPI			
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100	98,95	98,95
Capaian Proyek KPBU = 13 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp179,95 Triliun			
Indeks pemenuhan target pembiayaan dengan biaya dan risiko yang terkendali	100	113,68	113,68
Capaian Proyek KPBU = 1 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp1,99 Triliun			

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI 2023 No.02/BA/Dp/2024, Laporan Kinerja DJPPR Tahun 2022

Berdasarkan perbandingan kinerja pada Tabel 4.37, kinerja KPBU DJPI lebih rendah dari DJPPR, namun sudah menunjukkan kinerja baik. Akan tetapi, tingginya kinerja DJPPR sebagaimana pada tabel di atas belum menggambarkan secara langsung kinerja KPBU pada DJPPR. Hal ini karena komponen pembentuk nilai capaian tersebut tidak sepenuhnya berkaitan langsung dengan KPBU, beda halnya dengan DJPI.

Apabila capaian tersebut dilihat dari jumlah proyek dan nilai investasi, DJPI lebih tinggi daripada DJPPR, yaitu berhasil mencapai 13 proyek senilai Rp179,95 Triliun. Sementara DJPPR hanya 1 proyek yaitu *Proving Ground* Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi senilai Rp1,99 Triliun. Dari perbandingan (*benchmarking*) capaian kinerja tersebut, DJPI dapat mengadaptasi DJPPR terkait *cut off* atau batasan tahapan proyek yang dihitung sebagai capaian yaitu Penandatanganan Perjanjian Kerjasama. Penandatanganan kerja sama proyek KPBU (PKS) menandakan komitmen awal penyediaan infrastruktur dengan pembiayaan alternatif sehingga mengurangi beban APBN.

4.3.5 Analisis Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Anggaran merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di suatu institusi. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran perlu dilakukan secara berkala. Salah satu bentuk analisis yang penting dilakukan adalah perbandingan realisasi anggaran tahun berjalan (2023) dengan tahun sebelumnya. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat apakah terdapat peningkatan, penurunan, atau stagnansi dalam hal penyerapan anggaran. Selain itu, dapat diketahui apakah alokasi anggaran sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan. Hasil analisis ini selanjutnya dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam perencanaan anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, diharapkan organisasi dapat meningkatkan kinerjanya secara bertahap dan berkelanjutan. Perbandingan realisasi anggaran pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 4.38.

Tabel 4.38 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Keterangan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Pagu (Rp Ribu)	643.609.701	791.558.325	792.617.174	243.192.037
Realisasi (Rp Ribu)	288.423.015	759.586.409	676.200.289	234.351.033
Kinerja (%)	44,81	95,96	85,31	96,36

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Pagu anggaran DJPI tahun 2023 sebesar Rp243 Miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp792 Miliar. Terjadi penurunan sebesar Rp549 Miliar atau 69,00%. Meskipun pagu anggaran turun signifikan, realisasi anggaran DJPI tahun 2023 justru lebih tinggi dibanding tahun 2022, yaitu 96,36% vs 85,31%. Capaian realisasi anggaran DJPI tahun 2023 merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan optimasi kinerja DJPI dalam mengelola anggaran yang tersedia meskipun jumlahnya lebih terbatas di tahun 2023, dan dapat mencapai *output* sesuai target (peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dibanding tahun sebelumnya).

4.4 Realisasi Anggaran

Pada subbab ini akan dijelaskan realisasi anggaran DJPI tahun 2023 beserta analisisnya meliputi penyerapan anggaran pada masing-masing Unit Kerja, berdasarkan sumber dana, program, jenis belanja.

4.4.1 Analisis Penyerapan Anggaran

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan mengelola dua mata anggaran, yaitu BA.033 dan BA.999.07. Anggaran pada BA.033 digunakan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Sementara BA 999.07 yang dikelola oleh Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan digunakan untuk Program Pengelolaan Subsidi yaitu Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) dan Subsidi Bunga Kredit. Rincian realisasi anggaran beserta analisisnya akan diuraikan di bawah ini.

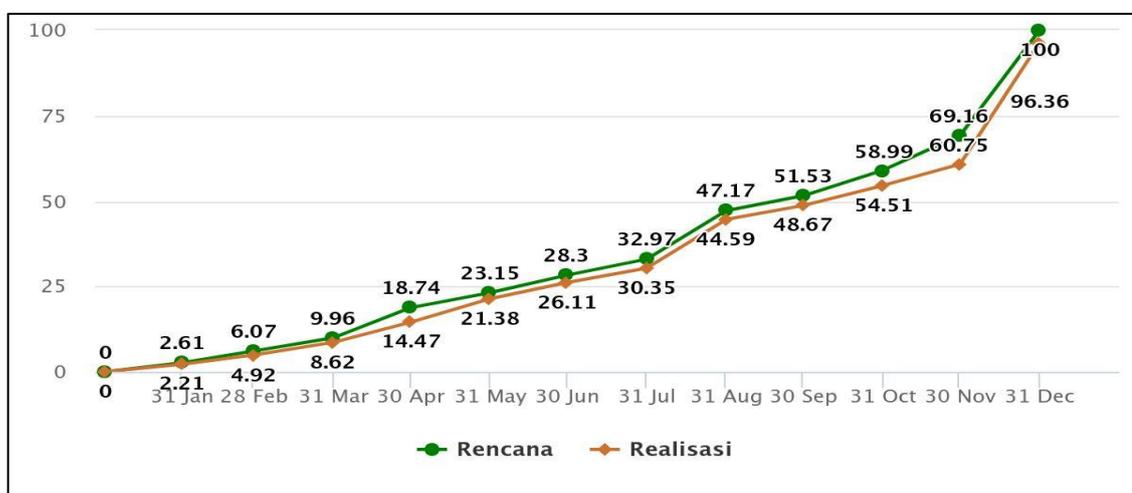
A. BA. 033

Alokasi awal Pagu Anggaran DJPI tahun 2023 pada BA.033 adalah sebesar Rp165.919.391.000. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terdapat perubahan pagu anggaran yang disebabkan karena adanya penambahan alokasi anggaran yang bersumber dari PHLN, realokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2023 yang terblokir (*Automatic Adjustment*) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, terdapat *drop loan* dan revisi anggaran Bantuan Biaya Administrasi (BBA). Dengan

demikian, pada akhir tahun 2023 total pagu anggaran DJPI pada BA.033 yaitu sebesar Rp243.192.037.000. Berdasarkan data *ie-Monitoring* Kementerian PUPR yang dapat diakses pada <https://iemon.pu.go.id> tanggal 10 Januari 2024, realisasi anggaran DJPI tahun 2023 sebesar **Rp234.351.034.000** atau setara **96,36%**. Capaian ini menunjukkan kinerja DJPI yang cukup baik dalam mengeksekusi anggaran yang telah dialokasikan. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp8.841.004.000 (-3,64%). Deviasi tersebut disebabkan karena:

1. Terdapat sisa anggaran dari kegiatan kontraktual sebesar Rp 1,3 Miliar.
2. Terdapat sisa anggaran pada gaji dan tunjangan sebesar Rp546.491.000 dimana salah satu penyebabnya yaitu pembayaran gaji 32 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) DJPI di KPPN sebesar Rp127.141.625 (gaji PPPK yg dialokasikan untuk pembayaran 3 bulan jadi hanya 1 bulan).
3. Pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Biaya Administrasi (BBA) terealisasi Rp52.513.355.000 (93,82%) atau 13.160 unit dengan pagu Rp55.972.000.000, dan terdapat blokir sebesar Rp3.458.644.000.

Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran DJPI tahun 2023 sudah cukup optimal. Namun tetap diperlukan upaya untuk memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan agar dapat diserap dan dieksekusi dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Perbandingan rencana dan realisasi anggaran tahun 2023 tiap bulan dapat dilihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Perbandingan Rencana dan Realisasi Anggaran Tiap Bulan

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 10 Januari 2024

Penyerapan anggaran pada masing-masing Unit Kerja, berdasarkan sumber dana, program, dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

1) Realisasi Anggaran Tahun 2023 Tiap Unit Kerja

Realisasi anggaran pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan DJPI dapat dilihat pada Tabel 4.39. Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja anggaran tertinggi yaitu pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman dengan mencapai 99,14%, dan diikuti oleh Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan sebesar 98,98%, serta realisasi terendah pada Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan sebesar 92,78%.

Tabel 4.39 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Tiap Unit Kerja di lingkungan DJPI

Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi	Kinerja
	(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	68.327.041	67.500.644	98,79%
Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	20.398.894	20.190.980	98,98%
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	11.199.643	10.952.078	97,79%
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	32.585.069	32.200.700	98,82%
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	12.800.000	12.689.637	99,14%
Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan	97.881.390	90.816.994	92,78%
Total	243.192.037	234.351.033	96,36%

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 10 Januari 2024

2) Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber dana DJPI pada tahun 2023 berasal dari RPM (Rupiah Murni Pemerintah) dan PHLN (Pinjaman/Hibah Luar Negeri). Realisasi anggaran di DJPI berdasarkan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 4.40.

Tabel 4.40 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Kinerja (%)
RPM	214.891.391	206.423.151	96,06
PHLN	28.300.646	27.927.882	98,68
Total	243.192.037	234.351.033	96,36

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 10 Januari 2024

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran dari RPM mencapai 96,06% dan realisasi anggaran dari PHLN mencapai 98,68%. Realisasi anggaran RPM lebih rendah dibandingkan realisasi PHLN. Hal ini mengindikasikan masih terdapat sisa anggaran RPM yang belum terserap.

3) Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program

Realisasi anggaran pada tahun 2023 berdasarkan program yang ada di DJPI dapat dilihat pada Tabel 4.41. Realisasi anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebesar 92,17%. Sementara Program Dukungan Manajemen memiliki realisasi anggaran yang lebih tinggi yaitu sebesar 98,63%. Secara keseluruhan, penyerapan anggaran pada Program Dukungan Manajemen sudah sangat baik. Namun, belum optimalnya realisasi anggaran pada Program Perumahan perlu menjadi perhatian DJPI. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan perencanaan program agar penyerapan anggarannya lebih maksimal di masa mendatang. Misalnya dengan memperbaiki ketepatan sasaran program, perencanaan program yang matang, hingga memperbaiki jadwal pelaksanaan. Dengan demikian diharapkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Program Perumahan dapat meningkat secara signifikan di tahun anggaran berikutnya.

Tabel 4.41 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Program

No	Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Kinerja (%)
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033	78.534.648	92,17
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033	78.534.648	92,17
II	WA	Program Dukungan Manajemen	157.988.004	155.816.386	98,63
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	73.396.881	72.536.007	98,83
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	19.398.894	19.191.105	98,93
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	65.192.229	64.089.275	98,31
TOTAL			243.192.037	234.351.034	96,36

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI Tahun 2023

4) Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Realisasi anggaran pada tahun 2023 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 4.42. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2023 tertinggi ada pada jenis belanja modal dengan mencapai 98,55%, dan diikuti belanja pegawai sebesar 98,33%, dan realisasi terendah yaitu belanja barang sebesar 96,03%. Rendahnya realisasi belanja barang perlu dilakukan analisis penyebabnya apakah karena keterlambatan pengadaan, kesalahan perencanaan, atau faktor lainnya. Hal ini guna meningkatkan realisasi anggaran di tahun yang akan datang.

Tabel 4.42 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Tahun 2023		
	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Kinerja (%)
Belanja Pegawai	32.701.169.000	32.154.678.369	98,33
Belanja Barang	207.648.670.000	199.395.266.267	96,03
Belanja Modal	2.842.198.000	2.801.088.932	98,55
Total	243.192.037	234.351.033	96,36

Sumber: <https://iemon.pu.go.id>, tanggal 10 Januari 2024

Berdasarkan Tabel 4.42, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2023 tertinggi ada pada jenis belanja modal dengan mencapai 98,55%, dan diikuti belanja pegawai sebesar 98,33%, dan realisasi terendah yaitu belanja barang sebesar 96,03%. Rendahnya realisasi belanja barang perlu dilakukan analisis penyebabnya apakah karena keterlambatan pengadaan, kesalahan perencanaan, atau faktor lainnya. Hal ini guna meningkatkan realisasi anggaran di tahun yang akan datang.

B. BA.999.07

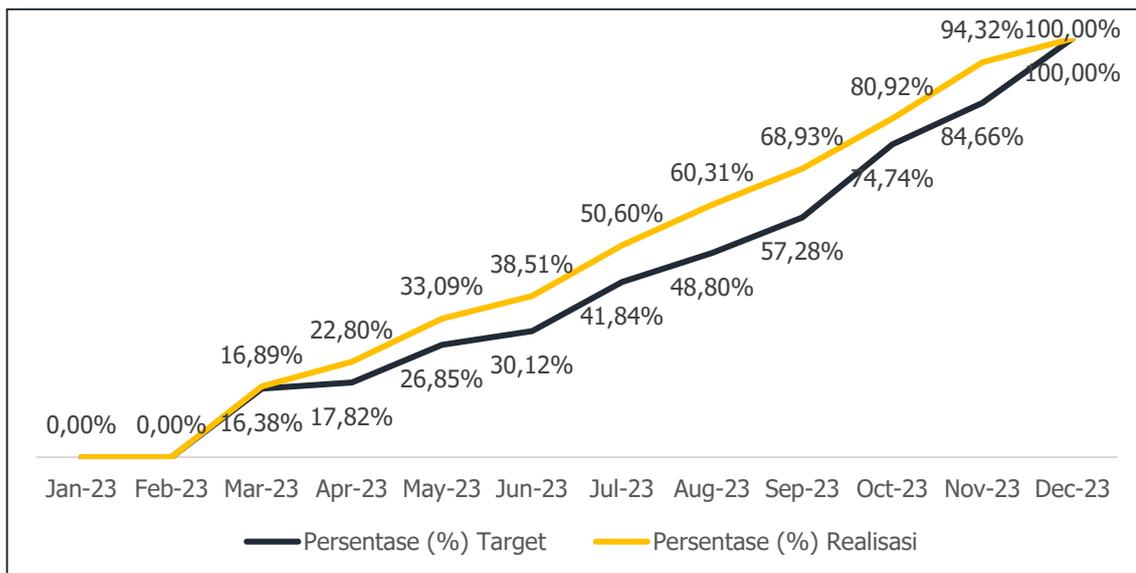
Pagu Anggaran DJPI tahun 2023 pada BA.999.07 adalah sebesar Rp4.352.520.000.000. Anggaran tersebut digunakan untuk:

1. Pembayaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar Rp895.000.000.000 untuk 220.000 unit.
2. Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) sebesar Rp3.457.520.000.000 untuk 754.004 unit (pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020, tidak ada akad baru sejak 2021)

Total realisasi anggaran DJPI pada BA.999.07 adalah sebesar Rp **Rp4.352.520.000.000** atau setara (100%) dari pagu yang dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:

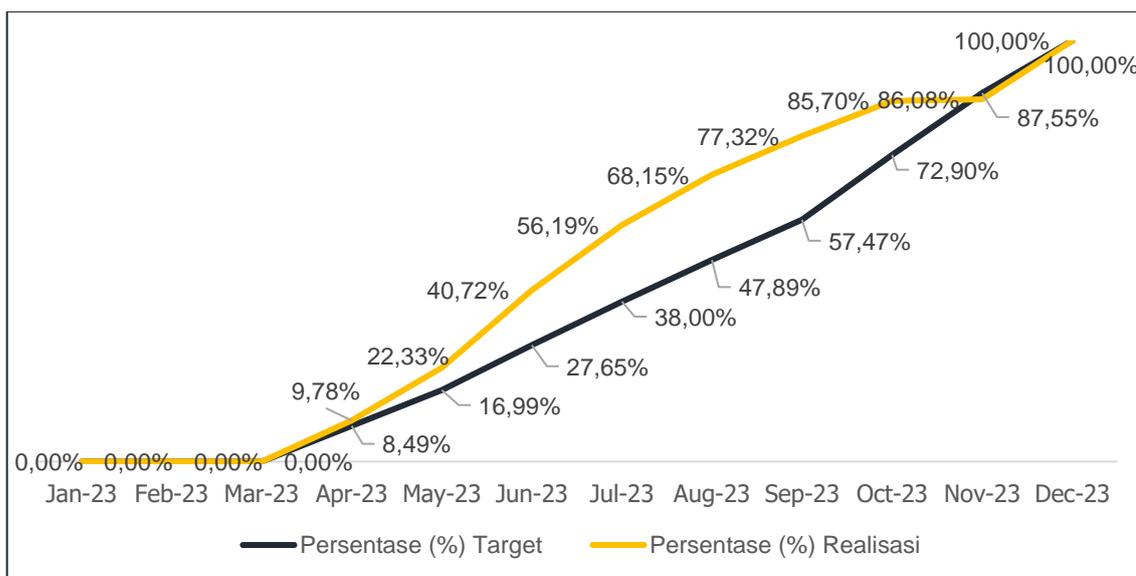
1. Realisasi SBUM sebesar Rp895.000.000.000 untuk 220.000 unit (target terealisasi 100%).
2. Realisasi SBK sebesar Rp3.457.520.000.000 untuk 750.497 unit (target rupiah terealisasi 100%, dan realisasi target unit sebesar 99,54%).

Perbandingan target dan realisasi SBUM dan SBK tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 4.4 dan 4.5.



Gambar 4.4 Target vs Realisasi SBUM Tahun 2023

Sumber: Satker DJPI, 31 Desember 2023



Gambar 4.5 Target vs Realisasi SBK Tahun 2023

Sumber: Satker DJPI, 31 Desember 2023

4.4.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

DJPI telah menerapkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun anggaran.

1) Efisiensi SDM

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan pegawai ASN di DJPI adalah sebanyak 490 orang. Namun, jumlah ASN (PNS dan PPPK) yang tersedia hanya

242 orang. Dalam rangka menutupi kekurangan tersebut, perlu didukung oleh pegawai honorer sebanyak 88 orang dan Tenaga Pendukung Individual sebanyak 93 orang. Total persentase pegawai ASN di DJPI saat ini jika dibandingkan dengan kebutuhan adalah sebesar 86,33%.

Dengan jumlah pegawai yang terbatas tersebut, DJPI mampu meraih capaian kinerja program yang cukup tinggi. Capaian kinerja IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan sebesar 235,57% dari target 100%. Sementara IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif sebesar 98,95%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan upaya optimalisasi SDM dan anggaran yang dilakukan DJPI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja. Meskipun dengan keterbatasan sumber daya, DJPI mampu mencapai kinerja baik di atas target yang ditetapkan. Hal ini penting untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang.

2) Efisiensi Anggaran

Pada program Perumahan dan Kawasan Permukiman, DJPI menunjukkan efisiensi yang baik dalam pencapaian IKSP Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran program sebesar 92,17% berhasil mencapai kinerja IKSP sebesar 235,57%. Dengan membandingkan capaian IKSP terhadap realisasi anggaran program, didapatkan **nilai efisiensi** sebesar **255,58%**. Angka ini membuktikan DJPI mampu menghasilkan *output* kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang digunakan, dan telah menjalankan program secara sangat efisien.

Pada program Dukungan Manajemen, capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif adalah sebesar 98,95%. Sementara realisasi anggaran pada program tersebut

adalah sebesar 98,86%. Dengan membandingkan capaian IKSP terhadap realisasi anggaran program, diperoleh **nilai efisiensi** sebesar **100,09%**. Hal ini berarti DJPI telah menggunakan anggaran program Dukungan Manajemen secara efisien dalam mencapai indikator kinerja sasaran program. Berikut beberapa upaya yang dilakukan DJPI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran:

1. Melakukan realokasi anggaran Kementerian/Lembaga TA. 2023 yang terblokir (*Automatic Adjustment*) kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp6.000.000.000.
2. Melakukan *drop loan* sebesar Rp 9.815.759.000.
3. Melakukan revisi dan penajaman komponen Bantuan Biaya Administrasi (BBA) dalam anggaran DJPI. Hal ini guna memastikan anggaran BBA tepat guna mendukung operasional DJPI.

4.5 Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja

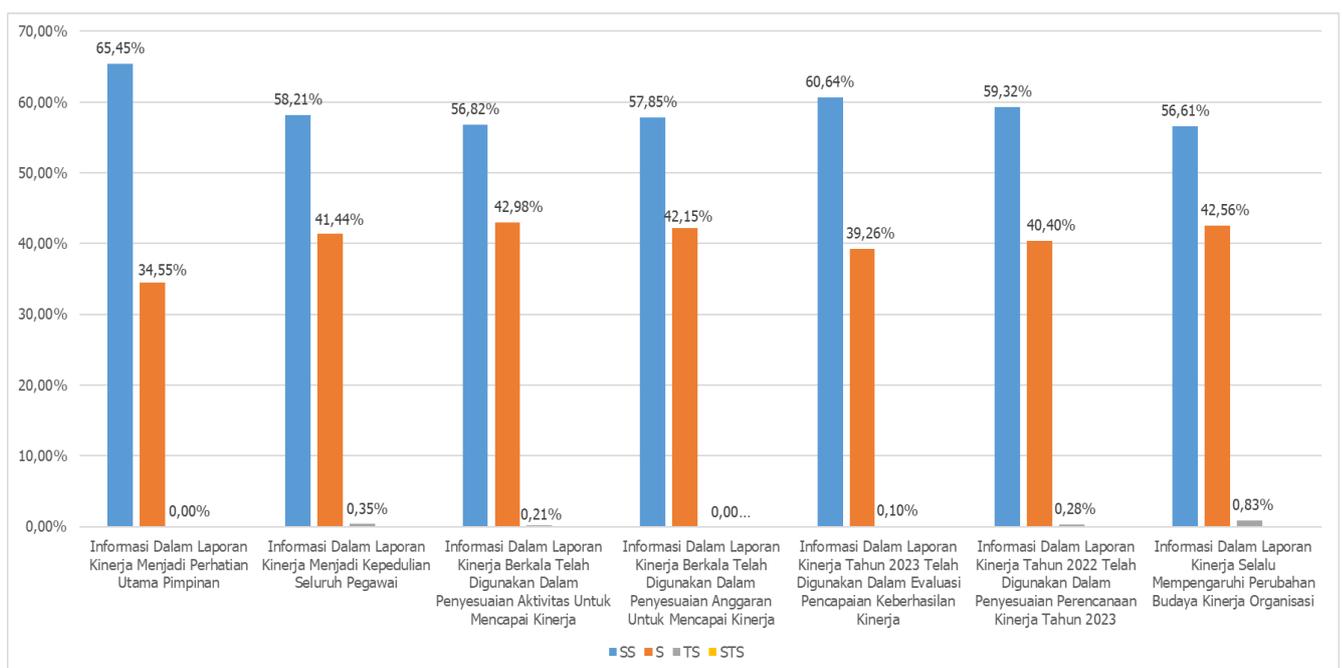
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Kementerian PAN dan RB akan melakukan evaluasi terkait sejauh mana informasi dalam Laporan Kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai, serta telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan dalam mempengaruhi budaya kerja. Dalam menilai pemanfaatan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023, telah dilakukan survei melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DJPI. Terdapat tujuh indikator untuk menentukan pemanfaatan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan.
2. Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.
3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja.
5. Informasi dalam laporan kinerja tahun 2023 telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
6. Informasi dalam laporan kinerja tahun 2022 telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun 2023.
7. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Tiap indikator memiliki komponen pertanyaan terkait informasi isu strategis, rencana kerja, capaian kinerja, realisasi anggaran, dan permasalahan dan rekomendasi. Opsi penilaian dari kuesioner tersebut yaitu "Sangat Sesuai", "Sesuai", "Tidak Sesuai", dan "Sangat Tidak Sesuai".

Berdasarkan hasil rekapitulasi pengisian kuesioner, terdapat 121 responden yang mengisi survei terdiri dari Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Jafung Madya, Jafung Muda, Jafung Pertama, dan Pelaksana di lingkungan DJPI. Hasil survei mengenai pemanfaatan Laporan Kinerja di lingkungan DJPI dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4.6 Hasil Survei Pemanfaatan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023
Sumber: Surat Kepala BPIW No. PR.02.04-kw/03 tanggal 11 Januari 2023

Berdasarkan hasil survei pada Gambar 4.6, dapat disimpulkan bahwa secara umum (lebih dari 50%) responden menyatakan ketujuh indikator pemanfaatan Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023 adalah sangat sesuai.

4.6 Penghargaan Atas Kinerja

Beberapa penghargaan dari pihak luar instansi Kementerian PUPR yang telah didapatkan oleh DJPI adalah:

1. *PPP Promotor of The Year*

DJPI, Kementerian PUPR meraih penghargaan *PPP Promotor of The Year* dari PT. PII. Penghargaan tersebut diberikan pada acara Puncak HUT PT.PII ke-13 di Aula Mezzanine Djuanda I Kementerian Keuangan RI pada hari Rabu, 01 Maret 2023.

Penghargaan tersebut merupakan penghargaan untuk bidang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP). Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR mengatakan bahwa terdapat 20 dari 48 proyek yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan nilai investasi lebih dari Rp200 Triliun.



Gambar 4.7 Penghargaan DJPI Sebagai *PPP Promotor of The Year*

2. Mitra Strategis *Real Estate Indonesia (REI)*

DJPI, Kementerian PUPR mendapatkan penghargaan sebagai Mitra Strategis dari REI atas upaya yang dilakukan untuk memberikan kepastian harga jual rumah subsidi tahun 2023 dan 2024. Penghargaan dimaksud diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum DPP REI kepada Dirjen PI pada acara Peluncuran REI *Investment Center* Apresiasi Kepada Mitra Strategis REI di Jakarta, 27 Juli 2023.



Gambar 4.8 Penghargaan DJPI Sebagai Mitra Strategis REI

3. Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP)

DJPI, Kementerian PUPR melalui Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan (Direktorat PPIJJ) resmi mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tanggal 29 November 2023 dari PT. Mutuagung Lestari Tbk. Dalam hal ini, Direktorat PPIJJ merupakan *pilot project* di DJPI, dan ditargetkan pada tahun 2024 semua Unit Kerja di DJPI telah tersertifikasi. Dengan telah tersertifikasinya SNI ISO 37001:2016 SMAP, Direktorat PPIJJ diharapkan mampu mengimplementasikan penguatan sistem manajemen organisasi guna mencegah praktik korupsi, menghindari risiko permasalahan

hukum, ataupun mengontrol konflik kepentingan dalam upaya pencapaian kinerja pelaksanaan penyiapan pembiayaan infrastruktur jalan dan jembatan. Sertifikasi ISO ini juga dilakukan dalam rangka melaksanakan arahan Menteri PUPR. Sebagai tambahan informasi, Direktorat PPIJJ adalah penerima sertifikat SNI ISO 37001:2016 ke 41 di lingkungan Kementerian PUPR.



Gambar 4.9 Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 SMAP di DJPI

4. *Outstanding Affordable Housing Innovation*

DJPI, Kementerian PUPR melalui Direktorat Pelaksanaan Perumahan pada tahun 2023 telah mendapatkan penghargaan sebagai *Outstanding Affordable Housing Innovation* yang diberikan oleh *Habitat for Humanity International, Asia-Pacific* pada tanggal 27 Oktober 2023, di Sowun, Korea Selatan. Penghargaan ini membuktikan bahwa Program BP2BT merupakan salah satu inovasi program pembiayaan perumahan yang berkualitas dan diakui secara Internasional.



Gambar 4.10 Penghargaan *Outstanding Affordable Housing Innovation*

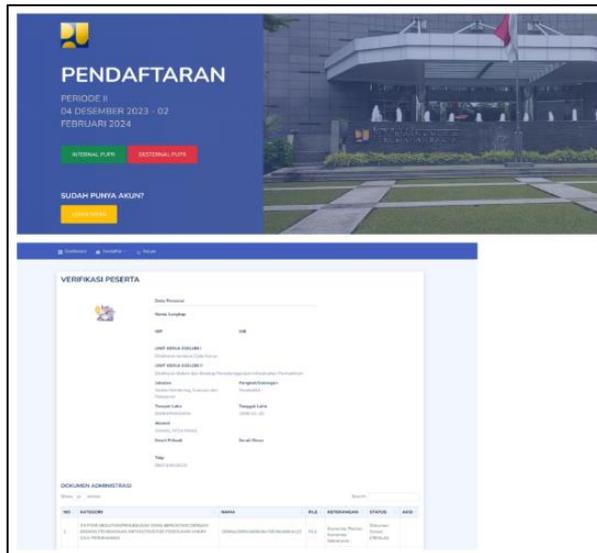
4.7 Inovasi dan/atau Kinerja Lain

Inovasi atau kinerja lain yang dilakukan DJPI untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi Penyesuaian/ *Inpassing* Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (JF API)

Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme, peningkatan kinerja organisasi, dan menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 44 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang disusun oleh DJPI, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional tersebut, DJPI membangun sistem/aplikasi untuk membantu dalam proses penyesuaian/*inpassing* kedalam jabatan fungsional tersebut.

Aplikasi ini digunakan untuk pelaksanaan proses *inpassing* JF API yang dilakukan oleh internal Kementerian PUPR maupun Pemerintah Daerah, menilai dan memantau proses *inpassing* berdasarkan dokumen persyaratan peserta. Aplikasi dapat di akses melalui tautan: ***inpassing.djpi.id***. Sebagai informasi, saat ini telah dibuka pendaftaran JF API melalui *inpassing* periode kedua yaitu tanggal 4 Desember 2023 s.d. 2 Februari 2024.



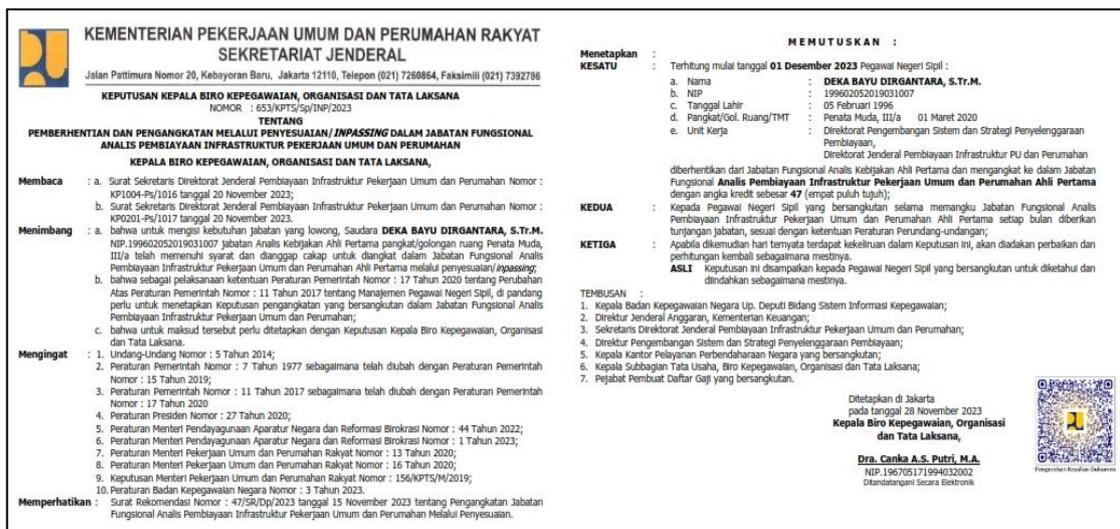
Gambar 4.11 Aplikasi *Inpassing* JF API

2. Pengangkatan JF API melalui Penyesuaian *Inpassing*

Menindaklanjuti proses pendaftaran dan evaluasi JF API melalui penyesuaian/*inpassing* periode satu (14 Agustus s.d. 13 Oktober 2023), pada tanggal 28 November 2023 DJPI melakukan pengangkatan kedalam JF API dengan jumlah peserta yang lulus dan mendapatkan rekomendasi pengangkatan sebanyak 36 orang dengan rincian yang dapat dilihat pada Tabel 4.43.

Tabel 4.43 Pengangkatan JF API Tahun 2023

No	Jabatan-Jenjang	Instansi	Terbit Rekomendasi	Terbit SK JF API
1	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Madya	Kementerian PUPR	6	5
2	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Muda	Kementerian PUPR	26	23
3	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Ahli Pertama	Kementerian PUPR	4	2
Jumlah			36	30



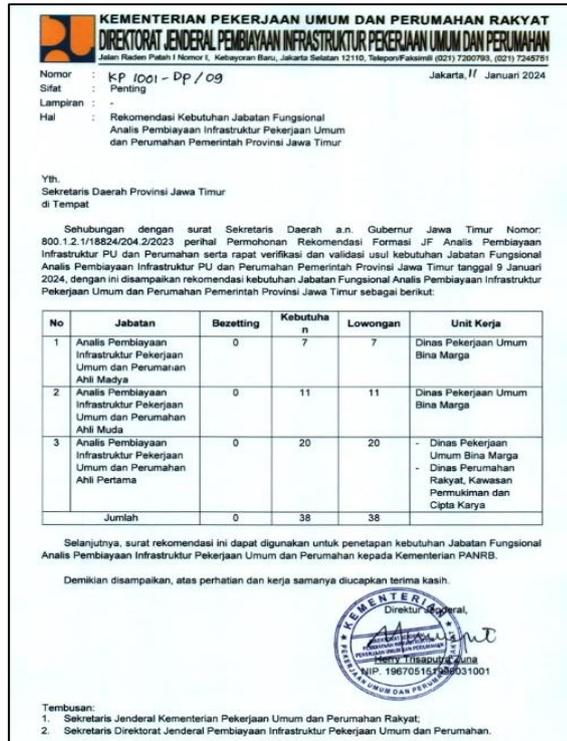
Gambar 4.12 Surat Keputusan Pengangkatan JF API

3. Fasilitas Penyusunan Kebutuhan Formasi JF API

Pada tahun 2023, DJPI melakukan fasilitasi penerbitan rekomendasi selama mendampingi kebutuhan JF API di Kementerian PUPR maupun instansi Pemerintah lainnya. Fasilitas pemberian rekomendasi tersebut dilakukan berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR maupun instansi Pemerintah lainnya. Rekomendasi kebutuhan JF API didasarkan pada beban kerja instansi pemerintah terkait pelaksanaan tugas pembiayaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan.



Gambar 4.13 Pemberian Rekomendasi Kebutuhan JF API Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh DJPI



Gambar 4.14 Surat Permohonan Rekomendasi Formasi JF API dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Rekomendasi kebutuhan yang sudah diterbitkan oleh DJPI dapat dilihat pada Tabel 4.44.

Tabel 4.44 Daftar Penerbitan Rekomendasi Kebutuhan Formasi JF API Tahun 2023

No	Instansi	Kebutuhan	Keterangan
1	Kementerian PUPR	357	Telah mendapatkan persetujuan kebutuhan dari Menpan RB
2	Otorita IKN	3	
3	Pemerintah Kota Malang	6	
4	Pemerintah Provinsi Banten	5	
5	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	38	
6	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13	

4. Sosialisasi JF API

Pada tahun 2023, DJPI melakukan kegiatan sosialisasi JF API ke daerah-daerah guna memperkenalkan dan mensosialisasikan keberadaan JF API yang dibentuk oleh DJPI. Selain itu, sosialisasi bertujuan untuk mengundang instansi

pemerintah daerah untuk mendaftar atau melakukan penyesuaian/*inpassing* JF API. Sosialisasi di tahun 2023 dilakukan di lima lokasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.45 serta dokumentasinya dapat dilihat pada Gambar 4.15.

Tabel 4.45 Daftar Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi JF API

No	Lokasi	Tanggal	Peserta
1	Jakarta (Kantor Pusat Kementerian PUPR)	7 Maret 2023	Dihadiri oleh berbagai perwakilan Unit Organisasi di Kementerian PUPR terdiri dari Setjen, Itjen, Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan, BPSDM, BPIW dan BPJT. Peserta hadir secara <i>offline</i> sebanyak 136 orang dan <i>online</i> melalui <i>zoom meeting</i> sebanyak 91 orang.
2	Surabaya, Jawa Timur	17 Maret 2023	Dihadiri oleh perwakilan Setda, Bappeda dan BKD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 36 orang
3	Solo, Jawa Tengah	9 September 2023	Dihadiri oleh Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan serta perwakilan Setda, Bappeda dan BKD Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 58 orang
4	Palembang, Sumatera Selatan	17 November 2023	Dihadiri oleh: <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Setditjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan serta perwakilan Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Palembang, Prabumulih, Banyuasin, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Muara Enim secara luring. - Kepala Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Banten secara daring melalui <i>zoom meeting</i>. - Jumlah audiens yang hadir pada kegiatan ini adalah 75 orang.
5	Balikpapan. Kalimantan Timur	6 Desember 2023	dihadiri oleh peserta sosialisasi sejumlah 43 orang yang terdiri dari Instansi Pemerintah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Otorita Ibu Kota Nusantara; b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; c. Pemerintah Kota Balikpapan; d. Pemerintah Kota Samarinda; e. Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara; f. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara; g. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat; dan h. Pemerintah Kabupaten Paser.



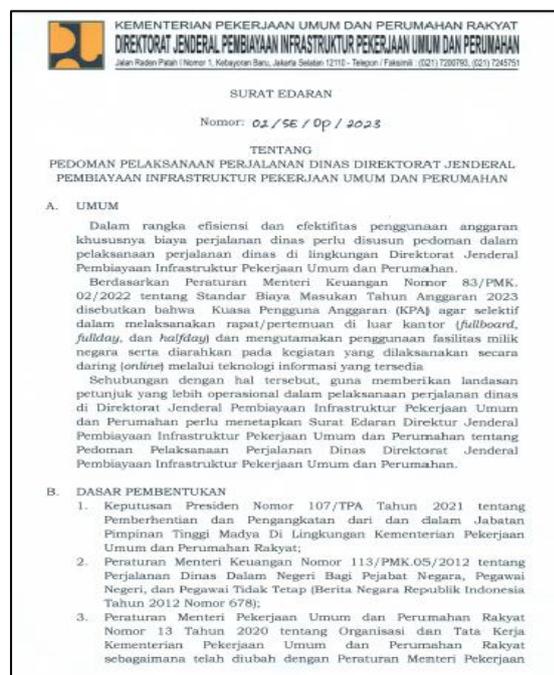
Gambar 4.15 Kegiatan Sosialisasi JF API

5. Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang Teknis Dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024

Pada tahun 2023, DJPI melakukan penyusunan soal untuk seleksi kompetensi teknis (pengadaan PPPK) sebanyak 450 soal dan seleksi kompetensi bidang (pengadaan CPNS) sebanyak 250 soal. Penyusunan soal ini melibatkan pejabat/pegawai di unit kerja DJPI dan juga PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

6. Penetapan Surat Edaran (SE) Dirjen PI tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang Dimanfaatkan oleh Sekretariat Jenderal, dan BPIW

Penyusunan SE Dirjen PI terkait perjalanan dinas dilatarbelakangi dengan adanya temuan serta penetapan *at cost* terkait biaya Perjalanan Dinas di lingkungan DJPI. SE ini disusun oleh Setditjen PI bersama dengan Satuan Kerja Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Penetapan SE ini kemudian disebarluaskan agar dapat dijadikan acuan oleh Unit Organisasi lain di Kementerian PUPR sebagai dasar pembayaran dalam pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Kementerian PUPR.



Gambar 4.16 SE Dirjen PI tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang Dimanfaatkan Sekjen Kementerian PUPR

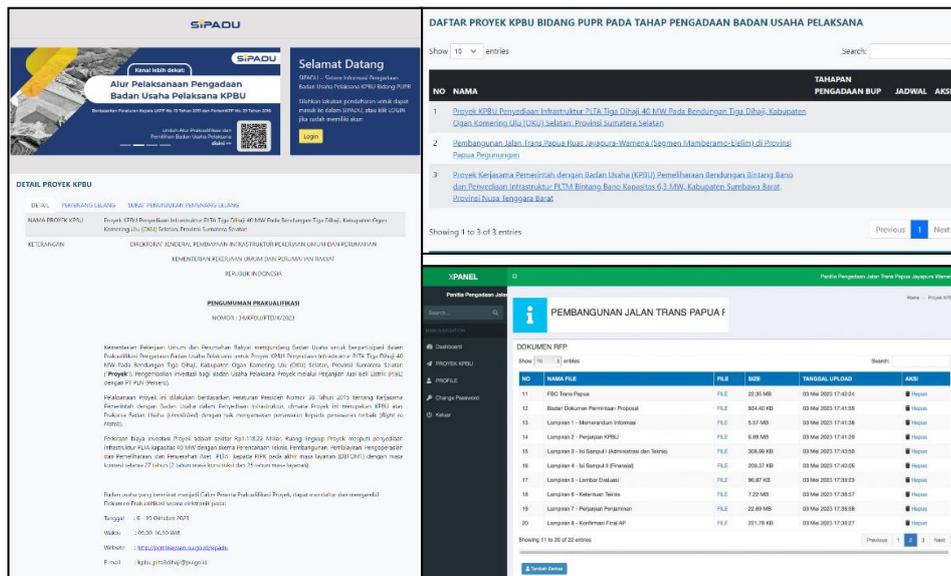
7. Implementasi Sistem Informasi Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan Proyek KPBU (SIPADU)

Setelah di-*launching* pada tanggal 1 Desember 2022, tahun ini DJPI melalui Direktorat PPIJJ dan Direktorat PPISDA ini telah mengimplementasikan SIPADU untuk Pengadaan Badan Usaha Proyek KPBU secara elektronik. Penggunaan SIPADU ini diharapkan mampu menciptakan pengadaan mitra kerjasama Badan Usaha yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, transparan,

memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan efisiensi proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU bidang PUPR serta meningkatkan kualitas pengadaan. SIPADU telah diimplementasikan pada pengadaan BUP Proyek KPBU sektor Jalan dan Jembatan dan Sumber Daya Air. Dalam hal ini, SIPADU digunakan untuk oleh Peserta Lelang untuk memperoleh Informasi mengenai pengumuman Prakualifikasi (PQ) Proyek KPBU, mengunduh Dokumen PQ, mengupload Dokumen Kualifikasi, memperoleh informasi mengenai peserta yang lolos Prakualifikasi, mengunduh Dokumen *Request for Proposal* (RfP), mengupload Dokumen Penawaran, memperoleh informasi terkait Penetapan Pemenang Lelang dan memperoleh Surat Penunjukan Pemenang Lelang.

Pada sektor Jalan dan Jembatan, SIPADU telah digunakan untuk pengadaan Proyek KPBU Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (Segmen Mamberamo-Elelim) di Provinsi Papua Pegunungan. PQ proyek ini diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022, pengumuman hasil PQ pada tanggal 26 Januari 2023. Selanjutnya untuk tahapan RfP dilakukan mulai bulan April - November 2023, dan saat ini Proyek Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena (segmen Mamberamo-Elelim) sedang dalam proses pengusulan pemenang lelang kepada Menteri PUPR.

Pada sektor Sumber Daya Air, SIPADU telah digunakan untuk pengadaan Proyek KPBU: (1) Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano Kapasitas 6,3 MW di Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini dalam proses pengusulan pemenang lelang kepada Menteri PUPR, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (2) Proyek Penyediaan Infrastruktur PLTA Tiga Dihaji 40 MW pada Bendungan Tiga Dihaji, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini memasuki tahap RfP.



Gambar 4.17 Implementasi SIPADU untuk Pengadaan BUP Proyek KPBU Kementerian PUPR

8. Penyusunan Peraturan Menteri PUPR No.11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi (BBA) Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh DJPI pada tahun 2023 adalah menyusun Peraturan Menteri PUPR No.11 Tahun 2023 tentang Bantuan Biaya Administrasi (BBA) Pemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). BBA ini diberikan kepada masyarakat berdasarkan surat pengakuan kurang bayar biaya administrasi maksimal Rp4 Juta.

Selain membuat rekomendasi kebijakan yang sedari awal tidak terdapat pada target Renstra di Tahun 2023, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan, DJPI juga berhasil merealisasikan pelaksanaan program penyaluran bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebanyak 13.160 rumah tangga atau senilai Rp52.513.355.147 pada tahun 2023, dimana program penyaluran ini tidak terdapat pada Renstra DJPI, Kementerian PUPR 2020 – 2024.



Gambar 4.18 Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Permen PUPR No. 11 Tahun 2023

9. **3 Bold Actions: Terobosan Menutup *Funding Gap* Infrastruktur**

Kementerian PUPR terus mendorong adanya berbagai inovasi sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur demi mewujudkan Visium Kementerian PUPR 2030. Dalam pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, beberapa isu yang dihadapi antara lain APBN yang terbatas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, khususnya bidang PUPR. Kementerian PUPR membutuhkan anggaran sebesar Rp2.058 Triliun untuk pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024. Dengan kapasitas APBN hanya sebesar Rp623 Triliun, sehingga terdapat *funding gap* sebesar 70% yang perlu dipenuhi dengan memanfaatkan sumber pendanaan alternatif.

Oleh karena itu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) berupaya menjawab tantangan alternatif pembiayaan infrastruktur tersebut melalui inovasi **3 Bold Actions**, sebagai terobosan untuk menutup *funding gap* infrastruktur. Inovasi tersebut dikemas dalam pelaksanaan kegiatan CreatIFF (*Creative Infrastructure Financing*) 2023 yang diinisiasi oleh generasi muda DJPI pada tanggal 13 Desember 2023.

Tiga langkah tersebut mencakup *fast track* atau percepatan KPBU, optimalisasi kepastian berinvestasi melalui inovasi dukungan dan penjaminan pemerintah, serta integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada proyek KPBU bidang PUPR.

Langkah tindak lanjut sebagai implementasi dari Strategi *3 Bold Actions* adalah sebagai berikut: (1) Penyempurnaan Rapermen PUPR No. 2 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur yang memuat 3 strategi dimaksud, (2) Penyusunan *Roadmap* Pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR dengan mempertimbangkan masukan dari *key stakeholders* terkait, (3) Standardisasi dokumen Prastudi Kelayakan, dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) KPBU, dokumen pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP), dan (4) Penyusunan Rencana Umum Proyek KPBU bidang PUPR dengan jangka waktu 5 tahunan sebagai *pipeline* proyek KPBU untuk menarik minat swasta dalam berinvestasi dan sebagai acuan dalam *delivery* Proyek.



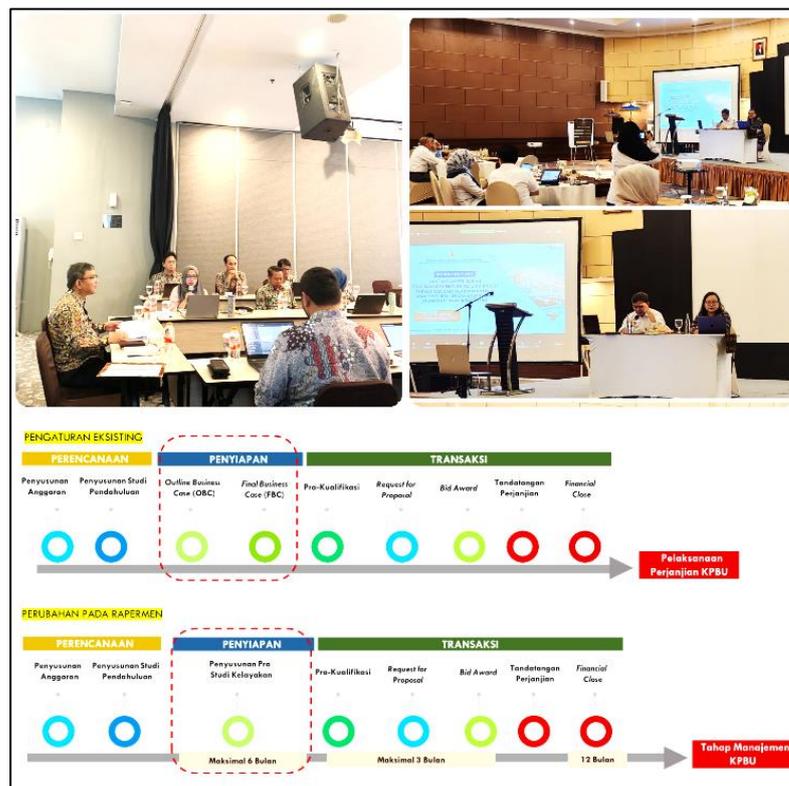
Gambar 4.19 "3 Bold Actions: Terobosan Menutup *Funding Gap* Infrastruktur

10. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Dalam hal mengadaptasi terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PPN No. 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur pada tanggal 22 September 2023, dan dalam rangka optimalisasi bisnis proses pelaksanaan KPBU di Kementerian PUPR, serta pembagian wewenang yang lebih jelas, efektif, serta efisien dalam rangka percepatan pelaksanaan KPBU sebagai upaya pemenuhan *funding gap* penyediaan infrastruktur bidang PUPR melalui sumber pendanaan non-APBN, Kementerian PUPR c.q DJPI saat ini sedang menyusun Permen PUPR terkait Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur dan mencabut Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Kekhususan pengaturan dalam Rapermen KPBU PUPR yaitu adanya standarisasi durasi pelaksanaan Proyek KPBU, penerapan inovasi dukungan pemerintah untuk meningkatkan kenyamanan investor, pendetailan tahapan KPBU atas Prakarsa Badan Usaha, implementasi Implementasi *staple* financing, dan perbaikan tata kelola melalui implementasi prinsip ESG pada Proyek KPBU. Sampai dengan akhir tahun 2023, progres penyusunan Rapermen ini yaitu telah dilakukan Harmonisasi pada tanggal 18-19 Desember 2023.



Gambar 4.20 Penyusunan Rapermen KPBU Kementerian PUPR

11. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, DJPI telah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melalui penerapan SPIP diharapkan dapat menciptakan budaya pengawasan terhadap organisasi sehingga menciptakan kinerja lebih optimal, terukur, akuntabel, dan mendorong pelayanan publik menjadi lebih transparan, serta reformasi birokrasi yang bersih. Dengan demikian, DJPI dapat memberikan pelayanan prima dan kepuasan kepada masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

DJPI melakukan Penilaian Mandiri atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR Tahun 2023 dengan periode penilaian 01 Juli 2022 s.d. 30 Juni 2023. Setelah dilakukan Penilaian Mandiri oleh DJPI, Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melakukan Penjaminan Kualitas atas SPIP DJPI tersebut. Tujuan Penjaminan Kualitas adalah memastikan bahwa proses dan hasil Penilaian Mandiri atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Kementerian PUPR TA. 2023 telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

Adapun ruang lingkup Penjaminan Kualitas adalah penilaian atas komponen: Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang ada di lingkungan DJPI, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penetapan Tujuan meliputi penilaian kualitas strategi pencapaian sasaran strategis.
- b. Struktur dan Proses meliputi lima unsur penilaian yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- c. Pencapaian Tujuan meliputi: efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, kendalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilakukan DJPI, didapatkan nilai 4,38 (terkelola dan terukur). Setelah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal didapatkan nilai SPIP DJPI tahun 2023 adalah **4,00** berada pada **level 4 (terkelola dan terukur)**. Capaian ini menggambarkan bahwa DJPI telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik, kualitas *output* yang dihasilkan telah relevan untuk mencapai sasaran program, indikator kinerja tepat, dan data andal.

Dalam Upaya untuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP Terintegrasi pada DJPI, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi atau penilaian internal secara berkala terkait pelaksanaan standar kompetensi SDM, dan melakukan kegiatan peningkatan kompetensi.
- b. Keterlibatan pimpinan untuk perbaikan kinerja berkelanjutan, serta berperan untuk mengambil Keputusan strategis organisasi guna mempertimbangkan risiko kinerja, pengelaaan keuangan, maupun pengelolaan aset.
- c. Melakukan pengukuran kinerja penerapan Manajemen Risiko yang dikaitkan dengan Dokumen Perencanaan.
- d. Melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi kemitraan DJPI dengan Instansi Pemerintah terkait.
- e. Melaporkan hasil pemantauan dan inovasi pengendalian serta level risiko untuk risiko DJPI yang masuk menjadi risiko strategis level Unit Pemilik Risiko (UPR) Kementerian PUPR.
- f. Melakukan tindak lanjut atas hasil pelaksanaan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan, maupun aset sebagai perbaikan berkelanjutan organisasi.
- g. Melakukan evaluasi intern dan secara berkala atas Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik DJPI.
- h. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja Komunikasi Publik.

12. Pelaksanaan Pengarustamaan *Gender* (PUG) di DJPI

Pelaksanaan PUG di Kementerian PUPR memiliki tujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah responsif *gender*, artinya tidak adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari hasil-hasil pembangunan infrastruktur PUPR. Dalam hal ini, DJPI telah melaksanakan PUG melalui fasilitasi penyaluran program bantuan pembiayaan perumahan yang diberikan. Bererapa contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada FLPP, proporsi penerima bantuan FLPP per 31 Desember 2023 sebanyak 229.000 unit terdiri atas 65,4% laki-laki dan 34,6% adalah Perempuan.
- b. Perluasan skema bantuan pembiayaan perumahan melalui Bantuan Biaya Administrasi (BBA) sebesar 4 juta rupiah/KK.
- c. Rencana perluasan akses pembiayaan kepada masyarakat informal, dimana Bank Penyalur tidak hanya melalui Bank Umum, namun BPR/BPRS dengan program KPR Swadaya dan Pembiayaan Mikro Perumahan.
- d. Perluasan Skema BP2BT dalam bentuk *Housing Micro Finance* yang dikhususkan bagi MBR sektor informal.

13. Penyusunan Kepmen PUPR tentang Batasan Harga Jual Rumah Subsidi Tahun 2023-2024

Kementerian PUPR secara resmi menetapkan batasan harga jual rumah subsidi untuk rumah tapak tahun 2023-2024. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan yang telah ditandatangani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tertanggal 23 Juni 2023. Kepmen tersebut disusun oleh DJPI dan dilatarbelakangi untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) dan Pasal 9 ayat (2) Permen PUPR Nomor 35 Tahun 2021 tentang

Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Secara umum diterbitkannya aturan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah (*availability*) dalam upaya mengurangi *backlog* kepemilikan rumah, meningkatkan akses pembiayaan (*accessibility*) bagi MBR, menjaga keterjangkauan rumah yang layak huni (*affordability*), menjaga keberlangsungan keberlanjutan program pembiayaan perumahan (*sustainability*) serta upaya Kementerian PUPR dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun oleh pengembang perumahan agar tetap memenuhi standar rumah layak huni. Batasan harga jual rumah pada Kepmen ini menjadi acuan bagi Pengembang rumah subsidi maupun Bank Pelaksana di seluruh daerah di Indonesia.



Gambar 4.21 Kegiatan Penyusunan Kepmen PUPR terkait Batasan Harga Jual Rumah Subsidi Tahun 2023-2024

14. Pengembangan *Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP)*

IGAHP adalah program pemerintah Indonesia untuk penyediaan perumahan (pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas) ramah lingkungan dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendukung pencapaian SDGs dan pemenuhan *Paris Climate Agreement*. Terdapat 2 lembaga donor potensial yang tertarik untuk berkontribusi dalam kegiatan *Green, Affordable, and Climate Resilient Housing Blended Finance* yaitu AIIB dan ADB. Selain itu, *World Bank* telah menyusun konsep produk IGAHP, di antaranya: HMF Swadaya, *Neighbourhood and Regeneration*, *Green Resilient KPR Subsidy* menggunakan dana hibah KGGTF. Terkait hibah KGGTF, DJPI akan melengkapi *readiness criteria* pengusulan *Green Book 2024* dengan dukungan dana hibah KGGTF yang difasilitasi oleh *World Bank*. Terdapat potensi pendanaan sebesar USD 50.000 dari *Build Change* yang rencananya akan digunakan untuk piloting 25-30 *Green HMF*.

Sebagai bagian dalam mendukung IGAHP, pada tahun 2023 DJPI melaksanakan kegiatan berikut: (1) Pendampingan kepada pemda dalam proses *assessment* dan sertifikasi BGH, (2) Penilaian kinerja bangunan gedung hijau pada pilot project IGAHP (Perumnas dan PT Purimega Saranaland), (3) Pelaksanaan dukungan ADB untuk TA penyiapan *thematic bonds* kepada PT SMF dan Perumnas, dan (4) Pelaksanaan Hibah dari WB (KGGTF dan ABIP) untuk penyiapan program IGAHP, termasuk penyiapan usulan PHLN (lanjutan NAHP).

15. Proyek KPBU yang Telah Melakukan Penandatanganan Perjanjian KPBU

Penandatanganan Perjanjian pada Proyek KPBU merupakan langkah krusial yang mengikat komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan infrastruktur baik dari sisi pemerintah maupun badan usaha. Perjanjian KPBU berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur hak, kewajiban, risiko, dan pembagian keuntungan antara Pemerintah selaku pemilik proyek dengan Badan Usaha selaku pelaksana proyek. Dalam perjanjian ini, berbagai aspek penting seperti lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, mekanisme pembayaran, standar kinerja, serta hal-hal lain yang terkait dijabarkan secara rinci dan mengikat.

Dengan adanya perjanjian KPBU yang telah ditandatangani, kedua belah pihak memiliki kepastian hukum dan keamanan berinvestasi dalam proyek tersebut. Pemerintah dapat memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan, sementara Badan Usaha dapat menjalankan operasional dengan lebih efisien dan mengoptimalkan pengembalian investasi.

Pada tahun 2023, tercatat 3 Proyek KPBU bidang PUPR telah melaksanakan penandatanganan perjanjian KPBU. Informasi terkait proyek adalah sebagai berikut:

a. Jalan Tol Akses Patimban

Penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Jalan Tol Akses Patimban dilakukan oleh Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan Direktur Utama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Akses Patimban (JAP) pada tanggal 24 Januari 2023. PT JAP merupakan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-Swasta-Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pemenang lelang pembangunan Jalan Tol Akses Patimban yang terdiri dari PT Jasa Marga, PT Nusa Raya Cipta (NRC), PT Adhi Karya (ADHI), PT PP, PT Wijaya Karya (WIKA), dan PT Subang Sejahtera.

Jalan Tol Akses Patimban memiliki total panjang 37,05 km di mana sepanjang 14,11 km akan dibangun oleh BUJT dan sepanjang 22,94 km akan dibangun oleh Pemerintah. Jalan tol ini akan terkoneksi dengan Jalan Tol Cikampek – Palimanan di sisi Selatan dan terkoneksi dengan Pelabuhan Patimban di sisi Utara.



Gambar 4.22 Penandatanganan Perjanjian KPBU Jalan Tol Akses Patimban

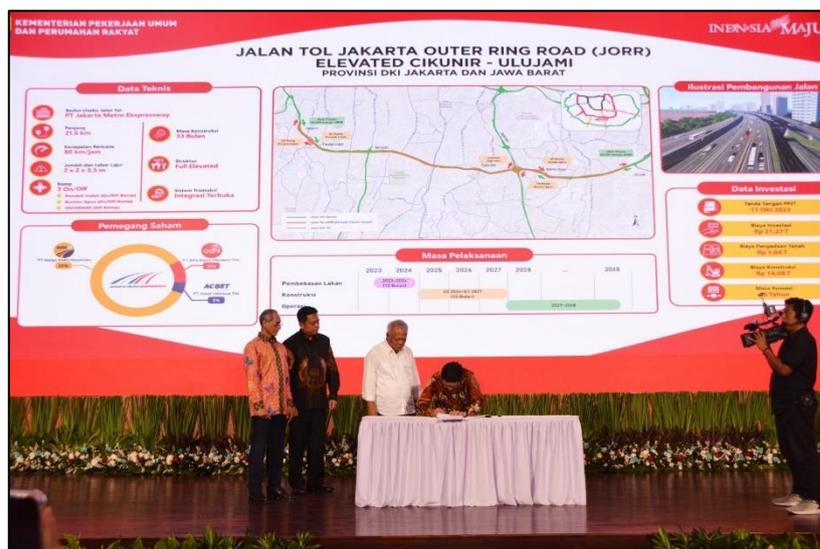
b. Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg

Penandatanganan PPJT Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg dilakukan oleh Kepala BPJT dengan Direktur Utama PT Duta Graha Karya pada tanggal 1 Agustus 2023. Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg dengan total panjang mencapai 38,60 km merupakan proyek KPBU yang diprakarsai oleh PT Duta Graha Karya (*unsolicited project*) dengan nilai investasi sebesar Rp23,22 Triliun dengan masa konsesi 40 tahun. Pembangunan Jalan Tol Kamal - Teluknaga - Rajeg bertujuan untuk mengembangkan kawasan Kabupaten Tangerang bagian Utara, dan upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas kendaraan di Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 4.23 Penandatanganan Perjanjian KPBU Jalan Tol Kamal – Teluknaga – Rajeg

- c. Jalan Tol Jakarta *Outer Ring Road* (JORR) *Elevated* Cikunir – Ulujami
 Penandatanganan PPJT Jalan Tol JORR *Elevated* Cikunir – Ulujami dilakukan oleh Kepala BPJT dengan Direktur Utama PT Jakarta Metro Ekspresway pada tanggal 11 Oktober 2023. Jalan Tol JORR *Elevated* Cikunir-Ulujami sepanjang 21,6 km akan dibangun dengan biaya investasi Rp21,26 Triliun dan masa konsensi 45 tahun.



Gambar 4.24 Penandatanganan Perjanjian KPBU Jalan Tol JORR *Elevated* Cikunir – Ulujami

- Simpulan Umum
- Faktor Pendukung Keberhasilan
- Permasalahan
- Rekomendasi dan Tindak Lanjut

BAB V

PENUTUP

**LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN**

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja DJPI Tahun 2023 ini merupakan bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi sesuai Permen PUPR No. 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, pelaksanaan kinerja program sesuai dengan Renstra serta pengelolaan anggaran dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja ini berisi akuntabilitas kinerja yang meliputi capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, analisis keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja, isu atau kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah serta rekomendasi yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kinerja DJPI tahun 2023 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian PUPR sangat memuaskan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa capaian IKSS yang melampaui atau mendekati target yang ditetapkan. Capaian IKSS Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni tahun 2023 mencapai 58,99% dari target 59,05% sehingga didapatkan kinerja sebesar 99,89%. Capaian ini dihitung berdasarkan akumulasi capaian program bidang pembiayaan dan penyediaan perumahan yang dilakukan oleh DJPI dan DJP. Meskipun belum mencapai target, namun telah menunjukkan kinerja yang optimal. Sementara pada IKSS Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif berhasil melampaui target 100% yakni sebesar 116,75%. Capaian IKSS ini merupakan kontribusi penuh dari kinerja DJPI.

Selanjutnya pada sasaran program, capaian IKSP Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan tahun 2023 sangat memuaskan. Hal ini dapat dilihat

dari target yang ditetapkan sebesar 100%, IKSP ini dapat terealisasi sebesar 235,57% sehingga didapatkan kinerja sebesar 235,57%. Pencapaian tersebut jauh melampaui target yang ditetapkan, bahkan mencapai lebih dari dua kali lipat target. DJPI menunjukkan kinerja luar dalam upaya memenuhi aksesibilitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Capaian IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif pada tahun 2023 mencapai 98,95% dari target 100% sehingga didapatkan kinerja sebesar 98,95%. Meskipun capaian tersebut di bawah target, namun menunjukkan hasil yang optimal dalam menyiapkan proyek KPBU yang siap dikerjasamakan sesuai rencana.

DJPI berhasil merealisasikan Rp234.351.034.000 atau 96,36% dari total pagu anggaran sebesar Rp243.192.037.000 di tahun 2023. Hal ini menunjukkan kinerja cukup baik dalam mengeksekusi anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target.

5.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Dalam pencapaian kinerja organisasi, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut yaitu berupa faktor internal maupun eksternal DJPI sebagai berikut:

Faktor Internal:

1. Keterlibatan pimpinan secara aktif mulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja, hingga akuntabilitas kinerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
2. Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi yang baik antara DJPI dengan para *stakeholder* terkait penyaluran program dan bantuan pembiayaan perumahan serta penyiapan Proyek KPBU.
3. Beberapa Unit Kerja di lingkungan DJPI berhasil mencapai *output* melebihi dari target yang ditetapkan.
4. Inovasi dan digitalisasi proses bisnis yang dilakukan oleh DJPI guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

5. Peningkatan pelayanan kepegawaian salah satunya dengan ditetapkannya DJPI sebagai pembina pada Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (JF API).

Faktor Eksternal:

1. Dukungan penuh dari Pemerintah untuk percepatan pelaksanaan proyek KPBU seperti penyediaan lahan, kemudahan perizinan proyek, penjaminan, pemberian fasilitasi penyiapan proyek (*Project Development Facility/PDF*), *Viability Gap Fund*.
2. Meningkatnya kerja sama dan kemitraan yang dilakukan oleh DJPI dengan berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi infrastruktur bidang PUPR (dalam dan luar negeri), khususnya terkait dengan skema pembiayaan alternatif.
3. Kerjasama yang baik antara DJPI dengan *stakeholder* terkait dalam merealisasikan fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan.

5.3 Permasalahan

Dalam mencapai target kinerja tahun 2023, tentunya tidak luput dari adanya permasalahan atau kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan ketidaktercapaian/kegagalan dalam pencapaian kinerja. Permasalahan tersebut diantaranya:

1. Tidak tercapainya target Tapera disebabkan oleh: (a) Bank Penyalur kesulitan melakukan penerbitan efek Tapera dengan konsep LTN (*Long Term Note*) di awal tahun 2023 mengingat biaya penerbitan efek relatif mahal untuk *case count* yang kecil dan prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat, (b) Belum ada perluasan pasar terkait Pembiayaan Tapera, mengingat saat ini masih terbatas pada PNS dan belum adanya penarikan iuran peserta akibat belum adanya regulasi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan *stakeholder terkait* lainnya.
2. Proses penyiapan Proyek KPBU dan pemenuhan *readiness criteria* membutuhkan waktu lama, sehingga mengakibatkan mundurnya target tahap transaksi.

3. Terdapat perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran mengikuti kondisi di lapangan sehingga mengakibatkan mundurnya waktu penyelesaian kegiatan atau adanya *gap* antara rencana dengan realisasi.
4. Sulitnya mencapai kesepakatan antar pemangku kepentingan sehingga menyebabkan mundurnya *timeline* dari target yang telah ditentukan.

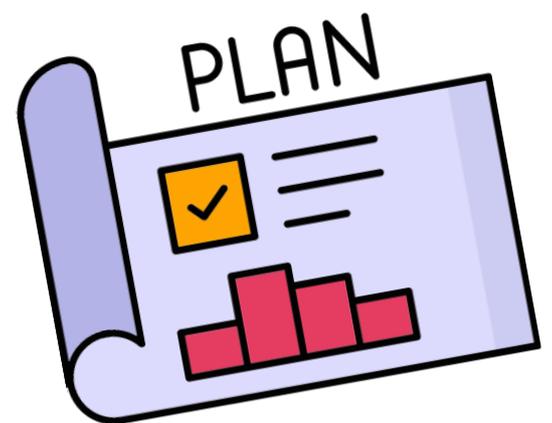
5.4 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh DJPI guna meningkatkan kinerja di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti penyusunan Rapermen PUPR terkait tata cara pelaksanaan kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur di Kementerian PUPR guna mempercepat pelaksanaan Proyek KPBU.
2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan melalui penyusunan Revisi Renstra DJPI TA. 2020-2024 dalam rangka menindaklanjuti dinamika perubahan lingkungan strategis Kementerian PUPR, dan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, strategi dan program, sehingga pengimplementasian pembangunan infrastruktur bidang PUPR dapat berjalan efektif dan responsif dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.
3. Menyusun Rancangan Renstra DJPI tahun 2025-2029.
4. Penyusunan Rencana Umum proyek KPBU Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan selaras dengan Renstra Kementerian PUPR dan RPJMN 2020 – 2024.
5. Mengimplementasikan “*Three Bold Actions*” sebagai terobosan untuk menutup *funding gap* infrastruktur dan percepatan tahap penyiapan dan transaksi Proyek KPBU.
6. Memperluas kerjasama dengan perbankan dan instansi terkait untuk mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel.
7. Mendorong peran serta Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Perumahan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan advokasi.

8. Melakukan pemutakhiran Dashboard Simpul KPBU sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi target, progres, kendala dalam pelaksanaan Proyek KPBU.
9. Menyusun pedoman manajemen risiko proyek infrastruktur KPBU PUPR.
10. Melakukan penyaluran Bantuan Biaya Administrasi TA 2024.
11. Mengimplementasikan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam Proyek KPBU.
12. Melakukan optimalisasi fitur integrasi antara FLPP dan SBUM (e-flpp 2.0), dalam mengurangi *gap* waktu penyaluran dan jumlah unit antara FLPP dan SBUM.
13. Pelaksanaan *Pilot Project* Skema Pembiayaan untuk Masyarakat Informal bersama Koalisi Perumahan Gotong Royong.
14. Melaksanakan skema KPR ASN PUPR Pelopor di IKN.
15. Mengembangkan konsep dana abadi (*endowment fund*) sebagai alternatif pembiayaan untuk kegiatan *Operational and Maintenance* (O&M) infrastruktur SDA dengan menggunakan Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sebagai sumber pembentukan dana abadi.
16. Melakukan reformasi KPBU sektor bidang PUPR.
17. Menganalisis konsep *Global Water Fund* sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur sumber daya air yang inovatif dan berkelanjutan guna mendukung pencapaian akses air bersih universal.
18. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja, termasuk kendala yang dihadapi guna mencapai target.

RENCANA AKSI



RENCANA AKSI DJPI TAHUN 2023

Target Indikator Kinerja Program

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET	RENCANA KINERJA BULANAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
SP. Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman													
Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100%	1%	3%	5%	10%	25%	45%	65%	80%	90%	95%	98%	100%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN													
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya													
Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100%	25%	28%	33%	40%	50%	62%	75%	83%	90%	95%	97%	100%
Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	0,79%	2,38%	3,96%	3,96%	7,93%	19,82%	30,47%	39,41%	47,00%	57,95%	72,48%	83,19%	87,81%

PERJANJIAN KINERJA





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Trisaputra Zuna
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 27 Januari 2023

Pihak Pertama

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM (1)	TARGET (2)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	79,26%

Program:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

-BA. 033

-BA. 999.07

2. Program Dukungan Manajemen

-BA. 033

Anggaran

Rp 4.381.752.033.000,00

Rp 29.232.033.000,00

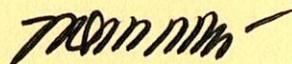
Rp 4.352.520.000.000,00

Rp 136.687.358.000,00

Rp 136.687.358.000,00

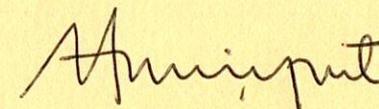
Jakarta, 27 Januari 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA



REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Herry Trisaputra Zuna
Jabatan : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. Basuki Hadimuljono
Jabatan : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
2. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

M. BASUKI HADIMULJONO

Jakarta, 29 Desember 2023

Pihak Pertama

HERRY TRISAPUTRA ZUNA

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA REVISI TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman	
1. Persentase pemenuhan aksesibilitas rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapat fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	100,00%
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	
SP Meningkatnya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya	
1. Tingkat ketersediaan KPBU infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang siap dikerjasamakan dan didukung sistem, kebijakan, dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif	100,00%
2. Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PUPR dan tugas teknis lainnya	87,81%

Program:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**
 - BA. 033
 - BA. 999.07
2. **Program Dukungan Manajemen**
 - BA. 033

Anggaran

Rp **4.437.724.033.000,00**
Rp 85.204.033.000,00
Rp 4.352.520.000.000,00
Rp **157.988.004.000,00**
Rp 157.988.004.000,00

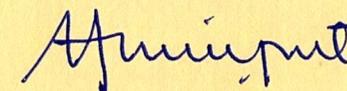
Jakarta, 29 Desember 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

METODE PENGUKURAN KINERJA



METODE PENGUKURAN KINERJA PROGRAM DJPI TAHUN 2023

DJPI mendukung pencapaian kinerja dua sasaran program, yaitu (1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan (2) Program Dukungan Manajemen. Berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nomor PR 0204-kw/03 hal Penyampaian Hasil Kuesioner dan Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja 2023, dijelaskan bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Revisi Renstra Strategis (Renstra) Kementerian PUPR Tahun 2020-2024, pengukuran capaian indikator kinerja (Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis) dalam Laporan Kinerja tahun 2023 tetap mengacu pada Lampiran 3 Peraturan Menteri PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian IKSP Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah rumah tangga berpenghasilan rendah yang mendapatkan subsidi perumahan dari DJPI meliputi program FLPP, SMF, dan Tapera dengan target.

2. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

A. IKSP Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan yang Efisien dan Efektif

IKSP ini dihitung dengan menjumlahkan indikator kontributor satu dan dua dengan pembobotan (%) sebagai berikut.

1) Indikator 1 (30%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang diukur berdasarkan Hasil Survei Tingkat Penerapan hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dibandingkan dengan target. Responden pada survei ini yaitu pihak internal dan eksternal DJPI, Kementerian PUPR.

2) Indikator 2 (70%)

Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dihitung berdasarkan jumlah paket KPBU yang siap dikerjasamakan dari kegiatan penyiapan pembiayaan infrastruktur SDA, Jalan dan Jembatan, Permukiman dan Perumahan (realisasi jumlah Paket Pembiayaan KPBU yang masuk tahap lelang pada tahun berjalan) dibandingkan dengan target.

B. IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

Capaian IKSP ini dihitung melalui kinerja IKK Setditjen PI dikali dengan target IKSP Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

BERITA ACARA KESEPAKATAN CAPAIAN KINERJA





BERITA ACARA KESEPAKATAN

NOMOR : 02 / BA / DP / 2024

Pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Hotel 101 Darmawangsa Jakarta telah diselenggarakan Rapat Pembahasan Berita Acara Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 yang dihadiri oleh perwakilan dari Unit Kerja Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan. Rapat ini bertujuan untuk menyepakati Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
SP: Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman			
IKSP: Persentase Pemenuhan Aksesibilitas Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah yang Mendapat Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	235,57	235,57
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SS: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSS. Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Didukung Sistem, Kebijakan, dan Strategi Pembiayaan Efisien dan Efektif	100,00	116,75	116,75
SP. Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya			
IKSP. Tingkat Ketersediaan KPBU Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang Siap Dikerjasamakan dan Didukung Sistem, Kebijakan dan Strategi Pembiayaan Yang Efisien dan Efektif	100,00	98,95	98,95
IKSP. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	87,81	99,37	113,16

2. Capaian Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di lingkungan DJPI TA. 2023

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	16,13	107,53
2	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	15,00	100,00
3	Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	10,00	100,00
4	Tingkat Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	10,00	15,00	150,00
5	Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	15,00	18,75	125,00
6	Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik yang modern, terpadu dan berorientasi publik	10,00	10,00	100,00

b. Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	100,00	109,86	109,86

c. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air	25,00	22,91	91,64

d. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan	25,00	25,00	100,00

e. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman	25,00	24,80	99,20

f. Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	KINERJA (%)
1	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Penyiapan Investasi Pembiayaan Perumahan	25,00	24,56	98,24
2	Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	100,00	106,07	106,07

Demikian Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan TA. 2023. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Januari 2024

Yang Menyepakati,

Sekretaris Direktorat Jenderal



Sudiro Roi Santoso

Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Agus Sulaeman

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Arvi Argyantoro

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Reni Ahiantini

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Meike Kencanawulan Martawidjaja

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Haryo Bakti Martoyoedo

Mengetahui,
Direktur Jenderal



Herry Trisaputra Zuna

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja DJPI TA. 2023

Nomor :

Tanggal : 18 Januari 2024

A. Capaian Kinerja Bantuan Pembiayaan Perumahan TA. 2023

Status: 31 Desember 2023

NO	BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	TARGET UNIT	REALISASI	
				KEUANGAN (Rp)	UNIT
1	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	25.180.000.000.000	220.000	26.320.045.507.031	229.000
2	Subsidi Selisih Bunga (SSB)*	3.457.520.000.000	754.004	3.457.520.000.000	750.497
3	Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM)**	895.000.000.000	220.000	895.000.000.000	220.000
4	SMF	-	10.000	6.493.872.078.412	333.988
5	TAPERA	1.050.000.000.000	12.072	1.042.845.955.685	7.249
TOTAL		30.582.520.000.000	242.072	38.209.283.541.128	570.237

Keterangan:

Target unit berdasarkan Renstra DJPI TA. 2020-2024 dan penyesuaian target Tapera sesuai Pengesahan atas RKAT BP Tapera Tahun 2023

*) Anggaran SSB digunakan untuk pembayaran penerbitan KPR tahun 2015-2020 sebanyak 754.004 unit, tidak ada akad baru sejak 2021, dan realisasi unit tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

***) Realisasi unit SBUM tidak diperhitungkan dalam capaian kinerja

B. Capaian Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Kualitas Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
		96,42	30,00

C. Capaian Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Bobot 30%)

Tingkat Penerapan Hasil Pengembangan Sistem, Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Hasil Survei (%)	Target (%)	Capaian (%)
		96,50	30,00

D. Capaian Kinerja Paket Pembiayaan KPBU Siap Dikerjasamakan TA. 2023

NO	SEKTOR	TARGET		REALISASI		
		JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)	JUMLAH PROYEK	NAMA PROYEK	NILAI INVESTASI (Rp)
1	Sumber Daya Air	5	5.141.240.929.000	2	PLTM Bendungan Jenelata, Sulawesi Selatan PLTM Leuwikeris, Jawa Barat	134.219.000.000 225.380.000.000
2	Jalan dan Jembatan	2	66.432.251.000.000	5	Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Ciamis Jalan Tol Tuban - Babat - Lamongan- Gresik Jalan Tol Demak Tuban Jalan Tol Gilimanuk Mengwi Fly Over Sitingjau Lauik	37.147.000.000.000 23.332.000.000.000 49.607.000.000.000 22.840.000.000.000 2.824.000.000.000
3	Permukiman	2	10.620.000.000.000	4	SPAM Regional Karian Serpong Sisi Hilir Kota Tangerang (BtoB) SPAM Batam-Bintan SPAM Regional Ir. H.Djuanda/ Jatiluhur II SPAM Regional Sinumbra	1.940.000.000.000 14.438.858.000.000 9.740.000.000.000 1.060.867.000.000
4	Perumahan	4	61.230.000.000.000	2	Rusun Hankam WP 1A (60 tower) Rusun North Government WP 1A (6 tower)	14.990.000.000.000 1.670.000.000.000
TOTAL		13	143.423.491.929.000	13		179.949.324.000.000
		Capaian Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)		70,00%		
		Capaian Investasi Proyek Siap Dikerjasamakan (70%)		87,83%		

Keterangan:

- Target berdasarkan DIPA DJPI TA. 2023

- Realisasi Proyek Siap Dikerjasamakan minimal menyelesaikan tahapan Penyiapan (FBC/FS)

E. Capaian Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEUANGAN (%)		FISIK (%)		
					RN	RL	RN	RL	KINERJA
I	IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
1	4976	Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan	85.204.033	78.534.648	100,00	92,17	100,00	92,42	92,42
II	WA	Program Dukungan Manajemen	157.988.004	155.816.386	100,00	98,63	100,00	98,86	98,86
1	4194	Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	73.396.881	72.536.007	100,00	98,83	100,00	99,10	99,10
2	4195	Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan	19.398.894	19.191.105	100,00	98,93	100,00	99,79	99,79
3	4197	Penyelenggaraan Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	65.192.229	64.089.275	100,00	98,31	100,00	98,32	98,32
TOTAL			243.192.037	234.351.034	100,00	96,36	100,00	96,60	96,60

Sumber: <https://iemon.pu.go.id/>, status: 10 Januari 2024

DAFTAR PENGHARGAAN



DAFTAR PENGHARGAAN yang Diperoleh DJPI TAHUN 2023

1. *PPP Promotor of The Year*, 01 Maret 2023



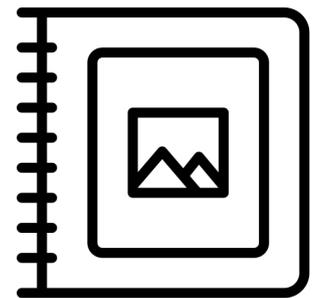
2. *Mitra Strategis Real Estate Indonesia (REI)*, 27 Juli 2023



3. Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyupaan (SMAP), 29 November 2023



DOKUMENTASI KEGIATAN



DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN DJPI TAHUN 2023



Focus Group Discussion Antar Pembuat Kebijakan di Sektor Perumahan



Groundbreaking Perumahan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo



Kick Off Meeting Persiapan Studi Kelayakan Semarang City



Talkshow "Wujudkan Hunian Layak Berkelanjutan dan Terjangkau untuk Semua" di Palembang



Peluncuran Tabungan BTN Rumah Tapera (TRT) dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BP Tapera, BTN dan Agregator Pekerja Informal



International Conference on Dispute Resolution and Improvement of Construction Quality

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Sosialisasi Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan



Pelantikan Jabatan Fungsional di lingkungan DJPI



Pembuatan Booth Pelayanan Media Informasi dan Digitalisasi Perundang-undangan DJPI



Internalisasi Anti Gratifikasi, WBS, Benturan Kepentingan dan Pelayanan Prima dalam Penerapan Core Value ASN BerAKHLAK



Sharing Session Bincang Risiko (Bisik)



Internalisasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan DJPI

Direktorat Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan



Harmonisasi Rancangan Perubahan Permen PUPR Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur



Rapat Penyiapan Sasaran dan Target Renstra DJPI TA. 2025-2029



Bimbingan Teknis Pelaksanaan Konfirmasi Data Masyarakat dalam Penyusunan *Housing Queue* di Kabupaten Kendal



Finalisasi Evaluasi AKIP di DJPI TA. 2022



Workshop 3 Konsep Manajemen Risiko



PUPR *Compliance* Forum 2023 "Penguatan SDM dan Budaya Anti Korupsi melalui Pengembangan SMAP"

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air



Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Q1 2023 Direktorat PPISDA



Audiensi dengan Gubernur Jambi terkait Progres Penyiapan KPBU Bendungan Merangin



Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Potensi Proyek KPBU DI Lhok Guci dan DI Jambo Aye, Provinsi Aceh



Rapat Evaluasi Penyiapan KPBU TA. 2023 dan Percepatan Pelaksanaan KPBU Sektor Sumber Dava Air



Rapat Pembahasan Rancangan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek KPBU *Unsolicited* Optimalisasi dan Revitalisasi

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan



Market Sounding Proyek KPBU Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan Gresik



Market Consultation Proyek KPBU Jalan Tol Tuban-Babat-Lamongan Gresik



Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Q1 2023 Direktorat PPIJJ



Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Q1 2023 Direktorat PPIJJ



Rapat Pembahasan Rencana Trase Jalan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak/Surabaya Eastern Ring Road (SERR)



Sertifikasi SMAP SNI ISO 37001:2016 pada Direktorat PPIJJ

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman



Rapat Pembahasan Proyek SPAM Regional Pulau Lombok



Kunjungan Lapangan ke Waduk Sindangheula



Rapat Pembahasan Kerjasama Penurunan *Non Revenue Water* (NRW) dengan Skema Pelaksanaan *Business to Business* (B2B)



Penandatanganan Perjanjian Penyediaan Air Minum Curah (Perjanjian Offtaker) Provinsi DKI Jakarta pada Proyek KPBU SPAM Regional Karian Serpong



Rapat Pembahasan Progres Proyek dan Penyusunan Dokumen Pencairan VGF Tahap II, serta Kunjungan Lapangan Proyek KPBU SPAM Kota Pekanbaru



Rapat Pembahasan Isu Strategis Penjaminan SPAM Regional Ir. H. Djuanda/Jatiluhur II

Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan



Kunjungan IGHP Expo, Ekosistem Rumah Subsidi Hijau



Market Sounding Proyek KPBUS Rumah Susun Karawang Spuur



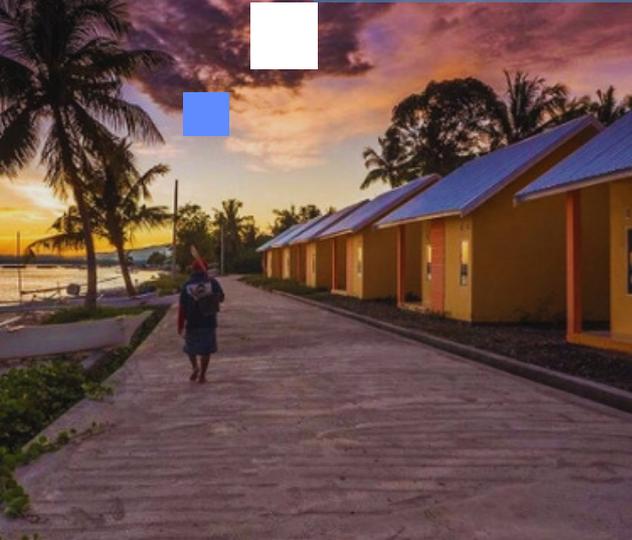
Kunjungan Lapangan Proyek KPBUS Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung



Rapat Konsinyasi Pembahasan Kajian Studi Kelayakan Proyek Rusun Kota Surabaya



Rapat Koordinasi Kualitas Konstruksi Rumah Pada Program Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan di Provinsi Jawa Tengah



DJPI

DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN